Muhammad Wildan

IDEA press yogyakarta

MUSLIM MINORITAS KONTEMPORER

Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminiasi, dan Islamofobia

Muhammad Wildan

MUSLIM MINORITAS KONTEMPORER

Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminiasi, dan Islamofobia

IDEA press yogyakarta

MUSLIM MINORITAS KONTEMPORER

Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminiasi, dan Islamofobia

Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhammad Wildan
Muslim Minoritas Kontemporer: Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminiasi, dan Islamofobia --Muhammad Wildan-- Cet 1- Idea Press Yogyakarta, Yogyakarta 2022-- viii+ 178--hlm--15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-623-484-012-4

1. Sejarah Islam 2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

MUSLIM MINORITAS KONTEMPORER:
Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminiasi, dan Islamofobia

Penulis: Muhammad Wildan
Setting Layout: Agus S
Desain Cover: Ach. Mahfud
Cetakan Pertama: September 2022
Penerbit: Idea Press Yogyakarta

Diterbitkan oleh Penerbit IDEA Press Yogyakarta
Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta
Email: ideapres.now@gmail.com/ idea_press@yahoo.com

Anggota IKAPI DIY
No.140/DIY/2021

Copyright @2022 Penulis
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All right reserved.

CV. IDEA SEJAHTERA

KATA PENGANTAR

Islam mengalami perkembangan secara signifikan tidak hanya di dunia Muslim tapi juga di belahan dunia lain dimana Muslim minoritas. Di satu sisi, Islam mengalami peningkatan secara kualitas di negara-negara mayoritas Muslim, dan di sisi yang lain mengalami peningkatan kuantitas di belahan dunia yang lain. Perkembangan kuantitas ini juga terjadi di negara-negara Barat yang pada dasarnya bukan rumah bagi Islam, seperti di Amerika, Eropa, maupun Australia. Dalam sejarahnya, proses Muslim menjadi minoritas ini terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah migrasi dan konversi.

Pertemuan (peradaban) Islam dengan dunia Barat menarik untuk dielaborasi dan dikaji. Walaupun mayoritas Muslim di dunia Barat tetap didominasi migran Asia dan Afrika, konversi Islam juga cukup signifikan di beberapa negara. Dalam perkembangannya tidak sedikit generasi Muslim yang lahir di dunia Barat sebagai generasi kedua, ketiga atau selanjutnya. Dalam konteks inilah terkadang para generasi muda kesulitan untuk betul-betul memisahkan budaya Islam dan Barat. Secara internal, fikih juga harus mengalami banyak adaptasi di dunia Barat sehingga memunculkan mazhab baru atau eklektik, aspek budaya lain juga mengalami akulturasi seiring dengan integrasi Muslim di dunia barunya.

Selain di Barat, Islam juga menjadi fenomena signifikan di beberapa wilayah Asia. Di Thailand, Myanmar, dan Cina, Islam bukan merupakan fenomena baru. Dari aspek historis bisa kita dapatkan bahwa Islam telah menjadi bagian dari sejarah panjang negara-negara itu, termasuk sebelum era modern. Namun, dalam perkembangannya di era modern, Muslim menjadi komunitas yang "asing" di negara tersebut.

Di tengah-tengah tantangan minoritas dan modernitas, Islam juga mengalami tantangan secara signifikan seperti radikalisme, diskriminasi, dan islamofobia. Radikalisme muncul di berbagai belahan dunia sebagai reaksi terhadap ketidakmampuan Islam untuk beradaptasi dengan modernitas khususnya di dunia Barat. Dalam beberapa kasus, resistensi pada komunitas pada dunia baru Islam juga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan juga Islamofobia. Oleh karena itulah sering ada perdebatan mana yang aksi dan mana yang reaksi antara radikalisme dan radikalisme-islamofobia seperti diskusi tak berujung antara lebih dulu mana telur dan ayam.

Walaupun demikian, tidak sedikit Muslim yang mampu beradaptasi dan berasimilasi terhadap dunia baru mereka. Di banyak negara, Muslim bahkan mampu berintegrasi dengan masyarakat lokal. Dalam banyak hal, Islam juga cukup fleksibel dalam menghadapi perubahan budaya di sekitarnya. Masa depan Islam tidak hanya di dunia mayoritas Muslim; keberadaan Muslim di negara-negara lain juga signifikan untuk melihat masa depan Islam tidak hanya di ranah sosial-budaya, tapi juga politik.

Oleh karena itu, buku di tangan para pembaca ini menjadi penting untuk melihat bagaimana sejarah Islam di sebuah negara, corak beragamanya, tantangan radikalisme dan diskriminasi-islamofobia hingga masa depan Islam. Tulisan dalam bentuk artikel sudah banyak ditulis oleh sarjana atau pengamat, namun tulisan dalam bentuk buku masih sedikit dan perlu lebih banyak peneliti lagi khususnya Islam di dunia Barat. Semoga buku ini diantara sedikit yang berkontribusi untuk melihat lebih dalam Islam dan Muslim di masing-masing konteks negara atau wilayah. Walaupun belum secara komprehensif memotret keberadaan Islam dan Muslim di berbagai belahan dunia, penulis berusaha untuk bisa mengambil sampel di beberapa belahan dunia dimana Islam berkembang secara signifikan.

Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak dan kolega yang telah membantu sehingga buku ini bisa terbit. Proses penulisan dan editing buku ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga bisa layak untuk diterbitkan. Oleh karena itu

saya ucapkan terima kasih pada beberapa kolega, khususnya mas Azis, dosen baru di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, yang banyak mengedit dan memberi masukan sehingga buku ini bisa segera terbit. Kami ucapkan terima kasih juga pada beberapa editor jurnal yang sudah membolehkan saya menerbitkan ulang artikel dalam format yang berbeda. Terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih pada pak Habib Kamil yang telah sabar bolak-balik mengedit draft buku ini sehingga layak diterbitkan.

Sleman, September 2022

Penulis

Muhammad Wildan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

1. Islam di Thailand 1
2. Islam dan Demokratisasi di Myanmar 19
3. Islam di Cina 35
4. Islam di Australia 49
5. Islam di Amerika 71
6. Islam di Jerman 87
7. Islam di Inggris 107
8. Islam di Rusia 125
9. Islam di Spanyol 141

DAFTAR INDEKS 171

BIODATA PENULIS 177

1

ISLAM DI THAILAND

Islam di Thailand menarik untuk dikaji karena mempunyai sejarah yang panjang yang hampir sama dengan negara-negara mayoritas Muslim di Asia Tenggara lainnya. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Buddha, Thailand juga mempunyai banyak komunitas Muslim di beberapa provinsi khususnya di wilayah selatan seperti Narathiwat dan Pattani. Secara umum, mayoritas Muslim di Thailand adalah penduduk asli yang beretnis Melayu. Secara geografis, Thailand selatan berbatasan dengan negara Malaysia yang identik dari segi etnis, termasuk bahasanya. Karena pengaruh penjajahan Barat dimana wilayah Thailand selatan tidak termasuk jajahan Inggris maka kemerdekaan Malaysia tidak melibatkan wilayah ini.

Sebagai minoritas, Muslim di Thailand mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Walaupun mengalami perkembangan dari sisi kuantitas, Muslim Thailand mengalami berbagai tantangan diskriminasi dari pemerintah maupun islamofobia secara sosial. Beberapa sumber menyebutkan bahwa hak-hak politik umat Islam di Thailand cenderung diabaikan (Kettani, 2005: 17). Tidak sedikit kasus-kasus diskriminasi dan Islamofobia yang terjadi menantang Muslim Thailand untuk lebih beradaptasi dan berintegrasi dengan kultur Thailand yang mayoritas Buddha. Ini tantangan umum bahwa kelompok minoritas yang harus hidup berdampingan secara damai dengan kelompok mayoritas negara tersebut.

A. Pendahuluan

Sebagai negara berpenduduk mayoritas Buddha, keberadaan Islam di Thailand menarik untuk dikaji. Negara yang dikenal sebagai negara gajah putih ini dikelilingi oleh sejumlah negara lain di Asia Tenggara meliputi Myanmar (Burma) di sebelah barat, Laos di sebelah utara dan timur, dan Malaysia di bagian selatan. Sebelum 1939, negara ini disebut sebagai Siam. Pergantian nama ini merupakan bagian dari serangkaian peristiwa penting pasca revolusi 1932 yang mengubah bentuk pemerintahan kerajaan Siam dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.

Secara historis, suku bangsa Thai berasal dari masyarakat di kawasan Cina selatan yang bermigrasi ke Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi. Setelah beberapa abad, mereka berpindah ke wilayah basin sungai Chao Phraya lalu berinteraksi dan menikah dengan suku pribumi seperti suku Mon dan Khmer. Asimilasi ini kemudian menjadikan mereka familier dengan tradisi Hindu dan Buddha yang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Mereka kemudian berhasil mendirikan Kerajaan Siam dengan mengadopsi tradisi keagamaan Buddha Theravada dan menjadi salah satu identitas nasional Thailand sampai hari ini (Scupin dan Joll, 2020: 103). Sebelum diskusi lebih jauh, lebih baik dibahas bahwa ada dua istilah yang mirip di sini yaitu Pattani dan Patani. Kata Pattani itu adalah nama sebuah provinsi (*changwat*) di wilayah Thailand selatan, sedangkan Patani adalah sebutan wilayah Thailand selatan yang merupakan bekas Kesultanan Patani yang meliputi Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat. Sedangkan etnis-etnis di negara ini menurut data 2019 adalah Thai (86%), Melayu (4%), Khmer (2%), dan lain-lain (8%).

Umat Islam di Thailand menjadi kelompok minoritas terbesar kedua setelah Tionghoa. Di wilayah Thailand bagian selatan, umat Islam pernah memiliki kerajaan berdaulat bernama Kesultanan Patani Raya atau Patani Darussalam dimana jejak sejarah dan kebudayaannya masih bertahan sampai hari ini. Kesultanan ini terdiri dari empat provinsi yakni Satun, Yala, Pattani, dan Narathiwat yang telah dikuasai dan dianeksasi oleh Kerajaan Siam pada dekade

pertama abad ke-20 Masehi. Secara politis, umat Islam di wilayah selatan ini menjadi hal yang paling menantang bagi otoritas Thailand dalam upaya mereka menerapkan kebijakan asimilasi dan "modernisasi" umat Islam di dalam kehidupan negara Thailand yang didominasi oleh kebudayaan Thai dan agama Buddha (Aphornsuvan, 2012: 3).

Sub-bab ini berusaha untuk menjawab berbagai permasalahan di atas yang kita rumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana sejarah Islamisasi wilayah Thailand selatan? Apa bentuk-bentuk diskriminasi dan islamofobia yang terjadi di Thailand? Bagaimana karakteristik dan corak Islam di Thailand? Sejauh mana resistensi Muslim dan respons terhadap tantangan Islamisme? Terakhir, sejauh mana integrasi umat Islam dan bagaimana masa depan Islam di Thailand?

B. Sejarah Masuknya Islam

Sejarah masuknya Islam di Thailand setidaknya dapat ditandai dengan dua gelombang utama: pertama, Islamisasi di Kesultanan Patani sekitar tahun 1520-an. Kedua, kehadiran orang-orang Muslim non-Melayu seperti Persia, Champa, dan India baik di kerajaan maupun kota Ayudhaya dan dinasti Chakri sejak abad ke-14 Masehi (Yusuf, 2007: 232). Sumber lainnya menyatakan bahwa umat Islam telah ada di Thailand terutama di kawasan Patani sejak abad ke-9 Masehi. Mereka terdiri dari Muslim etnis Melayu bermazhab Syafi'i yang berhasil membentuk Kesultanan Patani Darussalam pada abad ke-14 M. Berdasarkan tulisan Tomé Pires, Laksamana Cheng Ho melawat di wilayah ini sekitar tahun 1404-1433 dan menceritakan tentang adanya Kesultanan Patani (Saifullah, 2010: 83)Kesultanan Patani terletak di antara dua kerajaan yang berbeda, yakni Kesultanan Islam Malaka di bagian selatan dan Kerajaan Buddhis Siam di sebelah utara. Oleh karenanya, hubungan harmonis antara Islam dan Buddha menghasilkan pengaruh Buddha dalam praktik Islam di wilayah ini (Scupin dan Joll, 2020: 103).

Kelompok Syiah merupakan Muslim yang paling terkemuka dan berhasil berasimilasi ke dalam lingkaran kelompok penguasa melalui jalur pernikahan serta menjadi bagian dari elite Kerajaan Siam sejak ke-17 Masehi. Raja Songtham (1610-1628 M) di Ayutthaya menunjuk pemimpin Syiah sebagai Chularajmontri (Syaikhul Islam) pertama yang bertugas sebagai penasihat terkait kebijakan Kerajaan terhadap umat Islam. Tidak ada konflik rasial maupun keagamaan yang berarti pada masa tersebut di antara pengikut Buddha dan Islam. Mereka memiliki hubungan yang harmonis antara satu dengan lainnya. Namun, hubungan ini mulai berubah seiring Kerajaan Siam memproklamirkan agama Buddha Theravada sebagai agama nasional dan melabeli kelompok Muslim dan non-Buddhis lainnya sebagai kelompok minoritas (Aphornsuvan, 2012: 8-9).

Sepanjang abad ke-18 dan ke-19 Masehi, Kerajaan Siam berhasil menjadikan kerajaan-kerajaan Islam yang berada di Thailand menjadi bagian dari kekuasaannya. Kesultanan Patani sendiri berhasil dianeksasi pada 1906 yang secara drastis menjadi umat Islam di kawasan ini berubah dari kelompok mayoritas menjadi kelompok minoritas. Kondisi mereka semakin tidak menentu beriringan dengan pembentukan negara-bangsa Thailand pasca revolusi 1932 M yang mengubah bentuk kerajaan Siam dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Pasca Perang Dunia Kedua, pemerintahan Thailand mempromosikan negara-bangsa yang didasarkan pada tiga pilar utama yaitu "bangsa" (*chat*), "agama" (*sasana*), dan "monarki" (*phramahaksat*). Otoritas Thailand menerapkan politik asimilasi kepada masyarakat Muslim di kawasan selatan. Para pemimpin birokrasi dikirim dari Bangkok, bukan oleh masyarakat Muslim Melayu lokal. Begitu juga dengan guru agama di mana pelajaran agama Buddha diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah (Feigenblatt, 2010: 55).

Dengan penjelasan di atas diketahui bahwa umat Islam yang berada di bawah Kesultanan Patani pada awalnya merupakan pemerintahan yang otonom, dengan Islam dan budaya dan bahasa Melayu sebagai identitas utama mereka. Perbedaan agama dan budaya ini pula yang menjadi salah satu faktor utama mereka

menjadi kelompok minoritas. Setidaknya sejak tahun 1940-an, otoritas Thailand menyebut umat Islam di bagian tengah dan utara yang telah berasimilasi dengan budaya Thai sebagai "Thai Muslim", sedangkan umat Islam di kawasan bekas kesultanan Patani disebut sebagai "*khaek*" yang artinya orang asing.

C. Populasi & Demografi

Tidak ada data yang pasti terkait dengan jumlah populasi dan demografi Muslim di Thailand. Dari total populasi penduduk 69,9 juta jiwa (2021), umat Islam merupakan agama minoritas terbesar di negara tersebut dengan jumlah berkisar antara 4-10%. Perbedaan persentase umat Islam ini berdasarkan pada berbagai sumber. Badan Resmi Statistik Nasional Thailand (2005) menyatakan bahwa jumlah umat Islam yaitu 4%-5%, menurut Badan Inteligen Amerika (2016) dan *Pew Research Center* sekitar 5,5%, dan berdasarkan catatan Kedutaan Besar Thailand di Riyadh Arab Saudi sekitar 12%. Sementara itu, salah satu anggota dari *Chiang Mai Provincial Islamic committee* menyatakan bahwa jumlah yang mendekati benar yaitu 7-8 persen. Mayoritas penduduk Thailand berafiliasi dengan Buddha Theravada (lebih dari 80%) dan kurang dari 5% berafiliasi dengan agama lainnya seperti Kristen, Konghucu, Hindu, Yahudi, Sikh, Tao, dan kepercayaan lokal.[1]

Secara lebih rinci, pembagian jumlah Muslim di tiap-tiap wilayah berdasarkan Badan Statistik Nasional Thailand 2005 adalah sebagai berikut:

---

[1] Beberapa sumber rujukan untuk populasi Thailand lihat *International Religious Report Thailand 2018*; *United Nations World Population Prospects 2019* dalam https://population.un.org/wpp/ (diakses 8 Agustus 2021); Keterangan Kedutaan Besar Thailand di Riyadh Saudi Arabia https://riyadh.thaiembassy.org/en/page/29025-muslim-in-thailand?menu=5d80b47015e39c0a5000653b, diakses 8 Agustus 2021; PEW Research Center tentang Masa Depan Kehidupan Keagamaan Dunia 2010 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/thailand#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2010&region_name=All%20Countries&restrictions_year=2016; lihat juga Songsiri Putthongchai, "What is it like to be Muslim in Thailand? A case study of Thailand through Muslim professionals' perspectives" disertasi pada University of Exeter 2013.

WILAYAH THAILAND	JUMLAH MUSLIM
Bagian Utara	34,299
Bagian Tengah	488,007
Bagian Timur Laut	20,825
Bagian Selatan	2,256,412
JUMLAH	**2,799,543**

Namun demikian, data resmi pembagian jumlah ini masih problematik. Sejumlah penelitian lainnya membagi jumlah populasi Muslim dengan dua kategori utama yaitu Thailand bagian atas (*upper south*) dan bagian bawah (*lower south*). Berdasarkan data dari kelompok kerja Walailuk University pada tahun 2000 jumlah Muslim di bagian atas saja jumlahnya mencapai 1.000.000 jiwa dan 1.293.000 jiwa menurut data dari *Central Islamic Committee of Thailand*. Adapun jumlah Muslim di bagian Bawah berkisar antara tiga sampai dengan lima juta jiwa berdasarkan *Central Islamic Committee of Thailand* dan *Population and Housing Census 2000* (Putthongchai, 2013: 74).

Data pada masa sebelumnya, yakni tahun 1976, sebagaimana dikutip Ali Kettani (2005) adalah sebagai berikut:

WILAYAH	JUMLAH	MUSLIM	PROSENTASE	MASJID
Selatan	5.534	2.820	51.0%	1695
Tengah	13.459	1.210	9.0%	364
Timur laut	15.584	930	6.0%	18
Utara	9.696	290	3.0%	1
JUMLAH	44.273	5.250	11.9%	2078

Berdasarkan sejumlah data di atas diketahui bahwa populasi terbesar umat Islam di Thailand menempati provinsi-provinsi yang berada di Thailand bagian selatan. Sebagian besar dari mereka adalah beretnis Melayu dan menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari. Berdasarkan data yang diambil dari kedutaan besar Thailand di Arab Saudi komposisi Muslim dibandingkan dengan pemeluk agama lain di tiga provinsi terbesar yaitu sebagai berikut:

PROPINSI	MUSLIM	BUDDHA	KRISTEN
Pattani	500,000	130,000	4,000
Narathiwat	600,000	100,000	3,000
Yala	300,000	200,000	3,000
JUMLAH	**1.4 juta**	**0.43 juta**	**0.01 juta**

D. Karakteristik Muslim dan sebab-sebab Minoritas

Populasi Muslim di Thailand sangat beragam. Thailand bagian utara dihuni oleh beragam warga keturunan seperti China, India, dan Malaya. Populasi terbesar yaitu keturunan China (60%) yang lebih dikenal sebagai Chin-Ho Thailand. Populasi terbesar kedua yaitu keturunan dari India yang mulai menetap sebelum abad ke-20 M. Pasca Perang Dunia II, Muslim dari Asia Selatan dan Burma mulai datang ke kawasan ini meski dalam jumlah kecil. Terdapat juga masyarakat setempat yang melakukan konversi ke agama Islam terutama di kalangan suku Mong dan lainnya yang mana mereka menikah dengan Muslim dan menjadikan semakin beragamnya umat Islam di wilayah ini (Putthongchai, 2013: 74).

Populasi Muslim di wilayah bagian tengah, khususnya Bangkok, sangat beragam dan lebih terintegrasi dengan masyarakat Thailand dibandingkan dengan Muslim yang berada di wilayah selatan. Secara sosiologis, mereka telah membaur dengan kelompok lainnya di mana sering terjadi pernikahan lintas agama seperti yang terjadi di wilayah Nonthaburi. Akar dari pembauran ini dapat dilacak ke belakang pada masa Raja Songtham (1610-1628) yang memilih Chularajmontri pertama yakni Sheikh Ahmad Qomi. Pada masa itu Chularajmontri (setara dengan gelar Mullah) dipegang oleh pemimpin Syiah di Thailand. Keturunan dari Sheikh Ahmad Qomi, yakni Somdej Chao Praya Arkara Maha Sena (Bunnag) (1738- 1805), merupakan tangan kanan dari Raja Taksin dan teman dari Rama I, yang menikah dengan salah satu istri dari Rama I. dengan demikian, pada masa lalu keluarga dari keturunan Syekh Qomi menjadi bagian dari bangsawan Kerajaan Siam. Dari masa awal posisi Chuilarajmontri sampai dengan runtuhnya monarki pada 1932, kedudukan ini selalu ditempati oleh kelompok Syiah. Salah satu keturunan Syekh Qomi

yang terkenal saat ini yaitu Jenderal Sonthi Bunyaratkalin yang memimpin kudeta tak berdarah pada 2006. Lainnya yaitu General Chavalit Yongchaiyut, mantan pimpinan angkatan darat dan mantan perdana menteri, masih aktif sebagai politisi yang masih keturunan Syiah lainnya yaitu Sultan Sulaiman (Putthongchai, 2013: 81-82).

Kelompok lainnya yaitu Muslim dari Champa. Raymond Scupin (1988b) menyatakan bahwa mereka telah berada di ibukota Kerajaan Siam, Ayutthaya, sejak abad ke-7 Masehi dan semakin banyak setelah runtuhnya Kerajaan Champa pada ke-15 Masehi. Kelompok Muslim lainnya berasal dari keturunan masyarakat Arab dan Indonesia. Farouk (Farouk, 1988: 5-12) sebagaimana dikutip Putthongchai (2013) membagi Muslim dari Indonesia ke dalam tiga kelompok utama, yaitu Jawa, Sumatra, dan Minangkabau. Mereka kebanyakan sebagai pedagang atau pengungsi pada masa penjajahan Belanda. Di Bangkok, misalnya, terdapat Masjid Yawa yang dikelola oleh Muslim dari Jawa dan Masjid Bayan dan Masjid Indonesia yang dikelola oleh orang-orang Sumatra. Sementara etnis Minangkabau tersebar di berbagai daerah perkotaan, termasuk Bangkok. Selain itu, beberapa sumber menyatakan bahwa pada 1666 terdapat Muslim dari Makassar yang mengungsi ke Thailand dan pernah terlibat dalam upaya melawan Raja Narai. Mereka telah berasimilasi dengan masyarakat Thailand dan hingga saat ini tidak ada satu kelompok Muslim pun yang mengaku keturunan dari Makassar (Gilquin, 2005: 22; Putthongchai, 2013: 82-83).

Adapun Muslim di bagian selatan merupakan populasi terbesar dan lebih dari tiga perempatnya beretnis Melayu. Pada awalnya, mereka hidup di bawah kedaulatan Kesultanan Patani sampai dengan kerajaan ini dianeksasi oleh Kerajaan Siam pada 1906. Berbeda dengan kerajaan Melayu lainnya yang tetap memiliki otonomi di bawah Malaysia, Kerajaan Patani harus tunduk pada Kerajaan Siam dan dalam beberapa hal, dipaksa untuk berasimilasi dengan kebudayaan Siam. Aneksasi ini pula yang menjadi permulaan dari proses Muslim di Thailand menjadi kelompok minoritas. Pasca Perang Dunia II, militer nasionalis Thailand mempromosikan identitas utama negara-bangsa Thailand dalam tiga ciri utama,

kebangsaan, monarki, dan agama (dalam hal ini Buddha). Nilai-nilai ini diajarkan melalui lembaga pendidikan termasuk dengan mempromosikan asimilasi kebudayaan Thailand kepada masyarakat di provinsi-provinsi selatan yang notabene beretnis dan berbahasa Melayu (Feigenblatt, 2010: 55).

E. Corak Muslim

Berdasarkan data statistik dari Departemen Keagamaan di bawah Kementerian Kebudayaan Thailand menyatakan bahwa 99% Muslim di Thailand menganut mazhab Sunni dan 1 persen sisanya adalah Syiah. Muslim yang berada di bagian utara terutama di Muslim keturunan Tionghoa di Chiang Mai kebanyakan menganut Mazhab Hanafi (Putthongchai, 2013: 75), sedangkan sebagian besar lainnya terutama di bagian selatan menganut mazhab Syafii sebagaimana yang berkembang di kawasan Melayu Nusantara lainnya. Adapun kelompok modernis-reformis yang berkembang di perkotaan seperti Bangkok salah satunya mendapatkan pengaruh dari salah satu ulama Indonesia yakni Ahmad Wahhab yang mengungsi ke Thailand pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1920-an. Kelompok ini karakteristiknya seperti yang digambarkan oleh Geertz sebagai *santri* sedangkan kelompok tradisionalis, yang memberikan toleransi kepada praktik lokal, dikategorikan sebagai *abangan*. Dalam konteks Thailand kelompok pertama disebut sebagai *khana mai* (generasi baru) sedangkan yang kedua disebut sebagai *khana kau* (generasi tua) (Scupin, 1980: 1225).

Kelompok modernis-reformis pada masa sekarang dapat dilihat dengan hadirnya berbagai gerakan keagamaan seperti aliran Salafi, Jamaah Tabligh, dan gerakan Tarbiyah (Dakwah). Di Yala, misalnya, terdapat salah satu tokoh terkemuka gerakan reformis yaitu Ismail Lutfi Japakiya, yang lahir di Mekah, menempuh studi di Madinah, dan saat ini sebagai rektor Yala Islamic University. Adapun gerakan tarekat yang berkembang di Thailand antara lain Ahmadiyah-Idrisiyah, Shattariyyah, Qadiriyah yang berkembang terutama di Thailand selatan (Scupin dan Joll, 2020: 119-121).

Lembaga perwakilan Islam tertinggi di Thailand yaitu Chularajmontri yang terbentuk pertama kali pada abad ke-17 M. sampai dengan sebelum runtuhnya pemerintahan monarki Absolut pada 1932, posisi Chularajmontri selalu diduduki oleh Muslim Syiah. Namun demikian, meskipun secara simbolis posisi ini merepresentasikan perwakilan Muslim di seluruh Thailand, secara fungsional jabatan ini tidak memiliki kekuatan politik memperjuangkan umat Islam di seluruh negara tersebut. Posisi ini juga ditunjuk langsung oleh pihak kerajaan yang bertugas untuk konsultan kepada raja terkait kebijakan terhadap Islam. Dengan begitu, jabatan ini lebih memperlihatkan model kepemimpinan monarki Thailand atau struktur otoritas tradisional yang menjadi salah satu ciri utama *nation-state* negara tersebut. Pasca 1932, posisi Chularajmontri dipegang oleh Cham Promyong, seorang Muslim Sunni yang menjadi anggota Partai Rakyat (*People Party*) dan pejabat tinggi pemerintahan di departemen Hubungan Publik (*Public Relation*). Dia berasal dari kota Samudprakan, sebuah provinsi di sebelah timur Bangkok dan pernah mengenyam pendidikan di Mesir. Pada 1947, posisinya digantikan oleh Tuan Suwansat, seorang pendakwah dan menjabat sampai dengan 1981 (Feigenblatt, 2010: 20).

Berdasarkan Undang-undang Perlindungan Islam tahun 1945 (direvisi pada 1948) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk Dewan Nasional Umat Islam Thailand (NCIA) yang dipimpin oleh Chularajmontri. Kemudian, di tingkat provinsi dibentuk Dewan Umat Islam Daerah (*Provincial Council for Islamic Affair*). Adapun tugas utama lembaga ini yaitu mengurusi masalah masjid baik dalam hal kelayakan dan imamnya dan bertindak sebagai penasihat tentang masalah umat Islam kepada pemerintah di tingkat provinsi. Berdasarkan UU 1997, Chularajmontri sebagai pemimpin tertinggi Muslim di Thailand dipilih berdasarkan kesepakatan Dewan Umat Islam Daerah. Orang-orang yang duduk di tingkat provinsi tersebut dipilih oleh Dewan Masjid di tiap-tiap daerah dan mereka juga bertanggung jawab atas masjid di wilayah masing-masing.

Saat ini setidaknya terdapat sekitar 3.900 masjid di seluruh Thailand dan 180 di antaranya berada di Bangkok. Sekitar 600

madrasah/sekolah Islam mengajarkan materi pelajaran umum dan agama. Pada 2007, di wilayah selatan sendiri setidaknya terdapat 391 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 24.398 yang tersebar di Yala, Pattani, Narathiwat, Satun and Songkhla. Pada 2010, berdasarkan penelitian dari *Southern Health System Research Institute* menyatakan bahwa jumlah pesantren tersebut mencapai 406 lembaga pesantren. Since 2005 pihak pemerintah pusat mulai mendata dan mendaftarkan pesantren dalam administrasi mereka. Chinnaworn Boonyakiat, Menteri Pendidikan pada 2010, mengajukan proposal untuk mendirikan 200 lembaga pendidikan Islam dengan kurikulum yang intensif sebagai upaya untuk meningkatkan keamanan dalam negeri (Putthongchai, 2013: 156).

Tokoh terkemuka Muslim dalam sejarah Thailand yaitu Haji Sulong bin Abdul Kadir selaku pimpinan Dewan Umat Islam di Patani. Pada April 1947, dia mengajukan tuntutan kepada pemerintah pusat di Bangkok yang dikenal dengan istilah tujuh butir tuntutan. Beberapa di antaranya yaitu meminta kepada pemerintah pusat di Bangkok untuk memberikan otonomi khusus kepada Patani di mana para pejabat di empat provinsi yakni Patani, Yala, Narathiwat, dan Satun adalah warga Melayu. Tuntutan lainnya yaitu agar bahasa Thai dan bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa resmi di wilayah selatan; pemasukan daerah dari empat provinsi dikelola oleh provinsi setempat; dan menuntut diakuinya hukum Islam di mana syariah telah dilaksanakan sepanjang sejarah wilayah tersebut. Petisi tersebut tidak menuntut adanya kemerdekaan, melainkan otonomi daerah dalam rangka menjaga identitas budaya yang melekat dalam diri mereka. Tuntutan tersebut tidak dikabulkan. Sebaliknya, pihak Bangkok mengirim militer untuk menstabilkan kondisi Patani dan tuntutan tersebut dianggap sebagai gerakan radikal dan separatisme. Haji Sulong dan para pengikutnya dituduh sebagai kelompok separatis dan ditangkap pada Januari 1948. Mereka dijatuhi hukuman selama empat tahun penjara. Dua tahun setelah kebebasannya pada 1952, Haji Sulong diculik dan dibunuh secara misterius (Aphornsuvan, 2012, 20-23).

Pada 1948, setelah penangkapan Haji Sulong, menyulut terjadinya sejumlah bentrokan antara masyarakat Islam Melayu dan pihak polisi Thailand. Beberapa bentrokan itu terjadi di sejumlah wilayah di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Ratusan orang tewas dan banyak lainnya yang mengungsi ke Malaysia. Salah satu tragedi yang paling terkenal terjadi di wilayah Duson Nyor, distrik Rangae, Narathiwat, pada April 1948 yang dipimpin oleh Haji Abdul Rahman. Mereka bertempur secara terbuka dengan pihak polisi di mana menewaskan ratusan orang (Aphornsuvan, 2012, 20-23).

Sampai dengan menjelang dekade 1970-an, sejumlah organisasi bermunculan yang oleh pihak otoritas Thailand dikategorikan sebagai gerakan pembelot, anti-pemerintah, dan separatis berdiri dan beroperasi di empat provinsi di bagian selatan Thailand. Salah satu yang terkemuka yaitu Barisan Nasional Pembebasan Pattani (BNPP) yang muncul pertama kali pada 1940-an dan berpusat di Kelantan; Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada 1974; Pertubuhan Perpaduan Pembebasan Pattani (PPPP) atau *Patani United Liberation Organization* (PULO) pada 1968 and dianggap sebagai gerakan separatis paling berpengaruh di bagian selatan. Menjelang 1980an, seiring munculnya jaringan gerakan fundamentalisme Islam dan Revolusi Iran 1979, di kawasan Patani bermunculan juga gerakan serupa di kalangan organisasi separatis seperti Sabilillah dan Gerakan Islam Pattani (GIP). Kelompok lainnya yaitu *Black December* (1902). Nama dari organisasi ini diambil dari peristiwa bersejarah disatukannya Kesultanan Pattani ke kerajaan Siam pada Desember 1902. Kelompok ini aktif di Yala dan mengaku bertanggung jawab atas tragedi pengeboman pada 22 September 1978 (Aphornsuvan, 2012: 27).

F. Diskriminasi, Islamofobia dan Radikalisme

Konflik antara pemerintah pusat Thailand dan Muslim Melayu di daerah selatan masih terus berlanjut dengan memakan biaya sosial yang mahal. Antara tahun 2004 sampai dengan 2016 dilaporkan bahwa lebih dari 6.670 nyawa melayang dan 12. 231 jiwa mengalami

luka akibat konflik berkepanjangan ini.[2] Konflik yang paling ekstrem terjadi pada 2004 di Pattani, Yala, dan Narathiwat, yakni serangan kamp militer di Narathiwat pada 4 Januari, serangan di Masjid Se Krue pada tanggal 27 April dan Tragedi Tak Bai pada 25 Oktober. Tragedi bentrokan antara kelompok separatis dan polisi kembali terjadi pada September 2019 di provinsi Yala. Menurut beberapa sumber, konflik yang menewaskan setidaknya 15 orang terdiri dari polisi dan sukarelawan pertahanan desa ini menjadi yang terbesar setelah tragedi pada 2004. Sehingga, berdasarkan laporan terbaru, setidaknya jumlah korban yang tewas akibat konflik berkepanjangan ini mencapai angka 7.000 korban. Otoritas setempat menyatakan bahwa pelaku di balik penyerangan pos polisi ini dilakukan oleh kelompok BRN (*BBC News*, 8/11/2019).

Berdasarkan laporan dari NGO Deep South Watch, selama Januari-Agustus 2018 konflik di Thailand selatan telah menewaskan setidaknya 146 orang –128 Muslim dan 18 Buddhis— dan menyebabkan 91 Muslim dan 105 Buddhis luka-luka. Sepanjang 2017, Deep South Watch melaporkan 187 Muslim, 64 Buddhis dan 12 orang yang tidak teridentifikasi identitasnya tewas. Sejak tragedi 2004, pihak otoritas Thailand memberikan kewenangan kepada militer, polisi, dan kelompok sipil Buddhis untuk membatasi hak-hak dasar, termasuk penangkapan dan penggeledahan kepada masyarakat Muslim tanpa adanya surat perintah. Otoritas Thailand menugaskan kepada pihak militer kewenangan tertentu yang sering kali menghasilkan perlakukan yang tidak mencerminkan keadilan (*Thailand International Religious Freedom Report 2018*).

Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa ancaman yang dihadapi oleh Muslim di wilayah selatan tidak hanya datang dari pemangku kebijakan, tetapi juga dari kelompok sipil Buddhis yang membentuk sukarelawan penjaga desa yang mendapatkan dukungan dari pihak kerajaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa Muslim di wilayah selatan, dengan mempertimbangkan sejarah penyatuan dan program asimilasi dari pemerintah, menjadi warga negara kelas

[2] Lihat misalnya *Thailand International Religious Freedom Report 2018*; lihat juga https://minorityrights.org/minorities/malays-2/

dua di Thailand. Tidak mengherankan bila Pew mencatat bahwa tingkat *government restrictions index* (GHI) dan *social hostility index* (SHI) masuk dalam kategori tinggi dan cenderung naik dari sensus sebelumnya tahun 2007 (Pew, 2019: 61, 64, 69).

Sementara itu, gerakan-gerakan separatis yang ada di Thailand memanfaatkan perbedaan etnis, agama, bahasa, dan budaya sebagai cara untuk memobilisasi massa dan mencari dukungan dari pihak luar dalam rangka mencapai tujuan politik dan kepentingan mereka lainnya. Namun, tampaknya, upaya mereka tidak memberikan pengaruh yang signifikan setelah mereka menempuh cara-cara kekerasan dan mengancam keamanan dan keselamatan publik. Selain itu, di tubuh gerakan-gerakan separatis tersebut terjadi konflik internal yang semakin melemahkan kekuatan mereka. Sebagai contoh, kelompok Barisan Revolusi Nasional (BRN) kini terpecah menjadi tiga kelompok yaitu BRN Coordinate, BRN Congress, dan BRN Ulama. Gerakan lainnya termasuk Pattani United Liberation Organisation (PULO), terpecah menjadi dua yaitu PULO baru dan PULO lama, serta Mujahideen Islamic Pattani Group (BBMP), yang merupakan pecahan dari Barisan Islam Pembebasan Pattani (BIPP). Beberapa kelompok telah menyerahkan diri kepada pihak penguasa dan kembali bersatu bersama masyarakat sedangkan beberapa kelompok lainnya masih terus beroperasi meskipun dengan anggota yang terbatas.

Dialog untuk mencapai perdamaian antara pemerintah Thailand dan kelompok-kelompok separatis telah dilakukan berkali-kali dan belum menemukan jalan keluarnya. Setidaknya hal tersebut terjadi dari tahun 1991 sampai 2020 di berbagai tempat seperti Swiss, Mesir, Damaskus, Malaysia, dan Indonesia. dialog terakhir berlangsung pada Januari dan Maret 2020 yang terhenti seiring merebaknya Covid-19. Selain itu, faktor terhentinya dialog ini dikarenakan aksi demonstrasi di kedua negara yang menuntut dilakukannya reformasi untuk menjadi pemerintahan yang lebih demokratis.

Secara umum, tuntutan Muslim Melayu untuk otonomi yang lebih besar dan hak berbahasa sebagian besar masih diabaikan. Sebagian besar pekerjaan pemerintah – termasuk posisi mengajar

di sekolah negeri – terus diduduki oleh etnis Thailand, meskipun Muslim Melayu mewakili sebagian besar penduduk di provinsi selatan. Banyak orang Melayu memilih untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah Islam swasta atau sekolah di luar Thailand daripada ke sekolah negeri, yang terus menggunakan bahasa Thailand sebagai satu-satunya bahasa pengantar. Ini terlepas dari permintaan untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pendidikan sejak tahun 1940-an. Baru setelah tahun 2005 ada rekomendasi dari Komisi Rekonsiliasi Nasional (dibentuk untuk menangani beberapa keluhan Muslim Melayu) agar bahasa Melayu diajarkan di sekolah negeri dipertimbangkan secara serius. Sayangnya inisiatif seperti itu hanya membuat sedikit kemajuan. Pada tahun 2016, Jenderal Prayut mengumumkan bahwa NCPO bertujuan untuk memaksakan pendidikan bahasa Thailand di pedalaman selatan, sebuah pengabaian terang-terangan terhadap salah satu benih utama konflik di selatan. (https://minorityrights.org/minorities/malays-2/).

G. Tantangan dan Harapan Muslim ke Depan

Problem utama yang dihadapi Muslim di Thailand, terutama di wilayah bekas Kesultanan Patani adalah hubungan antara Muslim dan Buddha. Di satu sisi diperlukan kebijakan di level pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secara berimbang. Dengan warna negara mayoritas Buddha, diperlukan kebijakan yang seimbang dan berpihak kepada minoritas. Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha, pihak penguasa sering kali juga mendapatkan tekanan dari sebagian petinggi umat Buddha dalam hal menyikapi umat Islam. Kelompok Buddha ekstremis menjadi salah satu penghambat dalam mewujudkan negara dengan prinsip multikulturalisme di Thailand. Mereka tidak jarang menggunakan isu islamisasi dan ekstremisme dimana mereka menganggap bahwa perkembangan umat Islam akan menjadi ancaman terhadap Buddha sebagai agama mayoritas (Putthongchai, 2013: 75).

Di sisi lain, sikap Muslim juga sangat berpengaruh khususnya untuk berintegrasi ke budaya Thailand secara penuh. Perlu diakui bahwa terdapat sebagian Muslim yang enggan berintegrasi ke budaya

Thailand seperti tidak mau belajar Bahasa Thai. Sebagian Muslim lain juga ada yang berkeinginan untuk memisahkan diri dari wilayah Thailand. Hal ini tentunya sangat mengganggu hubungan antara Muslim dan Buddha.

Dengan melihat sejarah panjang konflik di wilayah Thailand selatan, perdamaian tampaknya hanya akan terlaksana jika pihak otoritas Thailand memiliki kehendak kuat untuk menghormati kekhasan identitas Muslim Melayu, memberikan kelonggaran dalam mengekspresikan keyakinan mereka dengan memberikan status otonomi khusus, dan menghentikan berbagai upaya untuk memaksakan asimilasi budaya kepada mereka. Hal ini terbukti seperti ketika pemerintah pusat pada 1980-1999 membentuk *Southern Borders Provinces Administrative Center* (SBPAC) dan *Civil-Police-Military Patrol* (CPM-43) di mana banyak elite lokal yang dilibatkan di dalam kedua lembaga tersebut. Sayangnya, kedua lembaga ini dihapus oleh pemerintah Thailand yang menganggap bahwa konflik di Thailand Selatan bukanlah masalah politis namun masalah kriminalitas dan keamanan (Croissant 2007: 9). Hal ini menjadi salah satu alasan di balik kembali meletusnya konflik berdarah pada 2004 dan deklarasi status Darurat Operasi Militer tahun 2005 di Thailand Selatan (Council on Foreign Relations, 2008).

Beberapa peneliti menyayangkan bahwa dari serangkaian dialog antara otoritas Thailand dan perwakilan organisasi Muslim, terutama BRN sebagai representasi kelompok separatis, pihak Thailand lebih sering mendelegasikan perwakilan dari militer, ketimbang kelompok sipil. Lembaga NGO internasional seperti ICG (*International Crisis Group*) juga menekankan bahwa, selain mencari solusi penyelesaian konflik, permasalahan lain yang penting untuk diperhatikan adalah tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan, pelanggaran HAM masa lalu, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Muslim di wilayah selatan.

Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir, Thailand menjadi salah satu negara yang mendapatkan kunjungan wisatawan Muslim terbanyak di Asia Tenggara. Melalui *The Central Islamic*

Council of Thailand (CICOT), Thailand mulai membuat regulasi Halal sejak tahun 2009. Meskipun tampaknya hal ini lebih banyak untuk kepentingan bisnis dan pariwisata, tetapi hal ini tentu saja menjadi kabar gembira bagi umat Islam di Thailand.

Dengan mengakomodasi Muslim Melayu, sebenarnya upaya ini sekaligus menjadi bukti bahwa Thailand menjadi salah satu contoh bagaimana negara mayoritas Buddha mampu memberikan jaminan beragama kepada penduduknya. Perbedaan etnis dan agama tidak menjadi penghalang, melainkan menjadi simbol multikulturalisme di negara tersebut. Jika hal ini bisa dilakukan, tentu saja, hal tersebut juga akan berdampak pada perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Suku Rohingya, misalnya, juga dapat diselesaikan sebagaimana Thailand menyelesaikan problem utama mereka terhadap umat Islam di bagian selatan.

H. Kesimpulan

Umat Islam merupakan populasi terbesar kedua di Thailand setelah etnis Thai. Umat Islam di wilayah tengah dan utara telah berhasil berasimilasi kepada kebudayaan Thai. Sementara umat Islam di wilayah bekas Kesultanan Patani memiliki identitas Melayu yang telah mengakar kuat dalam sejarah mereka. Penguasaan dan aneksasi atas wilayah ini menjadi sebab utama berubahnya Muslim Melayu yang awalnya mayoritas menjadi minoritas di Thailand.

Problem utama yang dihadapi Muslim di Thailand yaitu konflik berkepanjangan antara kelompok-kelompok umat Islam di wilayah bagian selatan yang berhadapan secara langsung dengan pihak penguasa dan kelompok-kelompok semi-militer yang mendapatkan dukungan dari pihak kerajaan. Secara umum, Muslim Melayu di Thailand menuntut diberikan kelonggaran dalam mempraktikkan tradisi keagamaan mereka, kesempatan yang lebih besar dalam berbagai bidang kehidupan terutama politik, dan dihentikannya perlakuan diskriminatif yang mereka alami selama bertahun-tahun akibat identitas agama dan budaya mereka.

Namun di sisi lain, integrasi atau penerimaan Muslim khususnya di wilayah Patani juga cukup problematik. Umat Islam kurang menerima sepenuhnya identitas dan budaya Thailand. Aspek ini juga yang menyebabkan hubungan negara dan Muslim menjadi lebih sulit untuk bersatu. Diperlukan keinginan yang kuat dari kedua belah pihak untuk segera menyelesaikan perseteruan dan lebih fokus pada keamanan dan kesejahteraan.

2

ISLAM DAN DEMOKRATISASI DI MYANMAR*)

Myanmar[1] (alias Burma) dikenal tidak hanya karena perjuangan demokrasi Aung San Suu Kyi, tetapi juga karena penderitaan Muslim Rohingya. Kesengsaraan Muslim Rohingya telah meningkat dengan pengusiran mereka dari tanah air sendiri di wilayah timur laut negara itu, dekat perbatasan dengan Bangladesh. Kesengsaraan mereka telah menjadi masalah kemanusiaan di tingkat internasional. Bagi orang luar cukup mengejutkan bahwa umat Buddha yang umumnya dikenal tidak memiliki ideologi politik yang kuat bisa berubah menjadi radikal. Meskipun Myanmar sedang mengalami perubahan politik yang signifikan menuju pemerintahan yang demokratis, nasib Muslim Rohingya belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Kekerasan terhadap Muslim Rohingya semakin parah telah menjadi gerakan anti-Islam yang diperkuat oleh pemerintah. *Pew Research Center* menilai Myanmar memiliki indeks permusuhan sosial (*social hostility index*, SHI) dan indeks permusuhan pemerintah (*government restriction index*, GHI) yang tinggi (Pew, 2015: 51, 54).

*) Bab ini pada awalnya adalah artikel berbahasa Inggris yang pernah terbit di *Studia Islamika: Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol. 28 No.1, 2021. Bab ini diterbitkan dengan ijin redaktur jurnal Studia Islamika, diterjemahkan, dan direvisi seperlunya.

A. Pendahuluan

Sebagai negara multi-etnis, Myanmar telah lama rentan terhadap konflik sosial, terutama masalah agama. Konflik Buddha-Muslim memiliki sejarah panjang di Myanmar, sejak kedatangan Muslim dari Teluk Bengal ke wilayah Arakan pada abad ke-14. Selama 49 tahun pemerintahan junta militer (1962-2011), Muslim Myanmar, terutama yang beretnis India, sangat dibatasi kebebasan beragamanya baik dari masyarakat maupun pemerintah. Anehnya, diskriminasi terparah, yang berujung pada persekusi terhadap Muslim Rohingya terjadi pada 2012, hanya setahun setelah pembubaran pemerintahan militer. Kerusuhan yang dipimpin biksu juga meningkat pada awal 2013 di beberapa bagian negara bagian Rakhine. Polisi – yang sebagian besar beragama Buddha Rakhine – dilaporkan tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghentikan serangan dan bahkan dituduh terlibat dalam kekerasan (*International Crisis Group*, 2013: ii). Organisasi hak asasi manusia akhirnya menggambarkan Rohingya sebagai "orang yang paling tertindas di dunia" (Kelly, 2016). Isu yang paling mendasar adalah bahwa pemerintah sekarang menganggap Muslim Rohingya sebagai orang tanpa kewarganegaraan, karena mereka tidak dapat memberikan dokumentasi untuk membuktikan bahwa mereka telah tinggal di Negara Bagian Arakan selama lebih dari 60 tahun.

Melalui pertikaian yang alot dan panjang tentang etnisitas dan status kewarganegaraan Muslim Rohingya, identitas mereka dipermainkan oleh pemerintah. Sementara sebagian besar kelompok etnis awalnya berjuang untuk kemerdekaan, hari ini hampir semua dari mereka diterima sebagai bagian dari Persatuan Myanmar, dan telah mencari kesetaraan dalam negara federal yang baru. Pemerintah, bagaimanapun, masih mencurigai mereka berencana untuk memisahkan diri dari negara, dan melihat ini sebagai alasan untuk menindas dan menegakkan kebijakan keras terhadap minoritas Muslim (*International Crisis Group,* 2003: i). Kebijakan "Burmanisasi" atau propaganda Burma untuk Burma, sampai batas tertentu, telah menghilangkan eksistensi Muslim keturunan India yang dicap sebagai etnis Rohingya. Seiring dengan semua tantangan sosial politik

di atas, Myanmar sedang mengalami proses demokratisasi. Upaya panjang mewujudkan Myanmar yang demokratis telah membuat Muslim Rohingya menjadi korban politik. Artikel ini menjawab pertanyaan mengenai latar belakang sejarah umat Islam di Myanmar, akar konflik Buddha-Muslim, kebijakan pemerintah terhadap umat Islam dan masa depan demokratisasi negara. Namun, batasan artikel ini ditulis selama tahun 2020 dan, oleh karena itu, tidak mencakup kudeta para pemimpin terpilih yang demokratis oleh Tatmadaw—militer Myanmar pada 1 Februari 2021.

B. Sejarah Masuknya Islam

Tidak ada data pasti tentang jumlah Muslim di Myanmar saat ini. Pew memperkirakan bahwa Muslim berjumlah sekitar 1.900.000, atau 3,8% dari populasi (*Pew Research Center*, 2011: 158), sedangkan sensus 2014 mencatat 4,3%, tidak termasuk Muslim di beberapa bagian negara bagian Rakhine (Kementerian Imigrasi dan Kependudukan 2014, 4). Studi independen lainnya menunjukkan jumlahnya bisa mencapai 13- 15% (sekitar 7.000.000) dari populasi 51,4 juta (pada 2014) (Departemen Luar Negeri AS 2006; Veen 2005). Dari segi etnis, mayoritas Muslim di Myanmar adalah Muslim India, yang telah tinggal di Myanmar sejak negara itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Yang lainnya adalah Bengali dan Burma yang telah masuk Islam. Seperti yang terjadi di negara-negara Asia Tenggara lain seperti Indonesia dan Malaysia, perpindahan penduduk lokal ke Islam lebih sering terjadi karena pilihan daripada melalui paksaan (Jilani, 1999: 63). Jenis Islamisasi ini telah membentuk varian Islam yang cukup berbeda dibandingkan dengan kebanyakan negara Arab. Sebagian besar etnis minoritas Myanmar mendiami daerah di sepanjang perbatasan pegunungan negara itu, terutama di utara (Veen, 2005: 6).

Secara historis, orang Arab adalah Muslim pertama yang mencapai pantai wilayah Arakan (pada saat di bawah kerajaan Arakan) pada abad ke-9, diikuti oleh Persia, Moghul, Turki dan Bengali pada abad-abad berikutnya, dan India pada abad ke-14 dan ke-15. Pelancong Eropa Anthanasius Nitikin dan Ralph Fitch tiba

di Burma pada abad ke-15 dan ke-16, mencatat ada pelabuhan dan kota yang indah dan keberadaan beberapa komunitas Muslim (Yegar, 1972: 4). Catatan lain mengkonfirmasi keberadaan Kesultanan Islam yang menguasai wilayah Arakan dari abad ke-15, runtuh setelah serangan dari pasukan Buddha pada tahun 1784 (Kettani, 1986: 204). Perlu juga dicatat bahwa Kaisar Mughal terakhir, Bahadur Shah II, dan keluarga serta pengikutnya diasingkan ke Yangon, Myanmar. Dia meninggal dalam tahanan dan dimakamkan di sana pada tahun 1862 (Yegar, 1972: 93).

Pada awal abad ke-16 hingga awal abad ke-19, banyak Muslim menjadi dari bagian dari kerajaan-kerajaan di wilayah Burma, biasanya sebagai tentara. Sebelum datangnya kerajaan Inggris, wilayah Burma berada di bawah pemerintahan beberapa raja Dinasti Toungoo, yang aktif memperluas wilayah kerajaan hingga ke wilayah Arakan dan India. Ketika terjadi perang, banyak raja, seperti Sa Nay Min Gyi (1674-1714) dan Alaungpaya (1714-1760), membawa kembali ribuan tawanan perang, banyak di antaranya adalah Muslim. Sejak itu, banyak tahanan Muslim menetap di banyak bagian negara dan terutama di Rangoon (sekarang Yangon), dan berasimilasi untuk membentuk komunitas Muslim Burma yang melayani raja-raja Buddhis sebagai tentara paling terpercaya mereka. Raja Burma Pagan Min (1846–1853) bahkan mempekerjakan Muslim di lingkaran dalamnya, sebagai gubernur ibu kota Amarapura, pengawal kerajaan, tentara, kurir, penerjemah dan penasihat Persia (Yegar, 1972: 10-11).

Masuknya umat Islam di Burma tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan Burma Inggris, yang merupakan salah satu provinsi British India dan jajahan Britania Raya dari tahun 1824 hingga 1948. Setelah runtuhnya Kesultanan Islam Arakan, jumlah umat Islam menurun secara signifikan dan menjadi komunitas minoritas. Untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Burma Inggris mengundang lebih banyak Muslim India untuk menetap di wilayah Arakan. Setelah mereka memantapkan diri secara ekonomi, para pendatang Muslim meningkatkan aktivitas keagamaan mereka dengan mendirikan masjid dan lembaga keagamaan. Setelah pembangunan, situasi sosial

ekonomi yang lebih baik menarik banyak penduduk setempat untuk masuk Islam, dan banyak Muslim juga menikah dengan penduduk setempat. Dalam jangka panjang, situasi ini telah menimbulkan ketegangan antara Muslim dan Buddhis (Yegar, 1972: 33–38).

Gelombang imigran Muslim dari seberang Teluk Bengal (pada saat itu merupakan bagian dari India, tetapi sekarang menjadi bagian dari Bangladesh) terus berlanjut, dan mereka sebagian besar menetap di Burma Inggris pada awal dan pertengahan abad ke-20, setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948. Sejarawan Rakhine Jacques P. Leider berpendapat bahwa berdasarkan bahasa Bengali mereka, masalah Rohingya bukanlah etnisitas melainkan konstruksi politik (Chia 2016). Berdasarkan penelitiannya, istilah Rohingya jarang digunakan dalam konteks sejarah Burma kecuali untuk menyebut penyerahan terakhir Mujahidin pada tahun 1961. Sejak saat itu, istilah tersebut cukup umum dalam konteks politik tetapi belum mendapatkan pengakuan nasional secara luas. Rohingya menjadi nama umum bagi Muslim Rakhine setelah kekerasan tahun 2012 (Leider 2017). Namun, lebih tepat untuk mengidentifikasi Rohingya sebagai Muslim asal etnis Bengali, yang telah hidup dengan kelompok Burma Buddhis yang beragam lainnya di wilayah Rakhine untuk waktu yang cukup lama. Ketegangan dan konflik sosial saat ini mencerminkan bahwa latar belakang etnis dan sosial yang berbeda tidak berhasil hidup berdampingan di bawah satu identitas melainkan telah terpolarisasi secara sosial. Berdasarkan perkiraan dari sensus 2014, jumlah Muslim Rohingya saat ini sekitar 1,3 juta (BBC News, 2015). Semua komunitas di Negara Bagian Rakhine menderita layanan sosial yang buruk dan kelangkaan peluang mata pencaharian, dan tingkat kemiskinan hampir dua kali lipat rata-rata nasional.

Saat ini, terdapat populasi Muslim yang cukup besar di Negara Bagian Rakhine selain Rohingya. Diantaranya adalah komunitas Muslim India di Rangoon, Muslim Tionghoa yang dikenal sebagai Panthay, Muslim Melayu di Kawthaung, anak-anak dari pernikahan antar etnis antara Muslim asing dan wanita Burma yang dikenal sebagai Muslim Zerbadi, dan Kamein, etnis yang diakui pemerintah. minoritas asli Negara Bagian Rakhine (Hooker 1983, 168). Asal

muasal Islam yang beragam telah memunculkan beragam aliran dan sekte Islam di wilayah tersebut, seperti mayoritas Sunni dan minoritas Syiah, Ahmadi dan Ismailiyah (Harji, 2014).

Aspek sosial yang paling menarik dan menantang adalah keragaman suku dan agama di negara tersebut. Menurut World Fact Book (2017), kelompok terbesar di antara 135 etnis yang diakui di Myanmar adalah Bamar/Burma (68%), Shan (9%), Karen (7%), Rakhine (4%), Cina (3%), Sen (2%), India (2%), dan lainnya (5%). Dari segi agama, selain mayoritas Buddha Theravada (87,9%), ada cukup banyak agama minoritas, seperti Kristen (6,2%), Islam (4,3%), Hindu (0,5%) dan animisme (0,8%) (Kementerian Imigrasi dan Kependudukan 2014). Jumlah orang Kristen terdiri dari Katolik dan banyak denominasi Protestan, paling terkenal Baptis. Ada juga komunitas kecil Yahudi yang memiliki sinagog di Yangon tetapi tidak ada Rabbi yang melayani (Katz dan Goldberg 1988). Meskipun masing-masing kelompok minoritas di tingkat negara bagian mengalami diskriminasi sampai tingkat tertentu, sebagian besar yang tinggal di bagian tengah negara menikmati kebebasan beragama dalam tingkat yang wajar (International Crisis Group 2013: 21).

C. Diskriminasi dan Penyebaran Islamofobia terhadap Muslim Rohingya

Meskipun informasi yang berkembang tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap Muslim baru menyebar secara internasional dalam dua belas tahun terakhir, hal tersebut memiliki sejarah panjang sejak sebelum pembentukan Myanmar modern. Sejarah mencatat bahwa meskipun umat Islam telah memainkan berbagai peran untuk raja-raja Burma, ketegangan dan diskriminasi tidak dapat dihindari. Raja Bayinnaung (1550-1581) misalnya, telah memberlakukan pembatasan terhadap umat Islam, termasuk melarang penyembelihan ritual Islam (ʻĪd al-aḍḥá) dan melarang umat Islam mengkonsumsi daging halal (Yegar, 1981: 10). Ketegangan sosial juga muncul pada abad ke-17 antara Muslim, pengikut Pangeran Mughal Shah Shuja (1616-1661), dan bajak laut Arakan yang kuat Sandathudama (1652-1687), yang berakhir dengan pembunuhan semua pengikut Shuja (Yegar, 1981: 33-34). Ketegangan dan konflik berlanjut di

bawah Raja Alaungpaya (1752-1760), yang melarang umat Islam mempraktikkan penyembelihan ternak selama ʻĪd al-aḍḥá, dan Raja Bodawpaya (1782-1819), yang menangkap dan membunuh empat imam terkemuka Burma setelah mereka menolak makan daging babi (Yegar, 1981: 10).

Di bawah pendudukan kerajaan Inggris, tekanan ekonomi dan *xenophobia* memunculkan ketegangan rasial dan kerusuhan terhadap Muslim India meningkat. Karena mayoritas Muslim di Burma pada awal abad ke-20 adalah keturunan India, Muslim Burma, yang saat itu berjumlah sekitar 500.000, secara kolektif disebut sebagai India (Yegar, 1981: 29). Karena penganiayaan terhadap umat Buddha di India oleh kerajaan Mughal pada awal abad ke-20, dan juga persaingan ekonomi antara Muslim migran India dan umat Buddha asli Burma, sentimen anti-India diperburuk, memicu kerusuhan anti-India pada Mei 1930 yang menewaskan sekitar 200 pekerja India dan melukai lebih dari 2.000 orang. Kerusuhan menyebar dengan cepat ke seluruh Burma, menargetkan orang India dan Muslim (Sciences Po, 2009). Pada tahun 1939, kerusuhan anti-Muslim pecah di beberapa kota di tengah kampanye kebencian "Burma untuk Burma," yang mengakibatkan pembunuhan 204 Muslim, 1.000 lainnya terluka dan 113 masjid rusak (Ahmed 2012; Yegar 1981: 38).

Setelah Burma memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948, perjuangan Muslim untuk kebebasan yang lebih besar memiliki keberhasilan yang terbatas. Umat Islam mendirikan partai politik Islam yang disebut Burma Muslim Congress (BMC) hampir bersamaan dengan berdirinya Liga Kebebasan Rakyat Anti-Fasis (AFPFL) pada tahun 1945. Kolaborasi antara nasionalis Buddha dan Muslim pada masa pra-kemerdekaan menghasilkan dalam pembunuhan enam anggota kabinet pada Juli 1947, termasuk Aung San, pemimpin dan pendiri Burma, dan Abdul Razak, seorang politikus nasionalis Muslim (Yegar, 1981: 76). Setelah kemerdekaan Burma pada tahun 1948, U Nu (pemimpin AFPFL) menjadi Perdana Menteri pertama pada tahun 1956. U Nu membubarkan BMC dan menggabungkan anggota dewannya ke dalam AFPFL dan

menyatakan Buddhisme sebagai agama negara Burma, mengabaikan keberadaan minoritas agama.

D. Penyebaran Islamofobia terhadap Muslim Rohingya

Sejarah panjang kehidupan di bawah rezim militer otoriter dan jalan demokratisasi yang curam telah mengakibatkan penyebaran kebencian dan Islamofobia di negara mayoritas Buddha ini. Pemerintah otoriter yang membawa banyak penderitaan politik dan ekonomi telah mengalihkan perhatian masyarakat dengan menyalahkan umat Islam, menjadikan Rohingya sebagai kambing hitam mereka. Kebebasan beragama pada awalnya diberikan oleh konstitusi tetapi telah diabaikan oleh junta militer sejak saat itu (Departemen Luar Negeri AS, 2006). Alih-alih mengizinkan sebagian besar penganut agama yang terdaftar untuk beribadah sesuai keinginan mereka, pihak berwenang memberlakukan pembatasan kegiatan keagamaan tertentu dari kelompok minoritas, dan sering kali menyalahgunakan hak kebebasan beragama. Muslim Rohingya adalah salah satu kelompok yang menghadapi pembatasan dan pelecehan.

Meskipun hampir setiap kota atau kota kecil di Myanmar memiliki komunitas Muslim, Negara Bagian Arakan (Rakhine) di barat laut memiliki konsentrasi Muslim tertinggi. Sebagian besar penduduk telah tinggal di sana selama ratusan tahun, sementara beberapa lainnya tiba dari British India setelah Inggris mencaplok wilayah tersebut pada tahun 1824. Namun, sebagian besar Muslim saat ini lahir di Myanmar dan memiliki nenek moyang dari berbagai etnis. akibat perkawinan antar generasi. Seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya tentang intoleransi beragama dan kerusuhan yang terjadi di hampir setiap kota di tanah air, ketegangan rasial dan agama terhadap non-Buddha menjadi lebih buruk bagi Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Sebagai etnis dan agama minoritas, Rohingya telah lama mengalami diskriminasi yang belakangan berubah menjadi Islamofobia.

Akar masalahnya mungkin terletak pada status kewarganegaraan Rohingya, yang tidak dianggap sebagai warga negara di bawah undang-undang kewarganegaraan Myanmar yang ketat. Karena tidak dapat memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP), mereka kesulitan mengakses pendidikan, melakukan hubungan sosial, mendapatkan pekerjaan di perusahaan swasta, menjalankan bisnis, memiliki tanah bahkan bepergian. Meskipun ada sebagian Muslim yang bisa mendapatkan KTP memiliki pekerjaan baik sebagai PNS maupun di militer, mereka tidak dapat bekerja sebagai pedagang atau buruh harian. Jika digabungkan, faktor-faktor ini menciptakan situasi sosial dan ekonomi yang parah bagi Rohingya, yang secara sosial dan struktural miskin.

Sayangnya, kebijakan pemerintah otoriter terhadap Rohingya merangsang sentimen dan stigma anti-Muslim di antara komunitas etnis Myanmar lainnya, yang sekarang melihat mereka sebagai orang asing, imigran ilegal, pencuri pekerjaan, miskin dan tidak berpendidikan. *State Peace and Development Council* (SPDC) dan pemerintahan pendahulunya (*State Law and Order Restoration Council*, SLORC) sering menggunakan isu-isu agama untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari komunitas Buddhis Myanmar dengan harapan mereka akan melupakan kemarahan mereka yang semakin besar atas penindasan mereka oleh Angkatan Darat Myanmar. Pada tahun 1991-1992, misalnya, rezim melancarkan pogrom terhadap Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine, yang tidak didukung oleh umat Buddha Rakhine. Pogrom tersebut membuat lebih dari 250.000 Muslim mengungsi ke Bangladesh, yang kemudian secara paksa dipulangkan ke Myanmar oleh pemerintah Bangladesh bekerja sama dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) (Cochrane, 2017). Namun, diskriminasi dan penganiayaan baik dari pemerintah SPDC maupun umat Buddha Rohingya terus berlanjut hingga saat ini.

Konstitusi Myanmar (2008) dengan jelas menyatakan bahwa semua ras, suku, dan agama memiliki hak yang sama di depan hukum. Meskipun Myanmar juga mengakui agama Kristen, Islam, Hindu dan Animisme, dengan jelas menyatakan bahwa agama

Buddha memiliki posisi khusus sebagai kepercayaan mayoritas negara (Kementerian Penerangan Myanmar 2008). Diskriminasi apa pun juga secara gamblang dinyatakan: "Persatuan tidak boleh mendiskriminasi warga negara Republik Persatuan Myanmar berdasarkan ras, kelahiran, agama, posisi resmi, status, budaya, jenis kelamin dan kekayaan" (Kementerian Penerangan Myanmar 2008). Namun, pada tataran praktis, pemerintah SPDC telah berusaha menggunakan agama Buddha sebagai senjata politik dengan memberikan dukungan keuangan untuk membangun pagoda mewah dan upacara persembahan untuk membuat penduduk percaya pada peran yang dimainkan pemerintah dalam agama mereka. Sebaliknya, pemerintah semakin membatasi kebebasan beragama umat Islam selama lima tahun terakhir, termasuk melarang pembangunan masjid baru dan mempersulit umat Islam untuk mengadakan upacara dan perayaan keagamaan (AsiaNews, 2012).

Setelah pemerintah junta militer dibubarkan pada Maret 2011 dan setelah kemenangan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dalam pemilihan umum pertama pada November 2015, diharapkan demokratisasi akan menjadi jalan masa depan Myanmar. Kejadian-kejadian ini muncul sebagian besar karena kritik internasional yang intens dan stagnasi politik dan ekonomi yang membuat rezim mengakui bahwa satu-satunya pilihan adalah berkompromi dengan partai oposisi (Thawnghmung, 2003: 457). Mengenai hak politik umat Islam, beberapa bulan sebelumnya pemerintah mencabut hak pilih sekitar 700.000 orang dengan menghilangkan hak mereka untuk memilih. Setelah lebih dari 50 tahun pemerintahan militer, Myanmar akhirnya membuat transisi yang telah lama ditunggu-tunggu ke pemerintahan terpilih. Meskipun partai tersebut memiliki mayoritas mutlak kursi di kedua kamar parlemen nasional (BBC News, 2015), pemimpin NLD secara konstitusional dilarang menjadi presiden. Menariknya, perjuangan Suu Kyi untuk demokrasi tidak tercermin dalam kandidat politiknya. Tak satu pun dari 1.151 kandidat NLD yang maju dalam pemilihan regional dan nasional adalah Muslim (Safdar, 2015). Akhirnya, pada 15 Maret 2016, Htin Kyaw terpilih sebagai presiden non-militer pertama negara itu sejak kudeta

militer pada tahun 1962, dan pada 6 April 2016 Suu Kyi diberi peran baru sebagai Penasihat Negara (Moe dan Ramzy, 2016). Militer, bagaimanapun, masih mempertahankan kekuasaan yang signifikan di pemerintahan dan parlemen. Ketegangan antar umat beragama, khususnya Islamofobia, tampaknya belum juga berkurang.

Lebih lagi, perubahan politik di kalangan elite tidak banyak mempengaruhi nasib Muslim Rohingya. Menyusul beberapa massa di wilayah Bago dan negara bagian Kachin pada bulan Juni dan Juli 2016 yang mengakibatkan penghancuran beberapa masjid, pasukan militer Myanmar dan ekstremis Buddha mulai menganiaya Muslim Rohingya di wilayah barat Negara Bagian Rakhine. Aparat keamanan memimpin kerusuhan yang menyebar luas dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang luas termasuk pembunuhan, pemerkosaan beramai-ramai dan kebrutalan lainnya. Operasi militer memaksa ribuan Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga. Ratusan dari mereka terbunuh dan lebih dari 300.000 mengungsi (Holmes, 2016). Selain ribuan Rohingya yang tinggal di Bangladesh, lebih banyak lagi yang terdampar di laut mencoba mencapai Indonesia, Malaysia dan Thailand. Penganiayaan terhadap Muslim Rohingya menuai kritik dari berbagai kalangan seperti PBB, kelompok hak asasi manusia dan pemerintah Bangladesh, Malaysia, Indonesia dan Turki. Seorang pejabat senior PBB menuduh Myanmar melakukan pembersihan etnis di negara minoritas Muslimnya (BBC News 2016). PBB dan organisasi hak asasi manusia internasional telah memperingatkan bahwa jika hak asasi manusia Rohingya tidak ditangani dengan benar dan mereka tetap terpinggirkan secara ekonomi, mereka akan menjadi rentan terhadap keterlibatan dalam aktivisme ekstremis dan bahkan radikalisasi (Arabnews 2017).

E. Demokratisasi dan Kebebasan Beragama

Sepintas, tampaknya tidak banyak harapan bagi Muslim Rohingya untuk mendapatkan hak-hak kebangsaan dan agama mereka dan hidup sebagai warga negara. Penolakan rezim otoriter terhadap kewarganegaraan mereka telah menutup banyak pintu. Banyak pengamat dan aktivis perdamaian menyayangkan Aung

San Suu Kyi yang bungkam soal nasib Rohingya. Banyak organisasi internasional dan independen dari negara lain lebih berfokus pada bantuan kemanusiaan daripada reformasi politik. Namun, perubahan politik di kalangan elite Myanmar akhir-akhir ini yaitu pelantikan presiden non-militer dan peran State Counsellor yang baru dibentuk, dapat membuka jalan bagi demokratisasi Myanmar.

Propaganda anti-Muslim yang telah tersebar luas di seluruh negeri, tidak hanya di tingkat masyarakat tetapi juga melalui pemerintah. Myanmar tetap menjadi masyarakat yang didorong oleh rumor, yaitu ketakutan bahwa umat Islam akan mengubah negara menjadi Islam adalah alasan utama sentimen anti-Muslim (Chia 2016). Sebuah survei pada tahun 2016 menemukan bahwa propaganda anti-Muslim telah menjadi wacana umum di kalangan masyarakat. Pemerintah otoriter telah secara sistematis mendukung mayoritas Buddha Myanmar untuk membangun lebih banyak pagoda sambil mengecilkan hati dan bahkan melarang agama minoritas mengontrak tempat ibadah baru. Namun, tidak ada laporan tentang perpindahan paksa ke agama Buddha. Pemerintah Myanmar dalam beberapa kesempatan menanggapi secara diplomatis bahwa pemerintah telah mengambil beberapa langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Terpilihnya Htin Kyaw dan Aung San Suu Kyi sebagai presiden dan State Counsellor menjadi semacam lentera dalam kegelapan masa depan negeri ini. Sulit bagi Suu Kyi, yang dia sendiri beragama Buddha, untuk menggambarkan dirinya sebagai penengah yang netral. Setelah terpenjara di rumahnya selama 15 tahun, kasus Muslim Rohingya menjadi dilema baginya. Pengalaman pahitnya di bawah pengawasan rezim otoriter mengajarinya banyak hal. Banyak pendukung internasional tidak dapat mengubah nasibnya selama penahanannya. Oleh karena itu, sikap diamnya terhadap ketegangan anti-Muslim dan pelanggaran militer terhadap Muslim Rohingya dapat menjadi bagian dari strateginya untuk mendapatkan dukungan massa dari masyarakat mayoritas Buddha dan mempertahankan legitimasi kepemimpinannya.

Suu Kyi dan NLD-nya menyajikan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah dengan lembut; melalui demokrasi. Suu Kyi masih menganggap mendiang ayahnya Aung San sebagai pengaruh pemikiran politiknya. Upaya Aung San untuk membentuk negara-bangsa Burma tidak lepas dari peran umat Islam dan pengorbanan mereka, terutama Abdul Razak, yang meninggal bersama ayahnya. Latar belakang pendidikan Barat dan pengalaman sosialnya telah mengukir dalam benaknya ide-ide tentang demokrasi dan nilai-nilai barat lainnya yang relevan untuk membangun Myanmar yang lebih baik. Akhirnya, posisinya sebagai penerima hadiah Nobel Perdamaian adalah gelar yang mengikat baginya, dengan banyak aktivis perdamaian internasional mengingatkannya tentang masalah ini. Di kamp-kamp Rohingya di Sittwe, misalnya, dia dengan lembut menyatakan, "Jika Anda ingin mengakhiri konflik yang sudah berlangsung lama, Anda harus siap untuk berkompromi" (Chia, 2016).

Demokrasi adalah satu-satunya solusi bagi Myanmar. Ini adalah obat untuk setiap negara-bangsa yang menghadapi komplikasi sosial dan politik. Di antara pilar demokrasi adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar (Perry, 2009: 622), seperti kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Majelis Umum PBB 1948). Dalam kasus Myanmar, nilai-nilai di atas sudah dinyatakan dengan jelas dalam Konstitusi Negara. Sejarah panjang perang agama yang brutal dan penganiayaan terhadap berbagai sekte agama di Eropa Barat telah memunculkan gagasan modern tentang agama sebagai masalah hati nurani individu, bukan sebagai kebijakan resmi negara. Meskipun kebebasan beragama di Myanmar saat ini jelas menurun, dalam jangka panjang demokrasi adalah jalan yang diperlukan untuk negara, terlepas dari perubahan curam yang diperlukan. Peralihan elite ke tokoh non-militer dan pengurangan kursi militer menjadi seperempat dapat dilihat sebagai kemajuan yang signifikan.

Pada tingkat empiris kita dapat melihat beberapa kemajuan menuju demokratisasi negara. Pergeseran dari pemerintah yang

dipimpin militer ke pemerintahan sipil menandai titik balik yang signifikan bagi Myanmar. Meskipun Myanmar mayoritas beragama Buddha, yang telah membentuk identitas Burma, ada upaya di antara beberapa pemimpin agama untuk menciptakan dialog antar agama yang terdiri dari perwakilan Buddha, Kristen, Islam, dan Hindu. Hak atas kebebasan beragama masih merupakan konsep baru di lingkungan politik dan sosial Myanmar yang baru muncul. Namun, sejak muncul pada 2011, apa yang disebut liberalisasi politik Myanmar telah berkembang. Amandemen konstitusi oleh partai yang berkuasa untuk mengurangi keterlibatan militer dalam politik menjadi pertanda baik bagi masa depan.

Namun, mengubah Konstitusi Myanmar 2008 sangat sulit. Dominasi militer selama setengah abad telah menghasilkan banyak pasal konstitusi yang mengamankan posisinya. NLD telah berjanji untuk membuat konstitusi lebih demokratis. Amandemen yang paling signifikan mencabut hak-hak istimewa yang diberikan oleh konstitusi kepada militer. Pada 2019, NLD mengusulkan 114 amandemen untuk konsolidasi demokrasi dan demiliterisasi lembaga-lembaga negara. Namun, reformasi tidak berhasil, ditolak oleh militer pemegang hak veto. Dari 114 proposal konstitusi, hanya empat perubahan kecil yang dicapai pada beberapa piagam (Aung 2020). Saat ini, jalan demokratisasi justru ditutup rapat oleh militer Myanmar. Pemilihan umum 8 November 2020 yang dimenangkan lagi oleh partai NLD justru berujung dengan kudeta militer pada 1 Februari 2021 oleh Jendral Min Aung Hlaing. Kekuatan demokratisasi tidak hanya meredup, tapi telah dimatikan karena kudeta militer terhadap pemerintahan sipil ini. Dikabarkan juga bahwa ratusan tokoh-tokoh demokrasi dipenjara dan bahkan ribuan pendukung demokrasi telah mati.

F. Kesimpulan

Sejak awal Islam masuk ke Myanmar, umat Islam sudah mengalami berbagai macam perlakuan, dari kondisi harmonis hingga diskriminasi dan Islamofobia. Sebagian besar Muslim datang melalui Teluk Bengal (sekarang Bangladesh) dari anak benua India selama berabad-abad. Di antara beragam etnis di negara itu, Muslim

Rohingya belum diakui secara resmi sebagai warga negara Myanmar. Tidak dapat disangkal, hampir semua suku bangsa lain di seluruh tanah air telah diakui selama ratusan tahun. Sejak zaman raja-raja Myanmar kuno, mereka hidup damai dan harmonis. Beberapa raja bahkan memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang di bawah agama-agama besar – Buddha, Islam, Kristen dan Hindu – dan mengizinkan pelaksanaan dan menjalankan kewajiban agama mereka. Peran umat Islam selama perjuangan kemerdekaan dari kerajaan Inggris, yang ikut serta dalam pembentukan negara-bangsa Burma, tidak bisa diabaikan.

Agama bukanlah faktor dominan yang mendorong ketegangan sosial dan penganiayaan terhadap umat Islam, melainkan motivasi politik dan sosial budaya. Ajaran tradisional Buddhisme adalah damai dan Buddhisme umumnya dianggap sebagai agama yang paling sedikit dikaitkan dengan kekerasan, meskipun ada banyak tindakan kekerasan yang dipicu atau diilhami oleh umat Buddha (Jerryson dan Juergensmeyer, 2010: 22-24). Michael Jerryson, seorang ahli agama Buddha, menegaskan bahwa kerusuhan dan kekerasan dapat dengan mudah berkembang karena perbedaan antara kenyataan dan ajaran, terutama selama transisi Myanmar ke demokrasi saat ini (Irinews, 2013).

Persaingan sosial, demokratisasi, dan tumbuh suburnya Islamisme radikal secara global menjadi salah satu faktor penyebab ketegangan sosial dan radikalisasi para biksu. Muslim telah lama dianggap sebagai imigran asing yang 'mencuri' pekerjaan dan tanah. Meskipun banyak Muslim yang tidak sukses secara ekonomi, mereka sering dipandang sebagai pesaing ekonomi. Munculnya Muslim radikal di banyak negara dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi agama Buddha di negara tersebut. Adanya beberapa kelompok perlawanan bersenjata yang memperjuangkan kebebasan yang lebih besar di Myanmar telah menyebabkan All-Burma Muslim Union (ABMU) dicap sebagai organisasi teroris (Karen Human Rights Group, 2014). Ternyata, penganiayaan terhadap umat Islam bahkan bisa menyulut ekstremisme Islam di tanah air. Fenomena yang cukup mirip dapat dilihat di beberapa negara berkembang

lainnya. Ini berarti bahwa radikalisasi biksu Buddha sebagian disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk memahami perubahan sosial-politik yang terjadi di negara ini.

Akhirnya, perubahan politik saat ini di Myanmar adalah langkah yang layak menuju demokratisasi. Terlepas dari kekecewaan beberapa aktivis hak asasi manusia seperti Kofi Annan dan beberapa Peraih Nobel, seperti Desmond Tutu dan Malala Yousafzai, Aung San Suu Kyi berada pada lintasan yang tepat menuju demokrasi, hak asasi manusia, dan konsiliasi etnis (Kelly 2016). Karena militer masih memiliki kekuatan yang cukup signifikan di pemerintahan (25%), maka akan butuh waktu baginya untuk mendorong negara menuju demokrasi, karena Myanmar tidak diciptakan dalam sehari. Seiring waktu, militer datang untuk mengundang pihak oposisi untuk membangun Myanmar baru dalam bentuk pengaturan pembagian kekuasaan antara militer dan pemerintah sipil. Hal ini kemungkinan akan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan suasana politik dan ekonomi yang lebih baik.

Meskipun penindasan dan pembatasan politik terus berlanjut, Myanmar secara bertahap bergerak menjauh dari despotisme dan menuju demokrasi. Seperti banyak negara lain yang berjuang untuk demokrasi, ketegangan sosial dan kekerasan muncul di sepanjang jalan menuju negara yang lebih damai dan sejahtera. Terlepas dari upaya pemerintah yang lambat untuk memecahkan masalah sosial dan agama, pembicaraan di masa depan antara kelompok pembagian kekuasaan harus mengarah pada pengaturan yang lebih baik untuk peran militer di masa depan politik Myanmar dan juga hak yang lebih besar bagi kelompok minoritas (Thawnghmung 2003, 458 –59). Dengan kepemimpinan visioner Suu Kyi dan dukungan internasional, semoga Myanmar secara bertahap akan menumbuhkan budaya toleransi dan dialog untuk memastikan perdamaian dan harmoni di Myanmar. Pemilihan umum yang akan datang pada akhir tahun 2020 juga akan menjadi langkah signifikan dalam reformasi politik Myanmar menuju negara yang lebih demokratis.

3

ISLAM DI CINA

Sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, Cina atau sekarang nama resminya Tiongkok mempunyai populasi Muslim yang tidak sedikit. Muslim di Cina tidak hanya pendatang baru di era modern, tapi juga komunitas Muslim sejak awal-awal dinasti di Cina. Tidaklah mengherankan bila sebagian sejarawan meyakini bahwa Islam di Indonesia juga berasal dari Cina. Peninggalan sejarah pelaut Cheng Ho dan Ma Hua di beberapa wilayah di Indonesia membuktikan hal itu. Dalam konteks kontemporer Islam mengalami perkembangan yang signifikan di beberapa wilayah khususnya dimana Muslim mayoritas seperti di wilayah Xinjiang dan Gangsu. Tidak sedikit informasi yang sampai pada kita tentang berbagai bentuk diskriminasi dan islamofobia terjadi di beberapa wilayah di Cina khususnya yang terjadi di wilayah Xinjiang. Bagaimana sejarah Islam di Cina hingga perkembangan dan tantangan kontemporer akan dibahas dalam sub-bab ini

A. Pendahuluan

Dikenal sebagai negara yang mempunyai peradaban tua, Cina menyimpan banyak hal menarik termasuk keberadaan Muslim di negara itu. Walaupun sebagai agama minoritas, Islam di Cina pernah mengalami masa keemasan yaitu ketika di bawah Kekaisaran Mongol pada periode Dinasti Yuan (1271-1368). Bahkan sebagian sejarawan menyebutnya sebagai dinasti Islam. Masa keemasan ini

tidak pudar di bawah Dinasti Ming (1368-1644). Pada periode itu, Islam berakulturasi dengan budaya Cina, sehingga penduduk saat itu bisa memiliki identitas Muslim dan Cina yang sama kuatnya.

Kejayaan Islam menuju titik anti klimaks di bawah kekuasaan Dinasti Manchu (1644-1911). Selama tiga ratus tahun, Muslim di Cina mengalami penindasan dan penganiayaan. Penindasan dan penganiayaan tersebut bukan tanpa perlawanan. Pemberontakan-pemberontakan dari kelompok Muslim terjadi pada kisaran abad kesembilan belas. Kemenangan-kemenangan jangka pendek bagi Muslim terjadi di wilayah Yunan, Khansu dan Turkistan Timur, namun semua perlawanan tersebut dapat ditumpas.

Di era kontemporer ini, Muslim banyak terdapat di Xinjiang, Ningxia, dan Gangsu dengan populasi yang beragam. Etnis Muslim Cina yang banyak dikenal adalah Hui dan Uighur. Kalau Hui merupakan salah satu etnis Cina, Uighur lebih dikenal sebagai etnis Turki. Dalam beberapa waktu terakhir, sering terjadi diskriminasi di beberapa wilayah khususnya Uighur di Xinjiang yang banyak melanggar hak asasi manusia. Sub-bab ini akan membahas sejarah kedatangan Islam, populasi dan demografi hingga tantangan kontemporer seperti radikalisme, diskriminasi, hingga islamofobia.

B. Sejarah Masuknya Islam

Islam datang ke Cina sejak periode awal Islam, yaitu pada periode Khulafaur Rasyidun. Beberapa sumber sepakat bahwa Islam datang ke Cina sejak tahun 650, yaitu ketika Saad bin Abi Waqqas dan rombongan secara resmi dikirim oleh Ustman bin Affan ke Imperium Goazong (Dinasti Tang). Rombongan Saad bin Abi Waqqas tiba di Kanton melalui jalan laut dan mendapat sambutan positif dari kaisar (Haiyun Ma, 2006). Disebutkan bahwa Saad berkunjung ke Cina 2 kali atau 3 kali. Kaisar bahkan mengizinkan mereka membangun sebuah masjid di Kanton dan masjid ini diyakini sebagai masjid pertama di tanah Cina. Oleh karena itu, di Kanton ada sebuah masjid yang dibangun di atas sebuah makam yang diyakini sebagai makam Saad bin Abi Waqqas.

Walaupun sumber lain mengatakan bahwa bukan Saad bin Abi Waqqas sendiri yang datang dan akhirnya meninggal di Cina, rombongan Muslim ke Cina ini diyakini sebagai Muslim pertama yang datang ke Cina.

Gelombang kedatangan Muslim berikutnya adalah pasukan Muslim di bawah pimpinan Qutaibah ibn Muslim Al-Bahili yang sampai ke perbatasan Cina. Pasukan ini dikirim oleh Gubernur Irak Al-Hajjaj Ibn Yusuf Al-Tsaqofi. Khalifah pada masa itu adalah Walid dari Bani Umayyah. Diduga pasukan ini sampai di wilayah Cina sekitar tahun 711 s/d 714 M (masih masa Dinasti Tang). Kedatangan pasukan Al-Bahili di Kasghar ini membuka jalur perdagangan melewati darat yang pada gilirannya meningkatkan intensitas hubungan Cina dengan kekuasaan Islam baik pada masa Umayyah maupun Abbasiyah. Pedagang Arab dan Persia meramaikan jalur perdagangan tersebut dan sebagian dari mereka ada yang menetap di Cina. Setelah hubungan dagang terjalin hangat, hubungan diplomatik dan militer pun terjalin. Tukar menukar delegasi dan kedutaan terjadi. Pada akhirnya, jumlah pemukim Muslim (Arab dan Persia) meningkat secara signifikan. Selama Dinasti Tang, warga Muslim dapat hidup makmur dan dihormati.

Pada masa Dinasti Song (960-1279), kebanyakan Muslim berperan dalam perdagangan. Karena populasi semakin banyak, mereka membangun masjid, sekolah, dan mendirikan lembaga-lembaga sendiri. Mereka juga membangun kota-kota Muslim di sekitar pelabuhan. Pada masa dinasti ini, tepatnya tahun 1070, Kaisar Shenzong mengundang 5.300 Muslim dari Bukhara (Uzbekistan) untuk menetap di Cina guna menciptakan zona penghubung (*buffer zone*) antara Cina dan Kekaisaran Liao di sebelah utara. Selanjutnya mereka menetap di daerah antara Keifeng dan Yenching (kini disebut Beijing). Pada periode ini, Komunitas Muslim menjadi ujung tombak perdagangan internasional bagi Cina. Ketika perdagangan di jalur laut mengalami kemajuan, migrasi besar-besaran terjadi melalui jalur Kashgar. Tenju saja hal ini meningkatkan jumlah warga Muslim di Cina. Peningkatan jumlah populasi tidak hanya disumbang oleh migrasi namun juga

disumbang oleh konversi oleh penduduk setempat. Konversi dalam jumlah signifikan dilakukan oleh suku Hsiung Nu.

Pada periode selanjutnya, Bangsa Mongol di bawah pimpinan Jenghis Khan melakukan invasi ke berbagai penjuru bumi. Setelah wilayah-wilayah Islam di bawah kekuasaan Islam Abbasiyah, banyak wilayah-wilayah lain dikuasai Bangsa Mongol, termasuk Cina. Namun karena para pemimpin Mongol masuk Islam, konversi ini membawa akibat positif bagi warga Muslim di Cina. Muslim menjadi warga terhormat di seluruh kekuasaan Mongol termasuk di Cina. Pada masa ini terjadi peralihan bahasa komunikasi warga Muslim. Bahasa Parsi menggantikan Bahasa Arab. Bukti bahwa Muslim menjadi warga kelas terhormat dicatat oleh seorang sejarawan Parsi Rashid-Din Fadlullah. Ia mencatat bahwa ketika Mongol berkuasa Cina (pendiri Dinasti Yuan) dibagi menjadi 14 provinsi, dan 8 gubernur diantaranya adalah Muslim. Kondisi ini juga direkam dalam catatan perjalanan Ibnu Batutah,[1] seorang pengembara dari Maroko yang mengatakan "...tiap kota Cina mempunyai kota Muslim di mana hanya hidup orang-orang Muslim. Dalam kota-kota ini ada masjid dan lembaga-lembaga lain. Orang-orang Muslim sangat dihormati…". Pada masa dinasti Yuan ini muncul istilah Hui, sebutan untuk Muslim Cina. Hui berasal dari kata Huihui, kata yang dipakai untuk menyebut orang-orang Arab, Persia, dan Asia Tengah (Lipman, 1997: 18, 25).

Dinasti Mongol (Yuan) berakhir masa kejayaannya pada 1368 M dan Dinasti Ming (1368-1644) mengambil alih roda pemerintahan. Pada periode ini Ming ini Islam mencapai puncak kesejahteraan dan pengaruh; Islam dan Cina benar-benar melebur dan tidak lagi dianggap asing. Semakin banyak orang Cina asli yang memeluk Islam. Nama-nama Arab diadaptasi ke bahasa Cina tanpa kehilangan unsur aslinya. Nama seperti Muhammad menjadi "Ma",

[1] Nama Lengkapnya Muhammad bin Abdullah Al-Luwati bin Batutah (1304-1378). Ia adalah seorang pengembara yang lahir di Tonja, sebuah kota di Kerajaan Maroko. Ia menghabiskan 28 tahun untuk mengembara ke berbagai negara. Ia pergi ke Cina setelah 8 tahun menetap di India. ***Al-Mausu'ah Al-Arabiyyah Al-Muyassaroh.*** 1965. New York: Viking Press, hlm.,11.

Mustapha menjadi "Mu", Tahir menjadi "Ta", Hasan "Ha", Husayn "Hu", Badruddin, Jalaluddin, dan seterusnya menjadi "Ning", Najib dan Nasir menjadi "Na", Salim, Salih "Sha", Ali menjadi"Ay", dan seterusnya. Tradisi Cina yang tidak bertentangan dengan syariat juga diserap oleh warga Muslim. Warga Muslim juga menikahi wanita-wanita setempat, dan penduduk setempat banyak sekali yang menjadi mualaf.

Pada periode selanjutnya, golongan Manchu berhasil naik ke puncak kekuasaan di Cina mengakhiri Dinasti Ming dan membangun dinasti Qing (1636-1912). Dinasti ini membenci Muslim karena dianggap golongan yang pro penguasa sebelumnya. Dinasti Qing adalah dinasti terakhir sebelum Cina memasuki era republik. Selama hampir tiga abad kekuasaan dinasti ini, Cina diwarnai gejolak politik dan kemanusiaan, terutama dialami oleh warga Muslim. Mereka menjadi sasaran kebencian dan tindak kekerasan. Penguasa-penguasa Qing melarang penyembelihan hewan Kurban, pembangunan masjid dan melaksanakan ibadah haji. Bahkan ada kebijakan resmi untuk menghapus keberadaan umat Islam. Daerah-daerah berpenduduk mayoritas Muslim seperti Turkistan Timur, Khansu, dan Yunnan menjadi target operasi anti-Islam yang dilancarkan oleh penguasa Dinasti Qing. Penindasan tersebut tidak diterima begitu saja. Warga Muslim melakukan perlawanan terus menerus. Beberapa pemberontakan yang dilakukan oleh Muslim Hui telah menyebabkan jatuhnya banyak korban. Di antara pemberontakan-pemberontakan tersebut terjadi di Khansu, Turkistan Timur, dan Yunnan (Kettani, 2005: 127). Beberapa dari pemberontakan tersebut yang menonjol adalah pemberontakan Panthay yang terjadi pada Provinsi Yunnan (1855-1872), pemberontakan Dungan yang terjadi terutama di Xinjiang, Shensi dan Gansu (1862-1877).

Dinasti Manchu berakhir pada kisaran tahun 1911-1912 M dan berganti ke periode Cina modern dan menjadi negara republik yang dipimpin oleh Dr. Sun Yat Sen. Pada periode ini umat Islam berangsur-angsur mendapatkan hak-hak mereka kembali. Meski minoritas, umat Islam pada masa ini dipandang sebagai salah satu

unsur penting yang dari terbentuknya sebuah Republik Nasionalis Cina. Oleh karena itu umat Islam berperan aktif dalam kehidupan politik pada masa itu. Kondisi tersebut memberikan kesempatan bagi umat Islam Cina untuk membangun dan mengembangkan aspek budaya, ekonomi dan sosial. Terbukti, pada masa itu pula banyak lahir para cendekiawan muslim dan pendidikan Islam di Cina juga berkembang sangat pesat.

C. Populasi dan Demografi Muslim

Populasi Muslim di Cina relatif sedikit dari sisi persentasenya. Dari total 1,4 milyar penduduknya, 720 juta (51,8%) adalah tidak beragama secara formal, 304 juta (21,9%) beragama tradisional, 254 juta (18,3%) diantaranya Buddha, 72 juta (5,2%) adalah Kristen, 28 juta (2%) Islam, dan 1% agama lainnya (Pew, 2009). Dari berbagai sumber, data jumlah Muslim di Cina mengalami perubahan signifikan atau ada kemungkinan lain tidak ada kepastian karena tidak ada sensus umat beragama secara jelas. Ali Kettani (2005: 130) misalnya mencatat bahwa estimasi jumlah Muslim di Cina sekitar tahun 1850 adalah 9.641.000. Sementara itu, sensus pada 1936 yang mencantumkan agama sebagai salah satu komponen identifikasi menyebutkan bahwa jumlah Muslim adalah 47.437.000 (10,5%). Namun rasio itu menurun drastis pada 2007 yakni hanya sekitar 19.827.778 (1,5%). BBC mengajukan angka sekitar 20 hingga 100 juta (1,5% hingga 7,5%). Sedangkan menurut *CIA World Factbook*, sekitar 1-2% dari total populasi di Cina adalah Muslim.

Populasi Muslim banyak di provinsi-provinsi bagian utara meskipun sebenarnya Muslim ada di hampir setiap wilayah di Cina. Muslim mayoritas di wilayah Xinjiang–Uighur & Chinghai. Persentase Muslim di Yunnan bagian barat daya juga tidak bisa diabaikan, begitu pula yang terdapat di Henan, Cina tengah. Di antara 55 kelompok minoritas yang diakui secara resmi oleh negara, 10 kelompok adalah Muslim. Mereka adalah: Hui (9,8 juta menurut sensus 2000 atau 48%), Uighur (8,4 juta atau 41%), Kazak (1,25 juta atau 6,1%), Dongxiang (514.000 atau 2,5%), Kyrgyz

(161.000), Salar (105.000), Tajik (41.000), Uzbek, Bonan (17.000) dan Tartar (5.000). Ada juga Muslim dari etnis Tibet namun mereka tetap disamakan dengan orang-orang Tibet lainnya. Lain halnya dengan Hui yang dibedakan dari Han, padahal keduanya tidak bisa dibedakan. Sepuluh etnis tersebut bisa dipilah menurut latar belakangnya yakni: Turki (Uighur, Kazak, Kyrgyz, Salar, Uzbek dan Tatar), Persia (Xinjiang), Mongol (Xongxiang dan Bonan), dan Hui (Qinghai, Gansu, dan Ningxia). Xinxjiang, Ningxia, Gansur dan Qinghai sering juga disebut sebagai "Sabuk Quran" (Barnett, 1963).

Dalam dua dekade berikutnya sejak 2011, Pew memproyeksikan perlambatan pertumbuhan populasi Muslim di Cina dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Banyak Muslim Hui secara sukarela membatasi diri pada satu anak di Cina sejak Imam mereka berkhotbah kepada mereka tentang manfaat pengendalian populasi, sementara jumlah anak Hui di berbagai daerah diperbolehkan memiliki bervariasi antara satu dan tiga anak.

D. Corak Islam

Corak Islam di Cina cukup bervariasi. Di wilayah-wilayah yang secara geografis bersinggungan atau berdekatan dengan Turki lebih banyak berafiliasi ke mazhab Hanafi. Namun terdapat juga yang berafiliasi ke sufi khususnya bagi etnis Hui. Terdapat sebagian kecil Syiah Ismailiyah khususnya etnis Tajikistan.

Secara historis, kebudayaan Islam yang paling kuat di Cina berasal dari Asia Tengah dan Barat yang dibawa ketika terjadi penaklukan Mongol atas sebagian besar Eurasia pada abad ke-13. Di Cina, Islam mempengaruhi teknologi, ilmu pengetahuan, filsafat dan seni. Misalnya, orang Cina mengadopsi banyak pengetahuan medis Islam seperti pengobatan luka. Sebaliknya, pertukaran budaya lewat Jalur Sutra juga menguntungkan Islam karena akhirnya kebudayaan Islam juga dipengaruhi tradisi Cina-Buddha dalam hal seni dan motif dekoratif dari arsitektur dan kaligrafi yang ditemukan pada Muslim di Asia Tengah.

Dalam aspek budaya, Islam memberikan pengaruh yang cukup signifikan di Cina terutama pada aspek arsitektur (masjid) dan kaligrafi. Dalam bahasa Cina, masjid disebut *qīngzhēn sì* atau "kuil kebenaran murni". Masjid Huaisheng dan Masjid Agung Xi'an (pertama kali didirikan pada era Tang) dan Masjid Agung Selatan di Jinan (sejak Dinasti Ming) tidak meniru banyak fitur masjid khas Islam. Di Cina terdapat sekitar 45,000 masjid, lebih dari 45.000 imam, dan 10 sekolah Islam di negara itu. Dari jumlah masjid itu, mayoritasnya berada di Xinjiang.

Sebuah fitur penting dalam arsitektur Cina adalah penekanannya pada simetri, yang berkonotasi rasa keagungan; ini berlaku untuk segala hal mulai dari istana hingga masjid. Seperti di semua daerah arsitektur Islam Cina mencerminkan gaya arsitektur lokal. Cina terkenal dengan masjid-masjidnya yang indah, yang menyerupai kuil. Namun, di Cina barat, masjid-masjidnya menyerupai masjid di timur tengah, dengan menara tinggi dan ramping, lengkungan melengkung, dan atap berbentuk kubah. Di barat laut Cina, Muslim Hui telah membangun masjid dengan kombinasi timur dan barat.

Salah satu hal yang menarik di Cina adalah keberadaan imam wanita (dikenal dengan nama *Ahong*). Jumlah imam wanita muslim, yang bertindak sebagai pemimpin spiritual dan guru bagi Muslimah, semakin meningkat di Cina, terutama di daerah Ningxia. Imam-imam wanita tersebut telah mendapatkan pengakuan masyarakat luas, setelah mempelajari agama Islam dan mengambil ujian sertifikasi. Ahong tidak hanya memimpin jamaah wanita Muslim dalam beribadah di masjid, tapi juga mengajarkan tentang Al-Quran dan kebudayaan Islam, serta memberikan pelayanan keagamaan lainnya pada jamaah. Para Imam perempuan juga menengahi perselisihan dalam keluarga dan meningkatkan kesadaran Muslimah tentang hak-hak mereka. Imam perempuan memainkan peran yang semakin penting dalam meningkatkan kesetaraan gender, kualitas kehidupan beragama wanita setempat dan harmoni sosial.

Dalam bidang lain Islam juga memberi sumbangan lain seperti olah raga wushu. Wushu ini dikembangkan oleh komunitas Hui. Akar pengembangan wushu adalah penganiayaan-penganiayaan yang diterima oleh komunitas Hui semasa pemerintahan Dinasti Qing. Tokoh Muslim dalam bela diri ini adalah Ma Xianda. Dalam bidang kelautan figur-figur Muslim juga ikut mewarnai sejarah Cina seperti Laksamana Cheng Ho dikenal sebagai pelaut Muslim yang tangguh. Pengikutnya yang terkenal adalah Ma Huan.

E. Diskriminasi dan Islamofobia

Problem Muslim di Cina paling aktual di Cina adalah bahwa Muslim etnis Uighur di Xinjiang yang mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah. Diskriminasi yang mereka alami melebihi apa yang diterima oleh etnis minoritas lain, termasuk Muslim Hui. Perlakuan diskriminatif ini dipicu oleh kekhawatiran pemerintah Cina karena semakin besarnya kemungkinan etnis Uighur memisahkan diri dari Cina. Alasan pemisahan diri ini cukup rasional karena secara etnis mereka juga bukan Cina, dan mereka mempunyai kepercayaan (agama) yang berbeda dengan mayoritas warga Cina. Akibatnya, pemerintah mendukung migrasi etnis Han (non-Muslim) yang secara teknis lebih terampil ke wilayah Uighur. Kedatangan para pekerja Han yang lebih terampil tentu saja mendesak angkatan kerja dan ruang ekonomi warga Uighur. Uighur juga merasa bahwa migrasi suku Han ke wilayah mereka adalah upaya untuk melemahkan tekat memerdekakan diri. Kecurigaan Uighur tidak sepenuhnya salah karena memang Beijing menjanjikan insentif bagi para pendatang yang mau membuka usaha di wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Uighur tersebut. Akhirnya terjadi konflik antara Uighur dengan suku Han (non-Muslim).

Secara historis, etnis Uighur adalah peranakan Turki yang mempunyai budaya relatif berbeda dengan kebanyakan Cina. Mereka tidak bertutur dengan bahasa Cina, melainkan Turki. Disinyalir Etnis Uighur ingin merdeka dan menjadi negara

Turkistan Timur. Keinginan yang sudah muncul sejak tahun 1940-an ini semakin kuat dengan runtuhnya Uni Soviet disusul kemunculan beberapa negara baru yang memerdekakan diri di Asia Tengah. Namun keinginan tersebut terbentur "tembok raksasa" Cina. Secara historis, Uighur 'dijajah' Cina sejak 1949 yakni setelah kekuatan komunis di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil memenangkan perang saudara melawan kubu Republik di bawah pimpinan Chiang Kai-sek. Wilayah Xinjiang dianeksasi oleh Dinasti Qing sebelum era republik dan dimasukkan dalam wilayah kekuasaan mereka.

Pertikaian antara suku Uighur dan suku Han yang berada dalam barisan pemerintah Cina akhirnya meledak pada Juli 2009, ketika terjadi pembunuhan ratusan warga Uighur. Pemerintah Cina menganggap kerusuhan dan jatuhnya korban sama sekali tidak dilatarbelakangi oleh sentimen agama, namun karena motif politik semata, yakni upaya memisahkan diri. Jatuhnya korban juga bukan pelanggaran HAM namun karena dalam konteks penegakan hukum. Konflik pemerintah dengan suku Uighur menjadikan hubungan Cina dan Turki memburuk. Pasca kerusuhan tersebut, Pemerintah Cina melarang umat Islam melaksanakan sholat Jum'at, dengan dalih keamanan. Demonstrasi Muslim Uighur pada Juli 2009 berakhir dengan penangkapan ribuan Muslim dan terbunuhnya ratusan Muslim Uighur.

Pada bulan April 2001 pemerintah membentuk CIA (*Cina Islamic Association*) yang bertujuan membantu penyebarluasan Al-Quran dan meredam penyebarluasan ekstremisme agama. Organisasi ini dijalankan oleh 16 orang ulama yang bertanggung jawab merumuskan tafsiran atas ajaran-ajaran Islam dengan benar dan mengikat. Lebih lanjut lembaga ini membantu para imam merumuskan khotbah mereka sehingga khotbah para imam tidak disalahgunakan untuk menghasut jamaah atau menyebarkan kebencian. Di samping itu beberapa organisasi Muslim di level nasional memperjuangkan hak-hak Muslim.

Secara umum, banyak hak-hak Muslim yang terus diperjuangkan karena Muslim merasa ada diskriminasi. Beberapa hak-hak yang diperjuangkan oleh Muslim diantaranya adalah larangan ternak babi di daerah mayoritas Muslim, kuburan Muslim terpisah dengan non-Muslim, pendirian institusi untuk pernikahan Muslim, sertifikasi makanan-makanan halal, pencabutan pembatasan Muslim menunaikan ibadah haji ke Mekkah dll. Sebagian dari hak-hak tersebut sudah diberikan tapi sebagian yang lain masih dalam proses perjuangan.

F. Pelanggaran HAM Terhadap Muslim Uighur

Pemerintah Cina telah melakukan beberapa pelanggaran HAM di Xinjiang, diantaranya pelanggaran kebebasan beragama. Diberitakan oleh beberapa media internasional bahwa Pemerintah Cina melarang etnis Muslim Uighur di Xinjiang untuk melakukan kegiatan dan kewajiban beribadah menurut agamanya seperti sholat berjamaah dan berpuasa di bulan Ramadhan. Masjid-Masjid dijaga ketat oleh pasukan keamanan pemerintah, bahkan para pejabat membagikan makanan dan minuman ke rumah-rumah warga muslim Uighur pada saat bulan suci Ramadhan dan memaksa mereka untuk tidak berpuasa.[2] Selain kebebasan dalam beragama, Pemerintah Cina juga melakukan pelanggaran HAM lainnya juga yaitu kebebasan untuk berkumpul dan berpendapat, hambatan atas pendidikan, diskriminasi, serta hukuman mati terhadap tahanan politik.

Selain itu, beberapa kasus diskriminasi terhadap Muslim juga terjadi. Imam dikontrol secara ketat oleh pemerintah, dan para imam diharuskan untuk mendukung pemerintah untuk dapat melancarkan propaganda bagi Muslim Uighur. Sejak tahun 1995 hingga 1999, pemerintah Cina telah meruntuhkan 70 tempat beribadah serta mencabut surat izin 44 imam yang tidak mendukung

[2] "Dibalik Pelarangan Beribadah etnis Muslim Uighur di Cina", di kompasiana.com 16 Juli 2013. https://www.kompasiana.com/rahab/552ab1d7f17e61cb32d623bd/dibalik-pelarangan-beribadah-kaum-muslim-uighur-di-Cina (diakses 7 Juli 2022.)

pemerintahan. Pemerintah juga secara resmi menerapkan larangan ibadah perorangan di tempat-tempat milik negara.

Diskriminasi dalam aspek ekonomi juga dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap etnis muslim Uighur, Sebagian besar Muslim Uighur mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di tempatnya sendiri, sering sekali mereka mendapatkan tindakan yang kasar di tempat pelayanan publik, dimana kebanyakan muslim Uighur tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang strategis. Menurut Amnesty Internasional, Xinjiang merupakan satu-satunya Provinsi di Cina yang mengizinkan hukuman mati terhadap tahanan politik. Jumlah pasti korban tahanan politik yang di hukum mati disembunyikan oleh negara Cina, namun menurut Dogu Turkistan,[3] jumlah tewas akibat hukuman mati ataupun penyiksaan oleh pemerintah Cina mencapai 2.500 jiwa dari tahun 1999 sampai 2000.

Diskriminasi yang dialami oleh Muslim Uighur adalah merupakan kebijakan pemerintah Cina yang menginginkan terwujudnya *One Cina Policy* atau kebijakan satu Cina. Pola-pola integratif pemerintah Cina dengan melakukan *civic education* terbukti tidak berhasil mengintegrasikan Muslim Uighur dengan penduduk Cina mayoritas lainnya. Bahkan justru etnis Muslim Uighur melakukan perlawanan karena kebijakan migrasi Pemerintah Cina dengan melakukan perpindahan secara besar-besaran etnis Han yang merupakan etnis mayoritas ke daerah Xinjiang dan Urumqi, migrasi besar-besaran ini tidak lain adalah bentuk kebijakan pemerintah Cina untuk melakukan *etnic cleansing* (pembersihan etnis) untuk menyingkirkan Muslim Uighur secara perlahan dari wilayah Xinjiang dan Urumqi, selain itu juga kebijakan keluarga berencana di Cina menguntungkan suku Han, yang memiliki tingkat pertumbuhan populasi 31,6 lebih tinggi dibanding suku lainnya yang maksimal mencapai 15,9%, kebijakan keluarga berencana di Cina juga ini juga diklaim merupakan

[3] Harun Yahya, *Chinese Torture in East Turkestan*, diakses dari http://eastturkestan.net/china05.html (diakses Sabtu 19 Maret 2021)

bagian dari kebijakan pemerintah Cina untuk melakukan *ethnic cleansing*.[4]

Tentara Cina di Xinjiang kembali melakukan kekerasan terhadap warga Muslim Uighur telah menyebabkan sekurang-kurangnya 8 orang Uighur mati atas tuduhan menyerang pejabat polisi dan menyebut mereka sebagai "muslim ektremis". Kekerasan terbaru ini terjadi di wilayah Yarkand yaitu Kashgar. Website resmi pemerintah Xinjiang telah menahan 9 warga Uighur karena keterlibatan mereka dalam serangan kantor polisi. Laman tersebut juga menegaskan bahwa pihak polisi telah mengambil tindakan "tegas" dengan menembak mati 8 orang dan menembak 1 orang lainnya. Selain itu, dilaporkan bahwa puluhan Muslim Uighur di Xinjiang telah meninggal dunia akibat ditembak mati oleh pihak rejim komunis Cina dalam beberapa bulan terakhir atas tuduhan "muslim ekstremis". Lembaga pendukung Hak Asasi Manusia mengecam tindakan yang dilakukan oleh penguasa Cina terhadap Muslim Uighur dengan tuduhan ekstremisme dan juga pemberontakan. Lembaga tersebut meyakini bahwa isu tersebut cenderung dibesar-besarkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan penindasan terhadap minoritas Muslim di Xinjiang semakin melebar.[5]

G. Penutup

Islam masuk ke wilayah Cina sejak abad awal Islam, yaitu abad ke-7. Periode itu adalah di masa Dinasti Tang yang membuka jalur perdagangan maritim termasuk dengan Persia, Arab, India dan disambut oleh sebagian masyarakatnya. Menurut catatan Tan Ta Sen (2010), kedatangan Islam di Cina melalui jalur perdagangan dan juga ikatan diplomatik Cina-Arab pada masa Dinasti Tang (618-907 M) dan Dinasti Song (960-1279). Meski sebagai minoritas, umat Islam di Cina selalu terlibat aktif dalam sejarah berdirinya

---

[4] *Kebijakan One China policy, dan penerapannya pada etnis muslim Uighur*, diakses dari http://saveUighur.org (diakses Sabtu 19 Maret 2021)

[5] http://wanfauzi.com/penindasan-muslim-Uighur-di-negara-china/ (Diakses Minggu 20 Maret 2022).

negeri tersebut. Bahkan tokoh revolusionis yang membawa Cina dari pemerintahan tiran (Dinasti Manchu) menuju negara Republik Demokratis yaitu Sun Yat Sen disinyalir adalah seorang Muslim. Hadirnya Sun Yat Sen dan tokoh-tokoh muslim penting lainnya tidak lepas dari kegigihan umat Islam dalam membangun peradaban mereka melalui kultur, sosial, budaya dan pendidikan yang mereka perjuangkan selama berabad-abad.

Saat ini, umat Islam adalah komunitas Muslim minoritas yang signifikan di Tiongkok. Dari sisi demografis, konsentrasi Muslim terbesar adalah etnis Uighur di Xinjiang, dan juga populasi signifikan lainnya terdapat di wilayah Ningxia, Gansu, dan Qinghai. Sedangkan dari sisi etnis, selain Uighur di Xinjiang, etnis Hui dan Han terdapat di berbagai kota besar seperti Beijing. Secara umum, etnis Hui tidak banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun Islamofobia dari

Saat ini, umat Islam adalah komunitas Muslim minoritas yang signifikan di Tiongkok. Dari sisi demografis, konsentrasi Muslim terbesar adalah etnis Uighur di Xinjiang, dan juga populasi signifikan lainnya terdapat di wilayah Ningxia, Gansu, dan Qinghai. Sedangkan dari sisi etnis, selain Uighur di Xinjiang, etnis Hui dan Han terdapat di berbagai kota besar seperti Beijing. Secara umum, etnis Hui tidak banyak mendapatkan perlakuan diskriminatif dari pemerintah maupun Islamofobia dari masyarakat secara umum. Kasus diskriminasi dan penindasan Muslim Uighur mempunyai sejarah yang panjang sejak sebelum terbentuknya Cina modern.

Hari ini, Islam dan Muslim mempunyai masa depan yang signifikan di negara tirai bambu ini. Di satu sisi, populasi Muslim akan terus mengalami perkembangan signifikan, di sisi lain kontribusi sosial Muslim juga tidak bisa diremehkan. Populasi Muslim yang saat ini mencapai sekitar 28 juta ini akan banyak berkontribusi secara sosial di masa-masa yang akan datang.

4

ISLAM DI AUSTRALIA

Islam di Australia menarik untuk dikaji tidak hanya karena negara kangguru ini negara "Barat" terdekat dengan Indonesia, tapi juga karena Islam tumbuh cukup signifikan di negara ini. Australia juga "dekat" dengan Indonesia karena Bali telah menjadi destinasi wisata yang utama bagi wisatawan Australia. Sebagai negara yang mayoritas pendatang, Australia mendeklarasikan sebagai negara multikultural, termasuk umat Islam. Muslim di negara ini juga sangat beragam etnis dan rasnya dari Asia Tenggara, Asia Tengah, Afrika, Eropa dls. Pelaut Indonesia khususnya Makassar menjadi Muslim yang pertama datang ke Australia. Sub-bab ini akan menyoroti sejarah masuknya Islam, perkembangan dan populasi Muslim hingga tantangan kontemporer.

A. Pendahuluan

Australia pada dasarnya adalah sebuah negara yang multikultural. Ada banyak ras, bangsa, dan etnis tinggal di bawah payung hukum Australia. Keragaman ini tumbuh sebagai konsekuensi dari kebijakan negara mengenai izin imigrasi sehingga komposisi etnik, akulturasi budaya dan profil keagamaan di Australia menjadi lebih dinamis. Pribumi Australia adalah orang Aborigin yang telah hidup selama kurang lebih dari 50.000 tahun di benua ini. Kemudian disusul dengan kedatangan orang Inggris pada 1788 dalam pelayaran pertama mereka ke Australia. Selain para imigran dari Inggris, ada juga yang datang dari Irlandia (Nurdin, 2009: 34).

Wajah dan corak keberagamaan di Australia mengalami perubahan yang signifikan sejak 1947 sampai 1973. Dalam kurun waktu yang kurang lebih tiga dekade; Australia mengalami peningkatan populasi yang cukup masif sebagai dampak dari imigrasi internasional yang datang dari Afghanistan, Arab Saudi, Turki, Irak, Persia, Inggris, Rusia, Jerman, dan sebagainya. Berdasarkan sensus penduduk pada 1991, populasi penduduk peranakan di Australia mencapai 3.690.000. Peningkatan populasi penduduk peranakan ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap dinamika keberagamaan di Australia (Nurdin, 2000: 51). Sedikit banyak imigrasi internasional tersebut mengubah konfigurasi dan lanskap keberagamaan di Australia. Pastinya, imigrasi internasional ini berpengaruh besar tidak hanya pada margin demografis semata, tetapi juga pada dimensi-dimensi sosial, budaya, agama, politik dan ekonomi.

Secara kultur, atmosfer kebudayaan dan keagamaan di Australia mencerminkan corak yang multikultural. Dalam konstitusinya, Negeri Kangguru menjamin kebebasan warganya dalam hal menjalankan agama dan keyakinannya. Mereka bebas menjalankan ritual keagamaan berdasarkan keyakinannya masing-masing, tanpa ada diskriminasi. Bahkan, konstitusi Australia memberikan tempat kepada orang-orang agnostik dan ateis. Menurut Tom Frame, Australia tidak pernah benar-benar mendeklarasikan dirinya sebagai negara agamis. Sebagian orang Australia menilai gereja (institusi agama) hanya akan menjadi penghalang belaka dan tidak memiliki signifikansi apa pun bagi kehidupan demokrasi (Safei, 2017: 9).

Jaminan kebebasan beragama di Australia tidak kemudian umat Islam terbebas dari tantangan diskriminasi dan islamofobia. Sebagai penganut sistem politik liberalisme, umat Islam Australia dituntut beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan liberal dan internalisasi nilai-nilai liberal yang sedikit-banyak kontras dengan ajaran Islam.

B. Sejarah Islam di Australia

Muslim di Australia memiliki sejarah yang cukup panjang dan diperkirakan datang sebelum orang Eropa datang di benua ini. Beberapa pengunjung awal Benua Australia adalah orang-orang muslim yang berasal dari Indonesia Timur seperti Makassar. Mereka membangun hubungan dagang dengan daratan Australia sejak akhir abad 16 dan mulai masif pada abad 17. Para pendatang ini merupakan seorang pemburu teripang (nelayan) sekaligus pedagang. Nelayan dan pedagang Makassar ini singgah di pesisir utara Australia Barat, Australia Utara dan Queensland. Pada awalnya, para pemburu teripang yang masuk ini belum membentuk sebuah komunitas yang kokoh di Australia *(settled community).* Mereka hanya singgah sementara lalu pergi.

Orang Makassar ini berdagang dengan penduduk setempat dan mencari teripang untuk dijual sebagai makanan di Pasar Cina. Para pendatang tersebut telah memeluk agama Islam. Mereka kemudian menjalin perkawinan campuran dengan masyarakat pesisir Australia. Secara arkeologis, keberadaan orang muslim Makassar dibuktikan dengan ditemukannya perahu tradisional Makassar oleh Suku Aborigin di sebuah gua dan adanya kesamaan kosakata orang Makassar dengan penduduk pesisir Australia. Selain itu, ditemukan juga lokasi pemakaman orang Makassar di sepanjang garis pantai utara Benua Australia. Menurut John Bradley, dikutip oleh H. M. Dahlan M, bahwa pengaruh ajaran agama Islam masih dapat dilacak pada daratan Pulau Arnhem (Dahlan, 2019: 159).

Fase berikutnya, pada 1860, Islam masuk melalui kebijakan pemerintah Australia yang mendatangkan pengendara unta *(camel drivers)* dari Afganistan yang awalnya dipakai untuk mengatasi keadaan alam yang sangat sulit. Selama sepuluh tahun berikutnya, pengusaha Inggris mengimpor unta dalam jumlah besar dengan pawangnya. Unta-unta tersebut diturunkan di Derby dan Fremantle di Australia Barat, Port Augusta di Australia Selatan, dan Port Melbourne. Orang-orang Afganistan tersebut digunakan untuk membangun jalur telegraf darat antara Australia dengan London

melalui India pada 1870. Selain itu, mereka juga terlibat dalam pembangunan jaringan rel kereta api antara Port Ausgusta dan Alice Springs yang kemudian disebut *Ghan Train*. Mereka kemudian menikah dengan penduduk asli setempat sehingga keluarga mereka berpartisipasi aktif dalam pembentukan komunitas muslim di Australia (Deen, 2012: 63).

Antara 1870 dan 1920, sekitar 20.000 unta dan 2.000-4.000 penunggang unta asal Afganistan mendarat di pelabuhan dan jaringan rute unta yang tersebar di seluruh pedalaman Australia. Unta-unta itu datang dari Karachi, Bombay dan Calcutta. Pada 1890-an, para penunggang unta bermukim di Kalgoorlie, Broken Hill. Sejumlah kelompok Sikh dan Hindu juga bersatu dengan komunitas Afganistan. 'Afghan' atau 'Ghan' menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan setiap orang Asia yang terlibat dalam bisnis unta (Deen, 2021: 64).

Melihat besarnya potensi bisnis unta, orang-orang Afganistan kemudian menjalin hubungan kemitraan dengan orang-orang Eropa. Pada gilirannya, muslim kota dari kelas pedagang yang berpendidikan menginvestasikan modal mereka di properti dan mengumpulkan uang untuk membangun masjid di Adelaide dan Perth. Bisnis unta mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1890-an-1905 yang dijalankan oleh orang-orang Afgan yang telah tinggal di Australia selama sepuluh sampai dua puluh tahun. Mereka pun mempekerjakan orang-orang sebangsa mereka yang kurang berpendidikan di peternakan unta di seluruh wilayah Australia. Pada perkembangannya, bisnis unta ini mendapatkan respons negatif dan permusuhan dari para pejabat dan serikat pekerja lainnya karena eksklusivitas sistem rekrutmen buruh yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang Afgan (Deen, 2012: 66).

Pasca Perang Dunia Kedua, umat Islam Australia memasuki periode modern dan majemuk. Pada 1947-1971, jumlah warga muslim di Australia meningkat tajam dari 2.704 menjadi 22.331. Hal ini terjadi karena ledakan ekonomi pasca perang yang memberikan peluang lapangan kerja baru dalam dunia industri. Banyak muslim

Eropa, terutama Turki, yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari kehidupan baru di Australia. Di sisi lain, pemerintahan Australia menjalin sebuah hubungan politik dengan Turki pada 1967. Berdasarkan sensus penduduk pada 2006, tercatat sejumlah 23.126 muslim di Australia merupakan kelahiran Turki. Pada waktu yang berdekatan pula, beberapa muslim asal Yugoslavia dan Albania mencari suaka politik ke dataran Australia ini (Nurdin, 2000: 56).

Pada 1960-an, para imigran muslim Bosnia dan Kosovo tiba di Australia. Mereka memiliki sumbangsih yang cukup besar dalam membangun peradaban modern di Australia melalui peran mereka dalam pembangunan Skema PLTA Snowy Mountains di New South Wales. Kemudian, para imigran Lebanon yang notabene adalah muslim berdatangan mencari suaka politik ke Australia lantaran pecahnya perang saudara di Lebanon pada 1975. Lonjakan imigran asal Lebanon ini berhasil meningkatkan jumlah muslim di Australia sebanyak 147.487. Dan keberadaan mereka di Australia mencapai 17% dan mampu melampaui jumlah imigran Turki yang hanya 15%.

Tahun-tahun berikutnya, jumlah penduduk Muslim di Australia terus mengalami perkembangan demografis yang beriringan dengan meningkatnya para imigran luar yang datang dari Afrika seperti Somalia, Ethiopia, dan Eritrea. Menurut Sensus 2006, tercatat 7.542 Muslim Australia kelahiran Bosnia dan Herzegovina dan 30.287 kelahiran Lebanon sehingga secara keseluruhan jumlah muslim di Australia mencapai 340.000. Jumlah yang besar tersebut terbagi menjadi dua yakni 128.904 lahir di Australia dan sisanya berasal dari luar negeri. Selain imigran dari Lebanon dan Turki, negara asal Muslim lainnya seperti Afganistan (15.965), Pakistan (13.821), Banglades (13.361), Irak (10.039), dan Indonesia (8.656) juga berdatangan ke Australia.[1] Kurang dari satu abad, eksistensi muslim Australia semakin masif dan nyata serta menampilkan

[1] https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/muslim_di_australia.html (diakses pada 03 Agustus 2021)

gambaran yang sangat majemuk sebab mereka berasal dari beragam budaya dan bangsa.

C. Populasi dan Demografi Islam

Berdasarkan sensus 2016, umat Islam dari berbagai afiliasi adalah minoritas. Dari total populasi sekitar 25 juta (estimasi 2022), Islam hanya berjumlah sekitar 604.200 (2,6%) berada di bawah Kristen (52,1%) dan bahkan Ateis (30,1%). Selain bahwa Australia adalah negara tanpa agama resmi, negara kangguru ini juga dikenal sebagai negara dengan pemeluk agama yang rendah. Konstitusi Australia melarang pemerintah federal membuat undang-undang apa pun untuk mendirikan agama apa pun, memaksakan ketaatan beragama apa pun, atau melarang kebebasan menjalankan agama apa pun. Diprediksi pada 2050, populasi Kristen Australia akan mengalami penurunan hingga 47%. Sebaliknya, pada 2050, populasi umat Islam di negara-negara yang menerapkan kultur kulit putih seperti Australia, akan mengalami peningkatan demografis sampai dengan 50% (Pew, 2015: 235).

Masa-masa pembentukan basis populasi Muslim di Australia dimulai sejak 1960-an hingga 1970-an. Hal ini diawali dengan persoalan domestik berupa minimnya tenaga kerja dan persoalan internasional berupa ancaman penjajahan tentara Jepang ke kawasan Asia Tenggara. Situasi dan kondisi yang mendesak ini mendorong pemerintah Australia segera mempercepat pertambahan populasi yang berorientasi pada penguatan pertahanan nasional jangka panjang serta dapat memperkuat proses industrialisasi yang sedang berlangsung (Stevens, 1993: 52).

Pada 1960-an, banyak Muslim berdatangan ke Australia dengan jumlah yang besar, kurang lebih 10.000 jiwa, khususnya dari Turki. Imigrasi internasional ini terjadi lantaran pemerintah Australia terikat dalam perjanjian diplomatik dengan Turki. Sepuluh tahun kemudian, ratusan Muslim Lebanon mencari suaka politik ke Australia lantaran perang saudara yang memanas, disusul kemudian dengan Palestina. Pasca pengungsian tersebut, di tahun-tahun

berikutnya, muslim berdatangan ke Australia dari berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, India dan Bangladesh. Para imigran membuat jumlah populasi masyarakat Australia meningkat dua kali lipat dibanding setelah Perang Dunia II (Nurdin, 2009: 2).

Sebagian besar komunitas muslim yang tumbuh di Australia adalah imigran yang berasal dari berbagai negara Timur Tengah seperti Afganistan, Lebanon, Mesir, Irak dan Turki (Kartini, 2018: 91-92). Bahkan, Abdullah Saeed menyatakan bahwa muslim Australia berasal dari 70 negara yang berbeda. Dalam bukunya, *Islam in Australia* disebutkan Timur Tengah, Rusia, Eropa, Anak Benua India, Afrika, Asia Tenggara bahkan Cina. Keberagamaan ini dapat diidentifikasi melalui bahasa mereka. Muslim Australia berbicara melalui ragam bahasa mulai dari Bahasa Inggris, Arab, Turki, Persia, Tamil, Jerman, Malta, Rusia, Spanyol dan sebagainya. Akan tetapi, mayoritas Muslim Australia menggunakan Bahasa Inggris, sedangkan bagi bahasa kedua yang banyak digunakan—Muslim keturunan Timur Tengah—adalah Bahasa Arab (Saeed, 2003: 1)

Dari paparan di atas jelas bahwa komunitas muslim di Australia didominasi oleh kaum imigran dari berbagai negara. Sebagian besar kelompok muslim tersebar dari wilayah-wilayah urban (ibukota negara bagian) seperti Brisbane, Adelaide, Perth, Darwin, Sydney, Melbourne dan Canberra, ibukota Australia (Safei, 2017: 56). Dan dalam kesehariannya, para imigran muslim ini mengalami kesulitan saat berinteraksi dan berbaur dengan masyarakat non-muslim lantaran perbedaan nilai-nilai sosial yang diadopsinya. Pembahasan tentang adaptasi sosial umat Islam di Australia akan diuraikan pada sub-bahasan selanjutnya.

D. Corak Keagamaan dan Organisasi Islam

Kehadiran komunitas muslim merupakan salah satu faktor utama yang mengubah komposisi demografis dan politik negara Australia. Sejak dihapuskannya *the white australian policy* (1901-1975), multikulturalisme tumbuh subur di Australia. Negara

ini menjadi rumah bersama bagi berbagai manca etnis, budaya, dan agama.

Bagi komunitas muslim sendiri, masjid menjadi sentral aktivitas keagamaan di Australia. Pada 1861, masjid pertama didirikan di Marree yang terletak di sebelah utara Australia Selatan. Kemudian disusul dengan didirikan masjid agung di Adelaide pada 1890 dan di Broken Hill (New South Wales) pada 1891. Uniknya, keberadaan masjid di Australia diklasifikasikan berdasarkan ikatan kebangsaan. Di Australia terdapat masjid khusus bagi orang muslim keturunan Bangladesh. Begitu pula dengan orang-orang muslim yang berasal dari Pakistan, Arab dan Iran yang beraliran Syiah, mereka memiliki masjid yang terpisah. Klasifikasi berdasarkan kebangsaan ini menunjukkan bahwa muslim dari setiap negara tersebut memiliki perbedaan pola dan keragaman interpretasi dalam melaksanakan ritual keislamannya.

Di Australia, khususnya di negara bagian Victoria, eksistensi komunitas Islam berkembang dengan cukup baik. Rata-rata, komunitas tersebut dimobilisasi oleh para mahasiswa muslim yang datang dari Indonesia. Komunitas Islam Indonesia di Victoria di antaranya *Indonesian Muslim Community of Victoria* (IMCV), *Monash Indonesian Islamic Society* (MIIS), Komunitas Pengajian Brunswick dan sebagainya. Sementara di Kota Sydney, berdiri pula komunitas pengajian yang digagas oleh muslim Indonesia seperti Pengajian Iqro dan Pengajian Dompet Dhuafa. Bahkan di jantung Australia, Ibukota Canberra, komunitas muslim Indonesia menyelenggarakan dakwah keagamaan seperti Khataman Canberra, Pengajian Keluarga, dan *Islamic Society Foundation of Australian Capital Territoy* (Safei, 2017: 11).

Secara internal, corak Islam komunitas muslim di Australia sangat beragam. Ada beberapa mazhab Islam yang eksis dalam komunitas muslim Australia. Menurut *Pew Research* (2015: 39) populasi muslim yang beraliran Syiah kurang dari 10% di Australia. Tidak hanya itu, penduduk peranakan muslim Turki yang menetap di Victoria dan New South Wales, terutama di Melbourne dan

Sydney, hampir 90% menganut mazhab Sunni (Saeed, 2003: 9). Bahkan, komunitas muslim dalam skala yang lebih kecil seperti aliran Syiah Isma'iliyah dan Ahmadiyah baik yang berasal dari Lahore maupun Qadian juga ada di Australia. Keragaman dalam tubuh komunitas muslim di Australia direpresentasikan oleh gaya, intensitas ritual keagamaan, corak penafsiran terhadap sumber-sumber Islam dan cara interaksi sosial mereka dengan komunitas non-muslim (Nurdin, 2009: 176).

Untuk melindungi dan mengayomi berbagai etnis muslim di Australia, para pemimpin kelompok komunitas membentuk sebuah perserikatan mulai dari tingkat negara bagian sampai negara federal. Pada tingkat federal ada *The Australian Federation of Islamic Councils* (AFIC) dan pada tingkat negara bagian terdapat *The Islamic Council of Victoria.* AFIC merupakan organisasi yang menjembatani aspirasi dan suara komunitas muslim di tingkat negara federal. Di sisi lain, ia juga berfungsi membantu pendanaan dan memfasilitasi berbagai kebutuhan umat Islam Australia. Organisasi ini dibiayai oleh dukungan masyarakat lokal, negara-negara muslim penghasil minyak dan hasil dari penerbitan sertifikat halal (Nurdin, 2009: 3)

Pada 1978, *Regional Islamic South East Asia and Pacific* (RISEAP) dibentuk, dengan tujuh organisasi nasional termasuk Australia. Organisasi telah memainkan peran penting dalam penyatuan dan pelengkap pada isu-isu yang menyangkut komunitas Muslim yang ada di Asia Tenggara dan Pasifik. Keberadaan RISEAP ini berdampak pada perkembangkan dakwah Islam di Australia. Untuk menebarkan dakwah Islam dan meng-*counter* persepsi sinis terhadap agama Islam, komunitas muslim Australia mengembangkan media khusus seperti radio dan surat kabar sebagai basis edukasi dan mengenalkan Islam kepada publik. Misalnya, setiap bulan Ramadhan, *Ethic Radio* secara masif menyajikan dakwah dan pengajian Islam. Bahkan muslim Australia memiliki dua surat kabar terkemuka yakni *Australian Muslim Times* (AMUST) yang diluncurkan pada Januari 1991 dan *Australian Islamic Media* (AIM). Di sisi lain, umat Islam Australia memiliki

kanal-kanal *podcast* islami seperti *Voice of Islam, Islamic Cultural and Information Network* (Mutalib & Hashmi, 1996: 329- 330).

Perkembangan komunitas, organisasi, dan media Islam beriringan dengan tumbuhnya lembaga pendidikan Islam di beberapa negara bagian Australia. Di New South Wales terdapat *al-Noori Muslim Primary School, Malek Fahd Islamic School, Noor al-Houda Islamic School, Qibla College, dan King Abdul Aziz College*. Beberapa pendidikan Islam juga tumbuh di Victoria seperti *Werribe College, Darul-ulum College of Victoria, King Khalid Islamic College, Coburg Primary Campus*. Di Queensland terdapat *Brisbane Muslim School* dan *Islamic School of Brisbane*, sedangkan di South Australia terdapat *Islamic College of South Australia* dan *Al-Hidayah Islamic School* berada di Western Australia. Berikut tabel jumlah pendidikan Islam di Australia (Nurdin, 2009: 165).

Tabel: Sekolah-sekolah Islam

KAWASAN	1982-1989	1990-1995	1996-2000
Kawasan Ibukota	0	0	0
Australia	3	1	6
New South Wales	0	1	0
Queensland	0	0	1
Australia Selatan	0	0	0
Tasmania	2	2	3
Victoria	1	2	1
Australia Barat	6	6	11

Di tengah kehidupan liberal dan masyarakat non-Islam, masyarakat Islam membutuhkan peran komunitas Islam untuk melindungi hak-hak mereka dan menjamin eksistensi mereka di Australia. Pada abad 20, komunitas muslim mulai bermunculan yang menandakan kebangkitan Islam di Australia. Perkembangan awal organisasi Islam Australia dibangun atas dasar ikatan kebangsaan (kesukuan) yang bersifat lokal. Saat itu, belum ada organisasi Islam yang menasional. Misalnya, orang Turki berkelompok dengan sesama muslim Turki yang kemudian mendirikan masjid

berdasarkan tradisi Turki. Pada 1961, Imam Ahmad Saka—pemimpin komunitas Islam di Adelaide—mengajukan permintaan untuk penyelenggaraan pernikahan sesuai ajaran Islam sebagaimana umat Kristen menjalankan ajarannya, akan tetapi permintaan ini ditolak oleh Federal Australia (Kettani, 2017: 320).

Penolakan ini merupakan pukulan terhadap komunitas muslim imigran baru. Pasca penolakan, ada sepuluh komunitas muslim yang terorganisir di Adelaide, Melbourne, Shapperton, Sydney, Brisbane dan Mareeba. Mereka melakukan pertemuan umum pada April 1963 dengan perwakilan setiap organisasi untuk membahas penghinaan tersebut. Dari pertemuan ini, Federasi Perkumpulan Islam Australia dibentuk, kemudian mengalami perubahan nama menjadi Federasi Dewan Islam Australia pada 1975. Setiap negara bagian dan wilayah Australia sekarang membentuk dewan Islam dan setiap dewan membentuk sejumlah komunitas muslim. Beberapa organisasi muslim penting yang eksis di Australia di antaranya:

1. *Australian Federation of Islamic Council* (AFIC)

AFIC dibentuk pada 1976. Organisasi Islam ini bersifat nasional. AFIC bertujuan untuk melayani dan melindungi komunitas muslim Australia dari segala bentuk diskriminasi di mana semua orang akan diberdayakan untuk memenuhi potensi yang dimiliki dan memperkaya komunitas mereka. Organisasi ini mengusung misi untuk mengadvokasi muslim yang tertindas dan lemah, membangun jalur dan peluang bagi pemuda muslim untuk mencapai kesuksesan, memberikan pelayanan terhadap komunitas muslim yang tersebar di negara-negara bagian, dan mengedukasi kepada muslim dan non-muslim mengenai ajaran Islam yang *rahmatan lil'alamiin*.

Presiden dan wakil presiden AFIC dipilih setiap dua tahun oleh Dewan Islam. Presiden pertama AFIC adalah Dr. Abdul asal India dengan masa bakti 1976-1978. Saat ini presiden AFIC adalah Dr Rateb Jneid, seorang pengacara yang berkualifikasi di Australia Barat. Di luar Hukum, keahliannya meliputi berbagai bidang bisnis,

pendidikan, bangunan dan konstruksi, pembagian tanah dan impor dan ekspor. Terutama, ia melayani di berbagai organisasi masyarakat, sekolah dan dewan kelembagaan.

Akan tetapi, keberadaan AFIC menuai kritik dari komunitas Islam Australia sendiri. Organisasi ini dinilai sebagai kaki tangan pemerintah Australia untuk melakukan kontrol politik dan sosial terhadap aktivitas sosial-keagamaan masyarakat muslim di Australia. Secara internal, AFIC hanya didominasi oleh mazhab Islam tertentu saja seperti Sunni. Dukungan pemerintah Australia terhadap pembentukan AFIC hanya didominasi oleh kepentingan politik dan keamanan semata daripada motif sosiologis yakni ke arah persatuan masyarakat Islam Australia (Safei, 2017: 59).

2. *Australian Federation of Muslim Student Associations* (AFMSA)

Berdasarkan Arsip Nasional Australia, eksistensi mahasiswa Muslim mulai mapan di kampus-kampus Australia pada awal tahun 1950-an. Namun, afiliasi mereka tidak selalu didasarkan pada ikatan keagamaan. Mereka kemudian membentuk asosiasi berdasarkan kedekatan sosial budaya antara mahasiswa internasional. Pada 1964, mahasiswa muslim ini membentuk *Muslim Student Association of the University of Queensland* (MSAQ). Empat tahun kemudian, terobosan ini berhasil membentuk sebuah komunitas pelajar Islam bernama yang kemudian dikenal sebagai *Australian Federation of Muslim Student Associations* (AFMSA) pada 1968 (Ansari, 2018: 105-106).

Berdirinya AFMSA ini mendapat respons positif dan dukungan dari Federasi Dewan Islam Australia. Meskipun AFIC mendukung AFMSA, tetapi organisasi ini tetap mempertahankan independennya. Dalam perkembangannya, AFMSA banyak melakukan afiliasi sosial dengan masyarakat Islam non-pelajar yang ada di Australia. Organisasi AFMSA ini dibentuk untuk menampung dan mewakili aspirasi mahasiswa Islam yang ada di Australia. Di sisi lain, organisasi ini berorientasi membangun kerja sama antara asosiasi mahasiswa internasional. Ditambah, AFMSA ingin mendorong tumbuhnya pengajaran, publikasi, dan penelitian

tentang ajaran dan budaya Islam di kalangan mahasiswa. Untuk mencapai hal itu, organisasi ini pun mengadakan konferensi, kajian, forum tahunan di seluruh Australia. Keberadaan AFMSA ini mendorong bersatunya mahasiswa muslim di Australia dan mendorong aktivisme sosial konstruktif terhadap pengembangan umat Islam di Australia (Ansari, 2018: 106).

3. *Moslem Women's Center* (MWA)

Pada awal 1980-an para wanita Muslim Australia mulai berpartisipasi aktif dalam komunitas Muslim. Perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan sebelumnya telah terlibat di universitas masing-masing, dan perempuan muda Muslim telah terwakili di berbagai kamp pemuda sejak 1974. Namun, belum ada kelompok khusus bagi kaum perempuan muslimah Australia. Dan secara umum, perempuan Muslim selalu tidak terwakili dalam komite umum. Pada 1981, "Mu'minah" dibentuk oleh komunitas muslimah di Sydney. Kegiatan utamanya adalah membentuk kelompok *Usroh* regional setiap bulan untuk mendidik wanita di masyarakat. Mu'minah juga menerbitkan buletin untuk wanita Muslim dan menyelenggarakan kursus jangka pendek tentang Islam untuk pria dan wanita (Mutalib & Hashmi, 1996: 325).

Sayangnya, organisasi ini belum mendapatkan legalisasi dari pemerintah negara bagian dan tidak memiliki kontribusi dalam membantu program pemerintah. Tahun 1982 menjadi tahun yang penting bagi wanita Muslim Lebanon di Sydney. Seorang Imam tiba di Lakemba, Sydney, mengadvokasi hak-hak perempuan Muslim dan mendukung pembentukan organisasi bernama *Muslim Women's Association* (MWA). Sejak saat itu, MWA telah memberikan dampak yang luar biasa pada kehidupan wanita Muslim di Australia. Organisasi ini menjadi asosiasi terdaftar secara resmi dan telah diakui oleh pemerintah Australia. Pada Oktober 1992, diselenggarakan Konferensi Wanita Muslim Nasional pertama, yang berusaha mendidik kaum wanita menjadi penyedia layanan

bagi pemerintah Australia dan organisasi masyarakat (Mutalib & Hashmi, 1996: 106).

Konferensi tersebut memutuskan untuk membuat organisasi wanita muslim nasional. Sejak kehadiran MWA, sejumlah organisasi Muslimah mulai bermunculan di berbagai negara bagian Australia. Pada awalnya, komunitas Muslimah berada di pusat kota tidak melakukan komunikasi dan interaksi yang intens dengan komunitas Muslimah yang eksis di negara bagian. Jaringan Nasional Wanita Muslimah di Australia mulai terorganisir secara sistemis pada Juli 1992. Secara umum, MWA ini mempunyai misi pemberdayaan terhadap kaum Muslimah di Australia, khususnya dalam dunia pendidikan.

E. Multikulturalisme dan Toleransi Beragama

Secara sosial, kehidupan muslim di Australia bersifat fluktuatif. Artinya, umat Islam tidak mengalami tekanan dan penindasan yang permanen dari kelompok non-Islam di Australia. Menurut Indriana Kartini, ada beberapa hal yang mempengaruhi relasi sosial masyarakat muslim dengan masyarakat non muslim di Australia, yakni dilihat dari kuantitas kelompok keagamaan, tidak adanya *overlapping* antar agama yang berbeda, tidak adanya *ghettoisasi*, dan tidak adanya politisasi atas perbedaan identitas yang ada. Sejak kedatangan para imigran internasional dari Timur Tengah, komunitas Islam berkembang secara pesat (Kartini, 2018: 92).

Multikulturalisme di Australia sering dianggap sebagai model yang baik dan sukses dibanding dengan liberalisme Inggris dan *laicite* politik Perancis. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap kewarganegaraan dan imigrasi menampakkan sebuah inkonsistensi dalam penekanan terhadap multikulturalisme sebagai kekuatan ekonomi, atau sebagai identitas nasional, atau sebagai strategi pemerintah Australia untuk mengintegrasikan etnis minoritas ke dalam kebudayaan dominan yakni *Anglo-Saxon* (kulit putih). Berdasarkan laporan, pada 1978 menyatakan bahwa multikulturalisme memiliki dampak positif bagi masyarakat

Australia sendiri dan pembangunan nasional (Akbarzadeh dan Mansouri, 2007: 72).

Australia menjadi salah satu negara dengan keberagaman budaya paling besar di dunia. Banyak agama monoteis yang hidup dan berkembang di sana. Kebebasan dalam menjalankan ritual keagamaan dilindungi dan dijamin oleh konstitusi Australia. Jaminan sosial ini yang membuat keberadaan Islam di Australia berkembang dan aktif melakukan kegiatan. Namun, relasi sosial antara komunitas muslim dan komunitas non-muslim tidak selamanya berjalan mulus. Sejak peristiwa 11 September 2001 dan Bom Bali—beberapa korban adalah warga Australia yang berlibur—islamofobia tumbuh dalam pikiran masyarakat Australia. Pasca peristiwa tersebut, warga muslim di Australia, khusus umat Islam Indonesia mendapatkan sorotan dan ancaman yang cukup menakutkan.

Sejak dua peristiwa besar itu, ketakutan terhadap hadirnya Islam di Australia meningkat. Hal ini ditandai dengan adanya rancangan undang-undang anti-terorisme yang dibuat oleh pemerintah Australia. Islamofobia bertanggungjawab untuk mencari justifikasi keagamaan di tengah posisi yang eksklusif. Hakikatnya dalam dunia demokrasi Australia, tidak ada persaingan agama yang bersifat konfrontatif dan terbuka. Namun, umat Kristen—sebagai mayoritas—memiliki suara politik yang kuat dan signifikan di Australia. Suara-suara mereka berhasil membentuk opini publik mengenai Islam sebagai ancaman bagi demokrasi. Meskipun demikian, kalangan Kristen non-birokrat mengambil sikap dan respons yang beragam terhadap keberadaan agama lain termasuk Islam yang tergolong baru di Australia (Briksman, 2018: 11).

Pada gilirannya, keberadaan Islam dilihat sebagai entitas yang berbahaya dan mengancam *status quo* komunitas kulit putih yang masih mengadopsi budaya Anglo-Saxon. Akibatnya, muncul kebijakan *White Australia Policy* pada 1901 yang membatasi perkembangan komunitas Islam dan melarang orang selain kulit putih tinggal di Australia. Kebijakan ini berhasil mengurangi

jumlah kedatangan imigran dari Timur Tengah. Namun, lima dekade kemudian, undang-undang tersebut direvisi pada 1958 dan secara total dihapus pada 1972. Sejak itu, komunitas Islam semakin bergeliat kembali seiring dengan kehadiran banyak para imigran Timur Tengah.

Kebijakan pemerintah federal Australia terhadap minoritas muslim berlaku dalam dunia politik yang dikuasai oleh dua kekuatan dominan yakni gerakan konservatif (Kristen) dan gerakan progresif. Kedua kelompok berkuasa tersebut mengasosiasikan nilai-nilai liberalisme dan prinsip sekularisme ke dalam praktik pemerintahan. Kedua asas ini memosisikan komunitas muslim sebagai objek internalisasi nilai-nilai liberal dan peradaban Barat. Kedua kekuatan politik tersebut selalu melihat komunitas muslim sebagai komunitas yang tidak mengunggulkan identitas keagamaan dalam pergaulan kemasyarakatan (Kartini, 2018: 93). Artinya, kedua kekuatan tersebut melihat multikulturalisme yang hidup sebagai koleksi budaya, dan bukan sebagai koleksi cita-cita kelompok sosial beragama. Keduanya juga menegasikan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan politik di Australia dan digantinya dengan kedaulatan masyarakat Australia.

Terlepas dari kritik dari kelompok konservatif, multikulturalisme di Australia memberikan kesempatan bagi tumbuhnya identitas bagi komunitas muslim. Keberadaan orang muslim menyebar di berbagai aspek profesi, lapangan pekerjaan dalam beragam tingkat pendidikan, kesempatan dan dorongan untuk memajukan mobilitas sosial namun kesetiaan terhadap etnik masih dipelihara. Komunitas muslim Australia terus bergerak melakukan penyesuaian diri dengan budaya dominan yang ada. Dalam kurun waktu kurang dari 40 tahun, komunitas muslim di Australia berhasil menciptakan struktur sosial dan kemasyarakatan untuk mendukung suatu cara hidup yang islami. Tegaknya masjid-masjid megah dan adanya pendidikan Islam menjadi sarana untuk melakukan ritual keagamaan dan merayakan identitas keislaman mereka.

Nyata, aktivitas keagamaan dan sosial umat Islam Australia di masjid diberikan peluang yang sangat besar dan dijamin keamanannya oleh pemerintah Australia. Nilai-nilai toleransi dapat dilihat dan diukur dari mudahnya ditemukan berbagai pendidikan Islam dan masjid-masjid megah yang didirikan di berbagai kota, khususnya di New South Wales dan Victoria. Secara konkret, akomodasi pemerintah terhadap umat Islam tampak pada dukungannya terhadap pendirian dan peresmian masjid. Kasus ini dapat dilihat pada peresmian masjid terbesar di Preston, Victoria yang disaksikan secara langsung oleh wakil pribadi Perdana Menteri Malcolm Frases dan *Archbishop* Roma Katolik Roma Melbourne (Nurdin, 2009: 3). Realitas sosial dalam masyarakat Australia kurang lebih menggambarkan iklim keagamaan yang relatif toleran dan terbuka, ketimbang negara-negara maju lainnya.

Kebijakan multikulturalisme di Australia mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Pada 1975, Pemerintah Edward Whitlam membuat undang-undang mengenai diskriminasi rasial *(the racial discrimination act).* Memasuki masa pemerintahan Malcolm Fraser, asas multikulturalisme menembus kehidupan politik. Frases menekankan hak atas identifikasi budaya sebagai sesuatu yang esensial untuk menjamin keberhasilan kebijakan-kebijakan multikultural dan program-program politiknya sehingga pada gilirannya akan terbangun masyarakat Australia yang kohesif. Hal ini memberi pengaruh kepada perekatan konsep multikulturalisme ke dalam sistem politik. Pemerintahan Hawke pada 1985, konsep multikulturalisme memasuki masa perluasan dengan memasukkan hak-hak sosial dan ekonomi kaum imigran yang kemudian ditambahkan hak-hak mereka untuk mengidentifikasi kebudayaannya (Nurdin, 2009: 80-81).

Pada 1989, Pemerintah Buruh Federal Australia mendeklarasikan prinsip-prinsip multikulturalisme yang terdiri dari tiga unsur utama. Pertama, identitas kultural yang menjamin hak semua orang Australia dalam batas-batas tertentu untuk mengekspresikan dan memberlakukan warisan kebudayaan pribadi

mereka, termasuk bahasa dan agama mereka. Kedua, keadilan sosial yang berarti hak semua orang Australia untuk perlakuan dan kesempatan yang sama, dan pembuangan batas-batas ras, etnis, budaya, agama, bahasa, gender, atau tempat kelahiran. Ketiga, efisiensi ekonomi yang berarti kebutuhan untuk memelihara, mengembangkan, dan menggunakan secara efektif keahlian-keahlian dan bakat-bakat semua orang Australia tanpa melihat latar belakangnya (Nurdin, 2009: 78).

Perkembangan multikulturalisme Australia dapat dilihat melalui dua tahap. Tahap pertama, penekanan pada keanekaragaman budaya. Pada tahap ini, multikulturalisme menekan pentingnya pemeliharaan budaya dengan mempertahankan warisan budaya dan menghargai tradisi-tradisi budaya yang beragam. Fase pertama perkembangan multikulturalisme Australia dapat dilihat pada periode Pemerintahan Whitlam, Fraser Hawke. Tahap kedua, perkembangan multikulturalisme memasukkan dimensi keadilan sosial. Multikulturalisme tahap kedua ini memberikan kemerdekaan atas perorangan dan juga keadilan sosial bagi semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakangan budaya, ras, etnis dan agama. Singkatnya, pada fase ini semua masyarakat Australia baik muslim ataupun non-muslim memperoleh akses pelayanan yang sama dan kebebasan politik. Pada 1986, laporan akhir dari *The Australian Institute for Multicultural Affairs*, membuat sederet rekomendasi mengenai pemberian pelayanan termasuk permukiman awal, penyediaan sarana informasi, kesejahteraan sosial, dan lapangan kerja bagi semua masyarakat Australia (Nurdin, 2009: 78). Perkembangan ini menunjukkan bahwa multikulturalisme di Australia terus-menerus mengalami penyempurnaan agar cita-cita integrasi sipil dapat terwujud secara nyata dalam masyarakat Australia yang tidak homogen.

F. Integrasi, Diskriminasi, dan Tantangan Radikalisme

Pada 1980-an, pemerintah John Howard mendeklarasikan gagasan Australia bersatu. Deklarasi ini telah bergerak lebih jauh

dari kebijakan multikulturalisme yang tegak di Australia. Dari sini pemerintah Australia bergerak lebih jauh dari kebijakan multikulturalisme tahun 1980-an menuju "integrasi sipil" (Akbarzadeh dan Mansouri, 2007: 73). Namun kebijakan ini mendapat komentar yang kritis dari kelompok liberal yang menyatakan bahwa multikulturalisme di Australia, realitasnya jauh dari upaya pelestarian perbedaan budaya dalam demokrasi liberal. Sebaliknya, multikulturalisme Australia justru telah mengisolasi dan mengucilkan etnis minoritas dengan melembagakan perbedaan dan pemisahan mereka. Multikulturalisme Australia mendapat kritik lantaran hanya berfokus pada penguatan identitas budaya semata dan mengabaikan masalah mendasar dari marginalisasi ekonomi dan politik dan eksploitasi para imigran (Akbarzadeh dan Mansouri, 2007: 73).

Sebagai bagian dari tradisi Eropa, Australia melihat dirinya dibangun atas gagasan "satu bangsa yakni Australia, satu etnis yakni *Anglo-Celtic* dan satu agama yakni Kristen". Deklarasi resmi Australia tentang multikulturalisme menjadikan kesetaraan, kebebasan dalam memilih dan kemitraan menjadi fitur penting dalam membangun kehidupan sosial mereka. Akan tetapi, para imigran muslim dan masyarakat non-muslim melihat deklarasi integrasi John Howard dengan sudut pandang yang berbeda. Komunitas muslim melihat "integrasi" sebagai penerimaan masyarakat mayoritas terhadap budaya, tradisi dan nilai-nilai agama yang mereka anut. Sedangkan menurut kelompok mayoritas (masyarakat non-muslim), "integrasi" hanya menggemakan ideologi kelompok dominan yang menyiratkan bahwa kelompok mana pun yang menolak asimilasi budaya akan merusak keseimbangan sosial dan harmoni dalam masyarakat (Koug, 2016: 159).

Para imigran muslim mengalami gagap kultural saat berinteraksi dengan masyarakat Australia yang memiliki kekayaan budaya dan latar belakang yang berbeda. Menurut M. Amin Nurdin, tidak sedikit para imigran muslim ini mengalami trauma saat melihat diri mereka sebagai kelompok minoritas dan dipaksa

untuk mengadopsi nilai-nilai liberal dan berbagai budaya yang kontras dengan ajaran Islam. *Cultural shock* merupakan hal biasa yang dihadapi oleh semua pendatang di negara mana pun. Namun, ada sekelompok muslim lainnya yang bersikap konservatif terhadap nilai-nilai demokrasi liberal, kesetaraan gender dan liberasi keberagamaan yang berlaku di Australia.

Tumbuhnya pemikiran konservatif di sebagian imigran muslim ini disebabkan rendahnya pendidikan dan sosial-budaya mereka. Para kelompok konservatif ini menuntut formalisasi ideologi politik Islam dan sistem pengadilan syariat yang secara *de jure* dan *de facto* bertentangan dengan ideologi liberalisme dan multikulturalisme Australia (John & Saeed, 2002: 211). Kehadiran kelompok muslim konservatif ini menyebabkan suburnya stereotip di kalangan masyarakat Australia terhadap komunitas muslim yang eksis di pelbagai negara bagian. Tidak berlebihan, jika konservatisme Islam ini menjadi salah satu faktor yang memuncul konflik sosial dan diskriminasi sosial dalam masyarakat Australia.

Sejak peristiwa WTC pada 11 September 2001, sebagian besar dunia Barat termasuk pemerintah Australia membentuk undang-undang anti-teror dan mendefinisikan ulang tentang identitas nasional dan hak dan tanggung jawab warga negara. Semua kebijakan tersebut bertujuan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengelola komunitas muslim di Australia. Bersamaan dengan itu pula, sentimen anti-muslim, praktik-praktik rasisme, dan stereotip menimpa komunitas muslim di Australia. Masyarakat non-muslim Australia menganggap Islam sebagai ancaman, komunitas yang inferior dan orang lain *(The Other)* yang bukan bagian dari masyarakat Australia (Koug, 2016: 163).

Pada 13 September 2001, Komisi Hubungan Masyarakat New South Wales, mendirikan hotline telepon dwibahasa (Inggris-Arab) dimana seorang muslim Australia dapat melaporkan pengalaman pelecehan, penghinaan, atau diskriminasi. Pasca peristiwa WTC dan Perang Teluk, hotline mencatat 320 insiden antara 12 September dan 11 November 2001, dengan 43,4% merupakan serangan verbal,

17,5% diskriminasi atau pelecehan rasial, 13,2% serangan fisik, dan 5% kerusakan properti. Sekitar 53% dari pengadu adalah perempuan. Pada 2003-2004, *Human Rights and Equal Opportunity Commission* (HREOC) mengadakan survei di Sydney dan Melbourne (dua kota dengan populasi Muslim tertinggi) dari 142 responden Muslim dan menemukan sekitar 87% pernah secara pribadi mengalami rasisme, pelecehan, atau kekerasan sejak 9/11 dan 75% melaporkan bahwa mereka mengalami lebih banyak rasisme, pelecehan, atau kekerasan daripada sebelum 9/11 (Briksman, 2018: 23).

Pada 2020, Komisi Hak Asasi Manusia Australia melakukan survei nasional terhadap lebih dari 1000 muslim. Survei itu menunjukkan bahwa 80% persen muslim Australia mengalami perlakukan yang diskriminatif dan tidak menyenangkan. Tindakan ini merupakan reaksi atas penembakan (genosida) atas muslim yang terjadi di Masjid Al-Noor, Christchurch, Selandia Baru pada Maret 2019 lalu, yang dilakukan oleh seorang nasionalis kulit putih Australia. Diskriminasi yang menimpa muslim terjadi ketik berurusan dengan penegakan hukum dan tempat kerja. Meskipun demikian, muslim Australia sepakat dan mengafirmasi secara umum bahwa masyarakat Australia relatif ramah dan toleran terhadap umat Islam (Republika, 2021).

G. Kesimpulan

Islam memiliki sejarah yang cukup panjang di Australia. Perkembangan umat Islam semakin masif sejak pemerintah Australia membuka pintu bagi para imigran. Para imigran yang mayoritas berasal dari wilayah Timur Tengah datang ke Australia dengan beragam tujuan di antaranya mencari suaka politik, menjalin hubungan diplomasi, meningkat status ekonomi dan sebagainya. Para imigran ini kemudian melakukan adaptasi sosial-budaya dengan iklim sosial Australia yang didominasi oleh budaya kulit putih. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengalami *cultural shock* saat beradaptasi dengan nilai-nilai modern dan liberal yang mengakar di Australia.

Keberadaan muslim semakin kuat mengakar di Australia setelah dibentuknya sebuah komunitas nasional bernama AFIC (1976). Komunitas ini menjamin perlindungan terhadap hak-hak umat Islam di Australia. Lebih dari itu, pada 1989, komunitas muslim di negara bagian Australia mendapatkan peluang sosial-politik yang besar ketika kebijakan multikulturalisme mengalami tahap evolusi kedua yang mengusung spirit keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat Australia, termasuk para imigran. Kemudian, secara internal, komunitas Islam di Australia mengambil bentuk yang heterogen. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan masjid di Australia yang diklasifikasikan berdasarkan ikatan kebangsaan. Bahkan, umat Islam Australia tidak hanya menganut satu mazhab saja

Pasca peristiwa WTC (2001) dan Bom Bali (2002 & 2005), hubungan masyarakat muslim dengan non-muslim mengalami tantangan. Diskriminasi dan Islamofobia mulai menggerogoti kehidupan masyarakat Australia yang multikultural. Pemerintah pun merespons secara negatif atas tragedi terorisme tersebut dengan membuat rancangan undang-undang anti-terorisme. Meskipun demikian, Islam di Australia masih diberi kelonggaran dalam mengekspresikan keyakinannya. Umat Islam tetap mendapatkan kesempatan dalam ruang sosial dan politik yang mengindikasikan bahwa muslim mulai berhasil mengintegrasikan dirinya ke dalam budaya Australia. Berdirinya masjid-masjid, pendidikan Islam, adanya media massa Islam, dan tersebarnya umat Islam di beragam sektor pekerjaan adalah sederet bukti bahwa kehidupan sosial di Australia relatif lebih baik, terbuka dan toleran dibanding dengan negara-negara maju lainnya. Proses adaptasi dan akomodasi harus diperkuat secara kontinu oleh muslim di Australia agar Islam dapat menjadi kekuatan yang dapat menyongsong masa depan demokrasi Australia.

5

ISLAM DI AMERIKA SERIKAT

Amerika Serikat dikenal orang sebagai negara paling sekuler, tapi juga dikenal sebagai negara paling bebas (bagi individu) untuk mengekspresikan nilai-nilai keagamaannya. Oleh karena itulah, Islam di Amerika menarik untuk dikaji tidak hanya karena banyak orang Afro-Amerika yang masuk Islam, tapi juga karena keragaman Muslim dalam mengekspresikan keislamannya. Pergesekan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Barat juga menarik untuk dikaji yang sekaligus menjadi karakteristik Islam di Amerika. Bom WTC 2001 (9/11) yang diyakini banyak pihak sebagai ulah Al-Qaeda telah menjadikan Islamofobia semakin merebak di masyarakat di satu sisi, tapi di sisi lain juga justru menjadikan Islam sebagai obyek kajian ilmiah yang "menarik" bagi kalangan akademisi untuk melihat Islam secara lebih dekat.

Muslim di Amerika disebut sebagai minoritas karena memang jumlahnya yang relatif sedikit. Islam memang tidak memiliki basis historis maupun tradisi kuat di negara berpenduduk sekitar 330-an juta ini. Islam datang di Amerika mulai abad ke-16, dan kemudian menjadi agama yang dianut oleh banyak orang Afro-Amerika. Yang menarik adalah, banyak orang Afro-Amerika yang masuk Islam ketika mereka di penjara. Kondisi ini seakan membenarkan doktrin Marxis yang mengatakan bahwa agama adalah bagi orang-orang yang tertindas. Kasus Malcom X adalah salah satu dari sekian banyak orang berkulit hitam yang masuk Islam ketika dia di penjara dan kemudian menjadi tokoh Islam ketika di luar penjara.

Walaupun demikian, mayoritas Muslim di Amerika saat ini adalah para pendatang dari Asia, seperti dari Pakistan, India, & Arab.

A. Pendahuluan

Amerika Serikat, secara resmi bernama *United States of America* (USA), merupakan negara federasi yang terdiri dari 50 negara bagian yang berada di kawasan Amerika Utara. Secara geografis Amerika berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudera Atlantik di sebelah timur, Meksiko dan Gurun Meksiko di sebelah selatan, dan Samudera Pasifik di sebelah barat. Berdasarkan luas wilayahnya, Amerika menjadi negara terbesar keempat di dunia setelah Rusia, Kanada, dan Cina dengan populasi penduduk hampir mencapai 335 juta (estimasi 2022), terpadat ketiga di dunia setelah Cina dan India. Washington DC, disebut juga sebagai Distrik Washington, merupakan ibu kota Amerika sejak tahun 1790.

Dari segi komposisi penduduknya, Amerika menjadi salah satu negara yang paling heterogen di dunia baik dari segi etnis, ras/bangsa, dan agama. Pluralitas masyarakat ini salah satunya disebabkan karena faktor kedatangan para imigran dari berbagai penjuru dunia seperti Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Status Amerika sebagai negara maju, dengan mengembangkan berbagai industri modern dan terdepan di dunia, dan jaminan atas kebebasan dalam menentukan nasib di bawah prinsip demokrasi, menjadikan Amerika sebagai negara tujuan migrasi yang menjanjikan bagi banyak orang di berbagai negara di dunia. Oleh karenanya, tidak seperti Indonesia atau Cina di mana keragaman masyarakatnya tercipta dari banyaknya suku atau penduduk asli yang telah lama hidup di dalamnya, keragaman Amerika terbentuk dari keberagaman latar belakang para imigran yang datang ke negeri ini, baik pada masa lalu maupun masa kini.

Islam telah menjadi bagian integral dalam kehidupan Amerika. Agama ini telah masuk ke Amerika jauh hari sebelum Amerika berdiri pada abad ke-18 M. Keberagaman dalam praktik keislaman yang terjadi di Amerika tidak bisa terlepas dari para

pemeluknya yang berasal dari beragam latar belakang budaya dan tradisi keagamaan. Pasang surut kehidupan umat Islam di Amerika juga tidak terlepas dari isu-isu yang terjadi di dunia Islam seperti Perang Israel-Palestina 1967, Revolusi Islam Iran 1979, konflik di kawasan Timur Tengah, termasuk peristiwa pengeboman gedung WTC pada 11 September 2001. Selain itu, isu lain yang berkembang di dunia Amerika seperti Islamofobia turut mewarnai perjalanan umat Islam sebagai kelompok minoritas di negara tersebut.

B. Masuknya Islam di Amerika

Muslim di benua Amerika diperkirakan telah eksis setidaknya sejak abad ke-16 Masehi. Kehadiran komunitas Muslim awal di Amerika bukan berasal dari penduduk asli Amerika melainkan dari para budak yang didatangkan terutama dari kawasan Afrika. Sejumlah sejarawan mencatat bahwa sekitar sepertiga dari jumlah seluruh budak di Amerika merupakan Muslim. Richard Brent Turner menjelaskan bahwa budak Muslim di Amerika Serikat saat itu mencapai angka 40.000 jiwa dan di seluruh Amerika, meliputi Amerika Utara, Amerika Selatan dan kawasan Karibia, jumlahnya diperkirakan mencapai 3 juta jiwa.[1]

Esteban de Dorantes (Estevanico) atau Mustafa Azemmouri dikenal sebagai Muslim generasi awal yang datang ke Amerika. Esteban dalam sejumlah sumber disebut sebagai seorang budak Muslim asal Maroko yang dibawa ke Spanyol lalu dikirim ke Amerika. Diperkirakan dia mendarat di negara bagian Arizona dan New Mexico dalam rentang waktu 1527 sampai dengan 1539 M bersama para budak lainnya (Hammer dan Safi, 2013: 29). Lebih dari itu, beberapa catatan mengatakan bahwa Esteban dikenal secara luas karena dia berperan sebagai pemandu (*guide*) dan narahubung (*interpreter*) bagi para penjelajah dari Spanyol di kawasan Benua Amerika dengan penduduk asli Amerika (Núñez, 2020).

[1] Jennifer William, A Brief History of Islam in America dalam https://www.vox.com/2015/12/22/10645956/islam-in-america, diakses 22 Maret 2023.

Eksistensi Islam dalam sejarah Amerika juga tampak di dalam kata-kata dan tindakan dari para pendiri negeri Paman Sam ini. Thomas Jefferson, salah satu pendiri AS dan presiden ke-3, dikenal sebagai negarawan yang mengusulkan kebebasan beragama di negara tersebut. Saat menjabat sebagai legislator di negara bagian Virginia dia menuntut untuk diberikan kebebasan beragama kepada umat Islam yang olehnya disebut sebagai *Mahamdan*, selain kepada agama Yahudi dan kaum pagan. Selain itu, pada tahun 1788, di sebuah konvensi negara bagian di Carolina Utara, pada pasal VI UUD terdapat kalimat yang menyatakan bahwa "suatu hari dalam perjalanan empat atau lima ratus tahun seorang Muslim dapat menjadi presiden Amerika Serikat". Namun demikian, pasal ini kemudian diratifikasi.[2]

Kedatangan Muslim ke Amerika dalam jumlah besar terjadi pada pertengahan abad ke-19 Masehi. Selama masa akhir abad ke-19 M sampai dengan permulaan abad ke-20 M, banyak imigran dari *negara-negara di kawasan Timur Tengah terutama Syria dan Lebanon yang datang ke Amerika. Sebagian besar dari mereka adalah para pemuda yang tidak berniat untuk menetap di Amerika, melainkan mereka mengharapkan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengumpulkan penghasilan mereka lalu kembali ke negara asal untuk membangun rumah dan keluarga. Memang, pada masa-masa tersebut, sebagian besar imigran yang datang beragama Kristen (90%), tetapi juga terdapat sejumlah kecil yang beragama Islam.*

Sepanjang periode antara dua Perang Dunia I dan Perang Dunia II umat Islam di Amerika mulai berubah dari yang awalnya hanya sebagai warga yang tinggal sementara menjadi penduduk yang menetap dan, sebagai sebuah kelompok, mereka menjadi semakin mapan. Mulai banyak perempuan yang ikut suami mereka, dan terdapat upaya untuk memberikan pendidikan bagi anaknya termasuk pendidikan agama. GhaneaBassiri sebagaimana dikutip Jane I. Smith (2013) menyatakan bahwa periode ini juga titik awal

[2] *Ibid.*

perkembangan masjid dan tumbuhnya organisasi umat Islam terutama dari masyarakat berkulit hitam seperti gerakan *Nation of Islam*, *Moorish Science Temple*, termasuk gerakan dakwah dari kelompok Ahmadiyah.

Berdasarkan sejumlah sumber, aliran Ahmadiyah mulai mendakwahkan Islam di Amerika pada permulaan tahun 1920-an. Muhammad Sadiq, pendakwah terkemuka Ahmadiyah, mampu menarik simpati masyarakat Amerika dan para imigran dengan mengajarkan Islam sebagai agama yang tidak mengenal perbedaan ras dan warna kulit (*Islam as a race-blind religion*) yang diyakini dapat memecahkan masalah rasial di Amerika (Bassiri, 2012). Pada dekade yang sama, tepatnya pada 1925, Nobel Drew Ali, seorang Muslim Afrika Amerika, mendirikan Moorish Science Temple yang diresmikan di Illionis pada 29 November 1926. Berikutnya, pada 1930, Fard Muhammad mendirikan *the Nation of Islam* di Detroid. Beberapa pemimpin terkemuka dari gerakan ini yaitu Elijah Muhammad (bernama asli Elijah Poole) dan Malcom X di mana kedua tokoh ini berhasil mengantarkan gerakan Nation of Islam menjadi gerakan yang besar dan berpengaruh di Amerika pada dekade 1950-an dan 1960-an (Bassiri, 2013). Ketiga gerakan ini, yakni Ahmadiyah, Moorish Science Temple, dan *Nation of Islam* menjadikan Islam sebagai identitas baru terutama bagi Muslim berkulit hitam keturunan Afrika Amerika dan menjauhkan mereka dari identitas negro yang berkonotasi negatif.

Gelombang besar imigran berikutnya terjadi setelah Perang Dunia II. Jumlah mereka semakin membesar pada 1960-an yang disebabkan oleh sejumlah faktor mulai dari para mahasiswa yang *overstay* di Amerika, pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, para intelektual yang menginginkan kebebasan dalam menyuarakan pendapat, dan politisi dan rakyat dari berbagai negara yang ingin mendapatkan suaka politik atau melarikan dari konflik di negara asal. Jumlah pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim jumlahnya semakin bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan dari sensus penduduk warga pendatang

di Amerika diketahui bahwa pada 1960 pendatang dari negara mayoritas Muslim berjumlah 134.615 jiwa, lalu meningkat menjadi 174.223 jiwa pada 1970, 493.904 jiwa pada 1980, dan menjadi 871.582 jiwa pada 1990 (Bassiri, 294).

Sejarawan Kambiz Ghanea Bassiri dalam bukunya *A History of Islam in America* (2010) menyatakan bahwa komunitas Muslim di Amerika terdiri dari beragam latar belakang etnis, pendidikan, dan ekonomi. Pada abad ke-21 M, Amerika menjadi negara di dunia dengan komposisi umat Islam paling beragam di dunia. sebagian dari mereka berasal dari kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, Eropa, termasuk Amerika Latin dan penduduk asli Amerika. Mayoritas dari mereka merupakan imigran dan sebagian lainnya merupakan penduduk asli yang berkonversi ke dalam agama Islam. Oleh karenanya, dengan fakta tentang keberagaman ini, lanjut Bassiri, tidak diragukan lagi bahwa Muslim Amerika merupakan sebuah mikro kosmos dari populasi Muslim sedunia.

C. Populasi dan Demografi

Konstitusi Amerika Serikat menjamin penduduknya untuk beragama dan tidak ada aturan yang melarang atau mengatur agama. Oleh karena itu, agama apa pun ada dan subur di negara ini, termasuk yang tidak beragama (ateis). *Saat ini Islam menjadi agama terbesar ketiga di Amerika setelah Kristen dan Yahudi.* Dalam sebuah survei pada 2014 (Pew), data agama negara ini adalah sebagai berikut:

AGAMA	PERSENTASI
Kristen Protestan	46,5%
Katolik	20,8%
Ateis-Agnostik	22,8%
Yahudi	1,9%
Islam	**1,1%**
Hindhu	0,7%
Buddha	0,7%

Tentang populasi Muslim, *Pew Research Center* telah merilis sejumlah laporan tentang perkembangan populasi Muslim di

Amerika. Pada 2007 jumlah populasi Muslim di Amerika Serikat berkisar pada angka 2,35 juta jiwa (0.8%) dari jumlah seluruh penduduk Amerika. Pada 2011 jumlah ini meningkat menjadi 2,75 juta jiwa kemudian menjadi 3,45 juta jiwa pada 2017. Survei terakhir yang dilakukan pada 2020 menunjukkan bahwa jumlah populasi Muslim di Amerika Serikat telah mencapai angka 3,85 juta jiwa atau setara dengan 1,1% dari seluruh populasi Amerika (Pew, September 2021).

Perlu diketahui bahwa sampai saat ini belum ada laporan resmi tentang jumlah populasi Muslim di Amerika yang berasal dari lembaga resmi pemerintah Amerika. Oleh karenanya, terdapat sejumlah keragaman pendapat mengenai jumlah populasi tersebut. Penelitian dari *the Center for the Study of Global Christianity, misalnya, memperkirakan bahwa jumlah Muslim di Amerika pada 2015 sebanyak 4,4 juta jiwa (1,4% dari seluruh populasi Amerika) dan diprediksi akan mencapai angka 10 juta pada 2050. Sementara itu, sejumlah lembaga lainnya memperkirakan jumlah Muslim di Amerika berkisar antara angka 6 sampai dengan 7,5 juta jiwa yang terdiri dari beragam latar belakang seperti Muslim Arab, Latin, Asia, Eropa, Afrika, dan Afrika Amerika.*

Secara ras Muslim di Amerika merupakan kelompok keagamaan yang paling beragam dengan tanpa adanya ras yang mendominasi. Mereka terbagi menjadi 25% ras kulit hitam, 24% ras kulit putih, 18% Asia, 18% Arab, 7% campuran, dan 5% Hispanik. Muslim dewasa di Amerika yang lahir di luar Amerika sebagian besar didominasi oleh Muslim: 35% berasal dari Asia Selatan, 23% dari kawasan Asia Pasifik (seperti Iran, Indonesia dan lainnya), 25% berasal dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, 9% dari kawasan Sub Sahara Afrika, 4% dari Eropa, dan 4% lainnya dari berbagai wilayah di belahan benua Amerika (Pew, 2017).

Dominasi Muslim dari Asia Selatan di Amerika tersebut terjadi terutama setelah disahkannya UU tentang Imigrasi dan Kewarganegaraan tahun 1965. Muslim Asia Selatan yang bermigrasi pada periode ini memiliki perbedaan yang besar dengan

para Imigran Muslim dari kawasan negara-negara Arab baik dalam hal status sosio-ekonomi, keragaman asal negara, institusi, dan representasi Islam di masyarakat Amerika. Sebuah studi menyebutkan bahwa Muslim Arab lebih beragam secara sejarah negara asal mereka, meliputi Lebanon, Mesir, Syria, Palestine, Iraq, Yordania, Maroko (dan sebagian lainnya dalam jumlah kecil seperti Tunisia, Algeria, Libya, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Yaman, dan negara kawasan Teluk Persia lainnya). Sementara Muslim dari Asia Selatan lebih sedikit secara keragaman negara asal di mana sebagian besar mereka berasal dari Pakistan, Bangladesh, India, dan belakangan Afganistan. Namun demikian, Muslim dari Asia Selatan cenderung memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi ketimbang Muslim dari kawasan negara-negara Arab (Kamal: 2012: 68).

Bersamaan dengan semakin bertambahnya jumlah Muslim di Amerika ini beriringan dengan peningkatan jumlah masjid. Berdasarkan beberapa sumber masjid pertama di Amerika berdiri pada 1893 di Cairo Street di Chicago. Masjid ini menyerupai masjid Sultan Qayt Bey di Kairo yang melayani para pekerja dan Jemaah, termasuk imam, yang dengan masjid ini berusaha menjaga "tradisi asli" mereka dengan melaksanakan ibadah. Masjid tertua kedua didirikan di Highland Park, Michigan pada 1921. Tidak seperti masjid yang pertama, masjid ini seperti menunjukkan Islam bagi warga Amerika. Masjid lainnya yaitu The Mother Mosque of America yang dibangun pada 1929 dan selesai pembangunannya pada 1934 di Cedar Rapids, Iowa (Howell: 2009: 42-43).

Masjid di Amerika Serikat berkembang cukup signifikan. Pada 1994, terdapat 964 masjid, kemudian menjadi 1.209 (2000), berkembang menjadi 2.106 (2010), dan 2.796 masjid pada 2020 (Bagby, 2020; Mohamed, 2021). Secara statistik jumlah masjid pada tahun 2020 mengalami peningkatan sekitar 31% dari jumlah sebelumnya pada 2010. Dari jumlah tersebut diperkirakan 6% dari seluruh masjid di Amerika dikelola oleh Muslim Syiah, sementara lainnya berafiliasi dengan Sunni (Bagby, 2020). Negara bagian

dengan jumlah masjid terbanyak secara berurutan adalah New York (343), California (304), Texas (224), Florida (157), dan New Jersey (141). Dari sampel survei didapatkan bahwa 6% masjid diidentifikasi sebagai Syiah. Sedangkan masjid terbesar adalah Islamic Centre Amerika di Dearborn, Michigan yang telah dipugar pada 2005 sehingga bisa menampung 3.000 orang.

D. Karakteristik dan Corak keagamaan

Islam di Amerika Serikat tidak atau belum mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik Islam masih sangat dipengaruhi oleh karakteristik Islam sesuai dengan etnik masing-masing. Beberapa organisasi Islam, termasuk masjid, juga masih berdasarkan etnik masing-masing, walaupun ada beberapa organisasi Islam yang terbuka dan menerika Muslim dari berbagai etnik. Oleh karena itu, tidak bisa disangkal bahwa kelompok Syiah juga hadir di sini walaupun relatif sedikit dibanding dengan kelompok Sunni.

Arab Saudi yang kaya turut mewarnai keragaman corak Islam di Amerika dengan Wahhabinya. Dana yang melimpah dari negara tersebut banyak membantu pembangunan masjid-masjid di Amerika, termasuk pendanaan pelatihan para imam. Di samping itu, beberapa Muslim Amerika ikut aktif dalam berbagai organisasi Islam yang sudah mengglobal seperti Salafi, Ikhwanul Muslimin, Jama'ah Tabligh, Komunitas Muslim Ahmadiyyah atau Gerakan Ahmadiyyah Lahore, ataupun Nation of Islam-nya Louis Farrakhan. Asosiasi Muslim profesional juga berkembang dengan baik di Amerika Serikat.

Survei *Pew Research Center* pada 2017 menunjukkan hal yang menarik terkait kecenderungan corak ideologi Muslim di Amerika. Berdasarkan survei tersebut dinyatakan bahwa mayoritas umat Islam di Amerika memiliki pandangan keagamaan moderat (39%). Adapun yang mengarah kepada pandangan konservatif sebanyak 14% dan liberal sejumlah 20%. Sebagian kecil lainnya berpandangan sangat konservatif (7%) dan sangat liberal (11%). Secara politik, mayoritas

Muslim di Amerika lebih memilih Partai Demokrat (66%) dan hanya 13% yang memilih Partai Republik. Pada Pemilihan Presiden tahun 2016, 78% Muslim di Amerika menyatakan memilih Hillary Clinton, perwakilan dari Partai Demokrat, sementara pada 2008 suara mereka mencapai 92% yang menyatakan memilih Barack Obama.

Secara kultural, keberadaan masjid Amerika Serikat sedikit berbeda dengan di negara-negara mayoritas Muslim. Masjid di Amerika berfungsi tidak hanya tempat ibadah tapi juga pusat Budaya Islam dan bahkan ekonomi. Masjid adalah tempat berbagai kegiatan agama dan Budaya Islam bagi semua generasi, termasuk generasi muda. Tidak sedikit bahkan masjid tempat Muslim mudah mendapatkan bahan makanan halal termasuk makanan khas etnik mereka masing-masing.

Dalam hal kehadiran di masjid, data menunjukkan bahwa wanita Muslim dan pria Muslim Amerika menghadiri masjid pada tingkat yang sama (45% untuk pria dan 35% untuk wanita). Selain itu, jika dibandingkan dengan masyarakat umum yang melihat kehadiran layanan keagamaan, Muslim Amerika muda menghadiri masjid dengan tingkat yang lebih dekat dengan Muslim Amerika yang lebih tua. Sebuah studi Pew menemukan bahwa kehadiran perempuan di masjid-masjid Amerika meningkat dari 2011 hingga 2020, begitu pula partisipasi perempuan dalam administrasi masjid (misalnya dewan pengawas).

Kehidupan keagamaan Muslim di Amerika di tingkat akar rumput juga diperankan oleh organisasi-organisasi Islam. Bassiri (2014) menyebutkan bahwa setidaknya pada dekade 1990-an banyak berdiri organisasi sosial dan filantropi di tengah kehidupan Muslim Amerika. Mereka lebih memilih menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*buttom-up*) dengan lebih memperhatikan pada peningkatan kualitas umat Islam di Amerika. *Islamic Circle of North America* (ICNA), berdiri pada 1971, misalnya, mendirikan ICNA Relief (1994) yang berkonsentrasi pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pelayanan sosial kepada masyarakat Islam di seantero Amerika. Organisasi lainnya, *Muslim American Society*

yang berdiri sejak 1993, lebih berfokus pada pengembangan diri (*personal development*) melalui kurikulum pendidikan Islam dengan mempromosikan keterlibatan aktif dalam masyarakat di seluruh AS dalam aksi pengabdian masyarakat, dialog lintas agama, kepemudaan, dan bakti sosial. Terdapat juga *Inner-City Muslim Action Network* (IMAN), berdiri pada 1997, yang lebih berfokus pada pelayanan kesehatan, kesenian, dan kepemimpinan. Berbeda dengan dua organisasi sebelumnya, IMAN memberikan perhatian khusus kepada kelompok marginal terutama masyarakat non-kulit putih (*people of colour*) (Bassiri, 354).

Organisasi-organisasi Islam lainnya, termasuk *United Muslims of America* (UMA), *American Muslim Alliance* (AMA), *Council of American Islamic Relations* (CAIR), *Muslim Ummah of North America* (MUNA), dan *Muslim Public Affairs Council* (MPAC), sering menyelenggarakan dan memberikan dukungan dalam kegiatan lintas-iman terutama setelah peristiwa 9/11. UMA, misalnya, di dalam websitenya banyak menampilkan aktivitas lintas agama dengan menjelaskan bahwa Amerika sebagai satu bangsa, berusaha untuk menciptakan satu keluarga melalui toleransi dan saling memahami antar agama. Mereka mempromosikan kerukunan antar ras dan agama melalui organisasi keagamaan, memproyeksikan citra Amerika sebagai pemimpin dunia yang berpihak pada HAM bagi seluruh masyarakat (Haddad dan Harb, 224: 2014).

E. Diskriminasi, Islamofobia, dan Radikalisme

Orang-orang Islam yang bermigrasi ke Amerika pada dekade 1960-1980an telah membentuk pemahaman mereka sendiri terhadap Islam dan mendirikan rumah ibadah mereka. Mereka datang ke Amerika pada saat ketika, meskipun mereka menghadapi sejumlah prasangka buruk (*prejudice*) dan tekanan sosial lainnya, tidak menghadapi kendala hukum yang menghalangi partisipasi publik mereka di negara ini. sejumlah peristiwa penting di dunia Islam seperti Perang Arab-Israel 1967, Krisis minyak dunia pada

1970an, dan Krisis akibat revolusi Islam Iran, tidak membuat mereka mengalami kendala hukum terkait kewarganegaraan, hak kepemilikan atas properti, dan kehidupan publik mereka.

Perang Arab-Israel 1967 dan Krisis minyak pada dekade 1970, misalnya, telah menjadi faktor bagi meningkatnya *prejudice* terhadap masyarakat Arab. Ditambah dengan kebanggaan atas etnis dan meruaknya gerakan sosial di Amerika menjadikan banyak warga Arab-Amerika yang sebelumnya mengasosiasikan diri mereka sebagai kelompok kulit putih kemudian berpindah haluan dengan mengklaim diri mereka sebagai kelompok minoritas dan bergabung dengan gerakan-gerakan sosial yang ada. Hal ini terutama dialami oleh para mahasiswa keturunan Arab di berbagai kampus di Amerika. Di antara organisasi terkemuka dalam bidang ini yaitu *the Association of Arab-American University Graduates* (AAUG) yang berdiri pada 1967.

Pada 1980-an, Amerika mengumumkan tentang bahaya "fundamentalisme Islam" di Timur Tengah untuk membenarkan dukungan mereka kepada Irak dalam Perang Iran-Irak dan intervensi militer mereka di Lebanon. Militer Amerika, singkatnya, memberikan bantuan logistik dan finansial kepada "fundamentalisme Islam" di Arab Saudi dan Pakistan untuk membantu mereka membentuk gerakan perlawanan terhadap Rusia di Afganistan. Sementara para pejuang di Palestina disebut sebagai Muslim teroris, para pejuang di Afganistan ini disebut sebagai pejuang pembebasan (*freedom fighter*). Berikutnya, pada 1990-an, banyak dari para pejuang di Afganistan ini yang membentuk gerakan Al-Qaeda, gerakan militan Islam yang merancang serangan 11 September 2001, dan Taliban, organisasi Islam yang pemerintahan Afganistan dan melindungi Al- Qaeda.

Peristiwa 9/11 menjadi babak baru menguatnya Islamofobia di Amerika. Merespons peristiwa tersebut, Presiden George W. Bush mengumumkan tentang Perang Global Melawan Terorisme. Pernyataan ini tidak hanya ditujukan kepada peperangan yang terjadi di Timur Tengah seperti di Irak dan Afghanistan, tetapi

juga kepada seluruh upaya diplomatik, finansial, dan lainnya yang mengarah kepada aksi terorisme di seluruh dunia. Selain itu, peristiwa 9/11 memicu meningkatnya angka diskriminasi yang dialami oleh Arab/Muslim di Amerika. FBI, misalnya, merilis sebuah laporan yang menyatakan bahwa terjadi peningkatan secara drastis atas tindak kejahatan berdasarkan kebencian (*hate crime*) yang dialami Muslim di Amerika, dari 28 kasus pada tahun 2000 menjadi 481 kasus pada 2001. Di kota New York saja, berdasarkan laporan dari kepolisian setempat, terdapat 117 laporan dari kasus serupa dari 11 September 2001 sampai dengan Maret 2002 (Disha, dkk. 2011, 21-22). Pada 2006, sebuah survei dari USA Today-Gollup Poll merilis laporan yang menyatakan bahwa 22% dari warga Amerika tidak mau hidup bertetangga dengan Muslim, 31% merasa takut adan khawatir berada satu pesawat dengan Muslim, dan menuntuk pemerintah Amerika mengawasi Muslim lebih dari anggota masyarakat lainnya (Aswar, 2021: 86).

Setelah 20 tahun dari peristiwa 9/11, pada September 2021 *Othering and Belonging Istitute* dari Universitas Berkeley merilis laporan penelitiannya yang mengungkapkan bahwa lebih dari 2/3 Muslim di Amerika pernah mengalami Islamophobia. Dalam hal ini Islamofobia didefinisikan sebagai tindak kejahatan baik fisik maupun verbal yang ditujukan kepada umat Islam berdasar rasa benci kepada mereka. Penelitian yang melibatkan lebih dari seribu responden tersebut juga menyatakan bahwa dari 67,5 persen responden yang memiliki pengalaman terkait Islamophobia, 76,7 persen dari mereka adalah perempuan dan 58,6 persen adalah laki-laki. Hal ini menyebabkan tidak sedikit dari Muslim yang menyembunyikan identitas keislamannya (32,9%) atau bahkan sangat berhati-hati dalam berbicara dan berperilaku karena adanya rasa takut tentang bagaimana orang lain memberikan tanggapan atasnya (88,2%).

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa pemerintahan Donald Trump turut menyuburkan suasana Islamofobia di Amerika. Sejak kampanye pemilihan presiden pada 2015, Trump berulang

kali menyatakan pernyataan kontroversial terhadap umat Islam seperti "Islam hates Us" dan melarang Muslim untuk memasuki Amerika. Pada 2017 Trump mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan larangan perjalanan (Travel Ban) dengan melarang warga negara dari tujuh negara Muslim (Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman) untuk memasuki Amerika. Namun demikian, Trump akhirnya mengubah daftar negara-negara tersebut setelah mendapatkan protes dari masyarakat Amerika (Aswar, 2021: 86- 87).

Selama tahun 2021, tercatat setidaknya terdapat 140 kasus terkait diskriminasi yang berarti bahwa manifestasi Islamofobia di negara ini masih menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Beberapa kasus tersebut antara lain: larangan bagi umat Islam Mississippi Utara untuk mendirikan bangunan masjid; seorang politikus Muslim di negara bagian Virginia dipertanyakan kemampuannya untuk melayani masyarakat Virginia berdasarkan pada agama yang dianutnya; seorang Muslim yang menjadi penumpang pesawat Southwest Airlines menyatakan bahwa dirinya tidak diberikan tempat duduk karena mengenakan hijab; Seorang pekerja dilecehkan karena keyakinannya pada sebuah perusahaan dealer di negara bagian Utah setelah permintaannya untuk mendapatkan izin melaksanakan salat ditolak oleh perusahaan; Pemerintah AS meminta perlindungan 'rahasia negara' untuk menahan informasi tentang pengawasannya terhadap Muslim di masjid-masjid di California; Insiden diskriminatif yang dihadapi perempuan berhijab yang bekerja di kantor bursa; dan masih banyak lagi (OIC Report, 2022).

F. Tantangan dan Harapan Muslim di Amerika

Secara umum, baik sebelum maupun setelah peristiwa 9 September 2001 Muslim di Amerika menghadapi sejumlah tantangan terutama yang datang dari pihak negara dan anggota masyarakat di luar komunitas mereka. Meskipun telah lama eksis di Amerika, misalnya, umat Islam masih dianggap sebagai imigran

atau outsider. Islam sering kali dihadapkan secara berlawanan dengan "Barat" di mana mereka dituntut untuk berasimilasi atau beradaptasi dengan nilai-nilai dan budaya masyarakat Amerika pada umumnya. Di hadapan negara, umat Islam menjadi objek yang harus diawasi secara terus menerus karena dianggap sebagai ancaman terhadap negara.

Tentu saja umat Islam di Amerika memiliki harapan yang besar terhadap masa depan kehidupan mereka yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka tetap berpandangan bahwa kehidupan mereka dengan non-Muslim berjalan dengan harmonis (72.9%). Mereka juga meyakini bahwa nilai-nilai Islam selaras dengan nilai-nilai Amerika (79,4%). Bahkan, mayoritas dari mereka juga meyakini bahwa keberagaman budaya di Amerika merupakan suatu hal yang baik dan sudah seharusnya diperlakukan setara di hadapan negara.

Harapan untuk membangun hubungan yang baik dengan negara juga diupayakan dengan terus bergandengan tangan dengan negara. Pada masa Presiden Trump, misalnya, Syaikh Hamza Yusuf, seorang ulama sekaligus cendekiawan muslim di Amerika menjadi salah satu bagian dari penasihat presiden. Hamza sempat menjadi bagian dari Pemerintahan Trump, yakni dalam *Commission on Unalienable Rights* yang bertugas memberi masukan, nasihat, dan rujukan untuk Trump terkait permasalahan hak asasi manusia di Amerika (Surya, 2020).

G. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam di Amerika telah berakar sejak masa perbudakan pada abad keenam belas. Pasang surut kehidupan Islam di Amerika dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang ada di dalam negeri dan juga kondisi dunia Muslim pada umumnya. Gelombang imigrasi Muslim pada abad kesembilan belas dan terus berlangsung sampai hari ini membentuk Muslim Amerika yang heterogen baik dari segi etnis, budaya, dan negara asal.

Peristiwa 11 September menjadi penanda penting dalam kehidupan umat Islam di Amerika. Sebab, selain meningkatnya kecurigaan, diskriminasi, dan Islamofobia, peristiwa ini juga menjadikan Islam menjadi objek kajian yang menarik terutama bagi kalangan akademisi. Islam yang awalnya sering dikontraskan dengan nilai-nilai Barat dan Amerika perlahan bergeser ke arah integrasi mencari titik temu di antara kedua entitas tersebut. Dalam hal ini, dengan semakin banyaknya Muslim terdidik, menjadi profesional di berbagai bidang, termasuk politisi, artis, dan akademisi, menjadi harapan baru atas kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Terlepas dari semua tantangan yang telah dan terus mereka hadapi dalam kehidupan keseharian, dakwah Islam secara moderat menjadi tantangan bersama bagi Muslim di Amerika.

6

ISLAM DI JERMAN[1]

Islam di Jerman menarik untuk dikaji tidak hanya karena jumlahnya yang semakin bertambah, tapi juga karena etnis Muslim di negara ini sangat bervariasi. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Eropa Barat, Muslim di negara ini terbesar setelah Perancis. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh Muslim, Jerman merupakan salah satu negara yang cukup aman dan nyaman bagi Muslim. Hal ini terbukti Jerman sebagai salah satu negara tujuan migrasi bagi Muslim khususnya dari negara-negara yang konflik. Tulisan ini diharapkan bisa mengover perkembangan terkini dan juga berbagai tantangan yang dialami oleh Muslim.

A. Pendahuluan

Jerman memang bukan "rumah" bagi Islam, namun agama ini berkembang dengan pesat di Jerman dan juga Eropa Barat secara umum. Populasi Muslim di Jerman yang saat ini merupakan terbesar kedua di Eropa Barat setelah Perancis akan terus bertambah seiring dengan kehadiran para imigran dari berbagai belahan dunia, khususnya Turki dan negara-negara di Timur Tengah yang sedang mengalami konflik. Pada awalnya, pemerintah Jerman pada tahun 1960-an sengaja mendatangkan tenaga imigran dari sejumlah negara untuk membangun perekonomian Jerman pasca Perang Dunia II. Para imigran ini kemudian menjadi buruh di sejumlah kota-kota

[1] Bab ini pada awalnya adalah artikel yang pernah terbit di *Temali: Jurnal Pembangunan Sosial*, Vol. 2 No. 2 Tahun 2019. Bab ini diterbitkan ulang dengan ijin redaktur jurnal dan telah direvisi seperlunya terutama kondisi terkini.

industri dan lebih memilih untuk tetap tinggal di Jerman daripada kembali ke negeri asalnya. Oleh sebab itu, tidak aneh kiranya jika saat ini sebagian politikus Jerman menganggap Jerman sebagai negeri para imigran.

Saat ini populasi Muslim di Jerman telah mencapai sekitar 5,3 juta jiwa (6,4%) dan menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen (*Muslim life in Germany*, 2020, 2019). Walaupun secara umum bisa dikatakan bahwa Muslim di Jerman bisa beradaptasi di lingkungan bertradisi Yahudi- Kristen, mereka tidak berarti tidak menghadapi masalah. Selain secara internal mengalami banyak masalah, Muslim di Jerman juga mengalami sejumlah perlakuan diskriminatif di ranah sosial seiring dengan merebaknya islamofobia dan ekstrem kanan Kristen di Eropa Barat. Tulisan ini akan membahas tentang sejarah Islam di Jerman, beberapa permasalahan kontemporer juga akan dibahas seperti pengakuan resmi terhadap Islam dari pemerintah, diskriminasi di tempat kerja, diskriminasi pemakai hijab, kesulitan integrasi, dan radikalisme agama.

Penelitian ini didasarkan pada paradigma metode penelitian kualitatif dengan analisis deduktif. Studi ini melalui proses investigasi di mana peneliti secara bertahap memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, mereproduksi, dan mengklasifikasikan obyek penelitian (Salganik, 2019). Selain mempelajari laporan riset, artikel jurnal, dan artikel di media, peneliti juga mengadakan observasi lapangan dan juga wawancara seperlunya untuk memperkuat asumsi-asumsi dasar penelitian.

B. Sejarah Islam di Jerman

Republik Federal Jerman merupakan salah satu negara besar di Eropa Barat dan menjadi jantung bagi negara-negara di Eropa. Sejak tahun 2005 Jerman dipimpin oleh Kanselir Angela Merkel dan merupakan kanselir wanita pertama dalam sejarah pemerintahan negara Jerman. Pada 2020 populasi Jerman diperkirakan mencapai 83 juta jiwa dan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Uni Eropa, serta negara nomor 2 untuk tujuan imigran setelah Amerika. Adapun komposisi masyarakat Jerman sebagian besar

merupakan penduduk asli Jerman (80,8%), disusul etnis Eropa lainnya sekitar 11,7%, dan non-Kaukasian seperti Turki (3,4%) dan Arab (1,3%).5 Dalam bidang agama, berdasarkan sensus 2011 sekitar 66,8% penduduk Jerman berafiliasi ke agama Kristen (Protestan 31,7% dan Katolik Roma 31,2%) dan Ateis 33% (Statistisches Bundesamt , 2017).

Islam di Jerman mempunyai sejarah yang panjang bahkan sejak zaman Turki Usmani. Ketika Turki Usmani menginvasi Wina (Austro-Hungaria) pada tahun 1683, banyak tentara Turki yang dipenjara di wilayah kerajaan Prussia (sekarang Jerman). Sejak saat itu, komunitas Muslim di wilayah Jerman sudah ada dan terus berlanjut hingga abad berikutnya. Kedatangan umat Islam gelombang berikutnya di wilayah Jerman adalah pada abad ke-18 ketika Raja Friedrich Willem I Kerajaan Prussia menjalin hubungan kerja sama dengan Dinasti Turki Usmani dalam bidang militer. Turki Usmani mengirim sejumlah tentara ke Prussia untuk belajar militer. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kehadiran tentara Muslim Turki, pada tahun 1732 Raja Friedrich Wilhelm I membangun sebuah masjid di Potsdam, kota di Bundesland Brandenburg, sebagai tempat beribadah mereka (Fetzer & Soper, 2005: 99).

Hubungan kerja sama dalam bidang militer antara kedua kerajaan ini tetap berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya, yaitu Raja Friedrich II (1740-1786). Pada tahun 1945, Raja Friedrich II membentuk unit Muslim pada tentara Prussia yang disebut dengan nama “Muslim Riders” yang terdiri 1.000 orang dari Muslim etnis Bosnia, Albania, dan Tatar. Pada tahun 1798, sebuah kuburan Muslim dibangun di Berlin sebagai penghormatan terhadap Duta Besar Turki ke-3 Ali Aziz Efendi dan pada tahun 1980-an dibangun sebuah masjid di sampingnya dengan nama masjid Sehitlik (Turki: syahid).

Memasuki permulaan abad ke-20, hubungan Jerman dan Turki Usmani semakin erat. Pada tahun 1912, Enver Pasha, Menteri Peperangan Turki Usmani menjalin kerja sama dengan Jerman untuk mengirimkan sejumlah diplomat dan perwira Jerman untuk melatih

para tentara Turki Usmani (Firdaus, 2009: 152). Setelah Perang Balkan (1912-1913) berakhir, Turki terlibat dalam Perang Dunia I (1914-1918) dan menjadi sekutu Jerman. Dalam perang tersebut pihak Jerman mengalami kekalahan dan banyak tentara dari Turki Usmani yang menjadi tawanan perang dan memilih untuk menetap di Jerman, khususnya di Berlin, dari pada kembali ke negeri asalnya, Turki (Kettani, 2002: 55). Pada tahun 1922, sejumlah Muslim dari 44 etnis membangun komunitas Muslim di Berlin walaupun akhirnya mereka gagal mendirikan masjid karena masalah finansial. Masjid pertama di Jerman baru kemudian dibangun oleh komunitas Ahmadiyah (Lahore) pada tahun 1925.[2] Ratusan ribu tentara Turki Usmani kembali didatangkan ke Jerman pada masa kepemimpinan Nazi untuk membantu Jerman dalam Perang Dunia II. Dalam perang ini Jerman menderita kekalahan yang mengakibatkan hancurnya perekonomian Jerman.

Pasca Perang Dunia II, khususnya dekade 1960-1970-an, gelombang pekerja imigran dari Turki, Afrika Utara, dan bekas Yugoslavia, mulai didatangkan untuk membantu pembangunan infrastruktur di Jerman. Walaupun pada awalnya mayoritas adalah laki-laki, pada tahap berikutnya mereka bisa membawa keluarga mereka. Sejak 1980-an, jumlah imigran Muslim pencari suaka di Jerman mulai meningkat, terutama etnik Turki (Kurdi, Yezidis, dan Asyur). Mayoritas Muslim Turki di Jerman saat ini adalah generasi ke-3 dan ke-4 yang lahir di Jerman, walaupun tidak semuanya sebagai warganegara Jerman. Di samping itu, komunitas Muslim asal Iran dianggap paling bisa berintegrasi di Jerman karena jumlah akademisi dan pebisnis terus meningkat di atas rata-rata (Kettani, 2002: 55). Karena sejarah Islam di negara cukup panjang, tidaklah mengherankan bila Angela Merkel mengatakan bahwa "Islam adalah bagian dari Jerman".[3]

---

[2] Berbeda dengan komunitas Ahmadiyah Qodiyan yang berkembang dengan pesat di Jerman, komunitas Ahmadiyah Lahore cenderung menurun dengan drastis. Jamaah masjid ini mayoritas bukan dari komunitas Ahmadiyah Lahore, tapi masyarakat Muslim di sekitar Berlin.

[3] https://www.dw.com/en/merkel-islam-is-a-part-of-germany/av-43067794 (diakses 7 Maret 2019).

Gelombang Muslim terakhir yang datang ke Jerman berasal dari kawasan konflik Timur Tengah dan Afrika pada periode 2010-2016. Konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah dan Afrika karena Arab Spring dan ISIS telah menyebabkan banyaknya migran dan pencari suaka politik ke negara-negara maju di Eropa Barat. Walaupun sebagian korban konflik di Timur Tengah dan Afrika juga mencari migrasi dan mencari suaka politik ke negara-negara makmur di Timur Tengah, namun sebagian besar menjadikan Eropa Barat sebagai tujuan mereka. Di Eropa Barat, beberapa negara "membuka" diri untuk menerima migran dari negara- negara konflik tersebut seperti Belanda, Norwegia, Austria, Jerman dll. Di Jerman, Angela Merkel menerima lebih dari 1 juta migran yang mayoritas Muslim dengan tangan terbuka. Kebijakan dan sikap kemanusiaan ini tidak luput dari kritik dari berbagai politisi di negara Uni Eropa paling makmur ini. Walaupun demikian, sebagian kelompok khawatir bahwa jumlah Muslim akan terus bertambah dan menjadi 20 juta Muslim di tahun 2020.[4]

C. Populasi dan Demografi Muslim

Secara historis, Muslim datang ke Jerman dalam beberapa gelombang dan populasinya terus meningkat secara signifikan di negara terluas di Eropa Barat itu. Di samping faktor imigran Muslim, faktor lain yang memengaruhi meningkatnya populasi Muslim di negara ini adalah suburnya angka kelahiran bayi dari keluarga-keluarga Muslim yang sudah menetap di Jerman dan masuk Islamnya (konversi) sebagian dari orang asli Jerman (Kaukasian).

Terkait dengan perkembangan jumlah populasi Muslim ini, Houssain Kettani menyajikan data populasi Muslim di Jerman dari tahun 1920 sampai dengan 2009 di bawah ini (Kettani, 2010: 167):

[4] https://www.gatestoneinstitute.org/6793/germany-20-million-muslims (diakses 17 Agustus 2021).

Tabel 1: Pertumbuhan Populasi Muslim

NO	TAHUN	POPULASI	PERSENTASE
1.	1920	1.000	0,01%
2.	1951	20.000	0,03%
3.	1971	1.150.000	1,5%
4.	1981	1.800.000	2,9%
5.	1991	2.500.000	3,1%
6.	2001	3.200.000	3,9%
7.	2009	4.300.000	5,22%

Selain itu, Pew Research Center juga memprediksikan bahwa jumlah Muslim di Jerman yang saat ini berjumlah 5 juta (6,1%) akan terus mengalami peningkatan mencapai angka sekitar 5.545.000 (7,1%) Muslim pada tahun 2030 (Grims & Karim, 2011: 124). Angka ini belum termasuk imigran yang terus berdatangan karena Jerman merupakan destinasi No. satu untuk imigran. Pada saat yang sama, badan statistik populasi dunia memperkirakan bahwa populasi masyarakat Jerman akan terus mengalami penurunan karena semakin berkurangnya jumlah bayi yang lahir di Jerman dibanding penduduk yang meninggal. Rata-rata angka kelahiran di Jerman berkisar 8,7 sampai dengan 9,8 anak yang lahir per seribu orang. Hal ini berbanding terbalik dengan angka kematian yang berkisar antara 11,6 sampai dengan 15,8 jiwa per seribu orang. Adapun jumlah imigran yang datang ke Jerman diperkirakan tetap akan mengalami pertumbuhan sampai tahun 2050 mendatang.

Migration Police Institute (2011) memberikan data yang menarik terkait imigran di Jerman. Berdasarkan penelitiannya, jumlah imigran di Jerman, baik pendatang baru maupun keturunan, mencapai angka 16 juta jiwa atau seperlima dari 82 juta penduduk Jerman. Sepertiga dari jumlah imigran ini merupakan warga keturunan yang dilahirkan di Jerman. Di sejumlah negara bagian, tercatat bahwa jumlah anak keturunan imigran di bawah usia 10 tahun meningkat sampai dengan 35%. Di beberapa kota metropolitan

seperti Berlin, Hamburg, Frankfurt, Augsburg atau Nurmberg lebih dari 60% anak yang masuk sekolah pada tahun 2011 merupakan keturunan imigran (Foroutan, 2013: 2)

Dari 10,6 juta warga pendatang di Jerman sejak tahun 1950, 70,6% berasal dari luar negara-negara Eropa, 32,3% dari negara anggota Uni Eropa, 16,4% dari Asia. Populasi Muslim terbesar berasal dari Turki yang jumlahnya mencapai 2,9 juta (2011) dan kemudian dari kawasan Timur Tengah yang berjumlah kurang lebih 400 ribu jiwa. Komunitas Muslim terbesar kedua adalah keturunan Bosnia dan Herzegovina, yang diikuti oleh Iran, Maroko, Afghanistan, Libanon, Pakistan, Syria, Tunisia, Algeria, dan Indonesia.[5] Adapun komposisi populasi warga pendatang Muslim di Jerman pada tahun 2008 adalah sebagai berikut (Foroutan, 2013: 4):

Tabel 2: Komposisi Populasi Pendatang Muslim (2008)

ETNIK	PROSENTASE
Turki	63,2%
Eropa Tenggara	13,6%
Timur Tengah	8,1%
Afrika Utara	6,9%
Asia Selatan & Tenggara	4,6%
Iran	1,7%
Afrika	1,5%
Asia Tengah	0,4%

Sekitar 80% dari populasi Muslim di Jerman masih berstatus sebagai warga pendatang, dan sekitar 608.000 (20%) adalah warga negara Jerman. Lagi-lagi angka ini akan terus berubah seiring dengan datangnya migran dari daerah-daerah konflik di Timur Tengah dan Afrika.

Jika lebih diperinci lagi komunitas Muslim Turki yang berada di Jerman kebanyakan berasal dari etnis Turki dan Kurdi yang sebagian besar sudah terpengaruh oleh paham pembaharuan

[5] http://www.euro-islam.info/country-profiles/germany/ (diakses 17 Agustus 2021)

Kemalis (Europe Report No 181, 2007: 1) sehingga lebih mudah dalam menerima nilai-nilai Barat, khususnya budaya Jerman. Crisis Group Europe mencatat bahwa pada tahun 1961, sebanyak seratus dari seribu tenaga kerja imigran di Jerman didatangkan dari Turki yang kebanyakan berasal dari bagian barat daya Anatolia. Pada dekade 1970-an, ketika perekonomian Jerman terus merangkak naik jumlah tenaga kerja imigran ini pun semakin bertambah banyak hingga mendekati angka satu juta tenaga kerja. Sebagian besar komunitas Muslim di Jerman menempati kota-kota besar seperti Berlin, Cologne, Frankfurt, Stutgart, Munich, Lower Saxony, Rheinland Pfalz, Scleswig Holstein, Bremen, dan Hamburg (Europe Report No. 181, 2007: 19).

D. Corak Keagamaan dan Organisasi Islam di Jerman

Muslim di Jerman terdiri berbagai mazhab dan aliran. Sekitar 65% dari seluruh umat Islam di Jerman merupakan penganut mazhab Sunni, 12% Syiah-Alawiyah, 7% Syiah-Yazidiyah, 2% Syiah-Turki, 1,7% Ahmadiyah, 0,3% Ibadi, 0,1% mistik, 4,0% aliran lainnya termasuk Syiah Imamiyah dan Ismailiyah. Komunitas Syiah Alawiyah merupakan komunitas agama yang menyatukan berbagai ajaran dari Islam, Kristen, dan Samanisme. Aliran ini sebagian besar berasal dari daerah Turki di mana pengikutnya berkisar antara 10-30% dari populasi Turki (Europe Report No 181, 2007: 2 & 19). Adapun Syi'ah Ismailiyah terkonsentrasi di sejumlah kota yaitu Essen, Frankfurt, Munich, dan Hamburg. Essen menjadi pusat Syiah Ismailiyah yang dianut oleh para imigran dan keturunan Afganistan. Di kota itu mereka mendirikan masjid Jamaah Khana sebagai tempat ibadah dan merayakan hari-hari besar agama Islam Syiah serta terdapat juga madrasah Baitul Ilmi sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka (Baiza, 1998: 28-29).

Sebagaimana banyak berkembang di berbagai negara, Salafi juga tumbuh dan berkembang di Jerman. Data pengikut Salafi yang bisa dilacak di Jerman adalah sekitar 3.800 pada 2011 dan meningkat hingga 10.300 pada 2017. Menurut Badan Federal untuk Pendidikan Kewarganegaraan (Bundeszentrale für Politische

Bildung) gerakan Salafi berpusat di wilayah Frankfurt Rhine-Main, North Rhine-Westphalia, dan Berlin. Di tahun 2016 dilaporkan bahwa jumlah masjid berafiliasi ke Salafi di North Rhine-Westphalia telah berkembang dari 30 menjadi 55.[6] Pada Februari 2017, Asosiasi Masjid Berlin Fussilet (Berliner Fussilet-Moscheeverein) telah dilarang karena salah satu anggotanya Anis Amri, adalah pelaku serangan truk di Berlin pada 2016. Kasus yang sama juga terjadi, organisasi Muslim Deutschsprachige Islamkreis Hildesheim juga dilarang karena beberapa anggotanya disinyalir akan pergi ke wilayah konflik Syria.

Saat ini umat Islam di Jerman memiliki kurang lebih 2.500 masjid dan 140 di antaranya dilengkapi dengan kubah dan menara. Masjid-masjid tersebut dibangun atas inisiatif umat Islam sendiri dan dibantu oleh pemerintah daerah. Adapun masjid pertama di Jerman dibangun oleh Ahmadiyah (Lahore) pada tahun 1924 di Berlin. Walaupun umat Islam sangat beragam dari sisi etnis, mazhab, dan alirannya, secara umum bisa dikatakan bahwa umat Islam di Jerman sangat berkelompok secara etnis dan mazhab. Hal ini terlihat dengan jelas pada adanya beberapa organisasi Islam dan masjid yang secara umum dibangun oleh komunitas berdasarkan etnis dan mazhab. Beberapa organisasi Islam di Jerman, antara lain:

1. Verband der Islamischen Kulturzentren (Persatuan Pusat Kebudayaan Islam, VIKZ). VIKZ merupakan komunitas keagamaan tertua di Jerman yang berdiri pada tahun 1973. Organisasi ini merupakan komunitas Sufi yang terdiri lebih dari 100.000 anggota, dengan program pelatihan Imam, kursus baca Alquran, dan kursus Syariah. VIKZ memiliki 300 cabang di seluruh Jerman dan 160-250 tempat ibadah. Organisasi ini berhubungan erat dengan gerakan tarekat Sufi Sulayman (1888-1959) dan menjadi gerakan terkemuka pada dekade 1920-an dan 1930-an. Meski tidak berhubungan dengan partai atau gerakan Islam tertentu dan pemerintahan, sejumlah masjid di bawah naungan VIKZ aktif berpartisipasi

[6] https://rp-online.de/nrw/panorama/nrw-salafisten-agitieren-in-55-moscheen_aid-18340503 (diakses 2021).

dalam acara "Day of Open Mosque" di beberapa kota (Europe Report No 181, 2007: 10).

2. Diyanet I'leri Turk-Islam Birli'i (Turkish Islamic Union for Religious Affairs, DITIB). DITIB merupakan organisasi Islam terbesar yang mewakili Muslim Turki di Jerman. Organisasi ini tidak hanya ada di Jerman, tetapi juga di sejumlah negara Eropa yang terdapat komunitas Muslim Turki. Cabang DITIB di Jerman berdiri pada tahun 1984 di kota Berlin. Setelah dua tahun berdiri, yaitu pada 1986, lebih dari 250 organisasi Islam masyarakat Muslim Turki di Jerman bergabung di bawah payung organisasi ini. Saat ini lebih dari 300 organisasi Islam dan 800-900 tempat ibadah berada di bawah kontrol DITIB, termasuk menyelenggarakan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah publik. Beberapa tugas DITIB yaitu melayani pengurusan visa, izin imam, izin konstruksi masjid, guru agama, dan pelatihan bahasa Jerman.
3. DITIB dikenal sebagai organisasi Islam yang moderat. Ajaran Islam yang dibawa organisasi ini merupakan Islam pembaharuan Kemalis. DITIB sudah beberapa kali mengajukan diri ke pemerintah Jerman agar diakui sebagai lembaga yang mewakili seluruh komunitas Muslim di Jerman. Namun, hal itu belum diterima oleh pemerintah Jerman karena keanggotaan organisasi ini hanya terbatas pada masyarakat Turki saja.
4. Islamische Gemeinschaft Milli Gorus (Komunitas Islam Milli Gorus, IGMG). IGMG berdiri pada tahun 1985 dan merupakan kompetitor DITIB. Organisasi ini memiliki hubungan yang dekat dengan partai Islamist di Turki. Anggota dari organisasi ini sekitar 26.500 anggota dan 400-600 tempat ibadah serta mendirikan sekolah-sekolah Alquran, mengorganisir masjid, dan Haji (*Europe Report* No. 181, 2007: 10). Secara umum, para pemimpin dan anggota IGMB berintegrasi dengan baik dengan masyarakat Jerman. Mereka menggunakan bahasa Jerman dan sadar akan hak-

haknya, meski berusaha untuk menciptakan masyarakat yang islami. Di Eropa organisasi ini memiliki 14 cabang dan memiliki cita-cita untuk mendirikan Negara Islam Turki. Organisasi ini diyakini melakukan cuci otak kepada generasi muda dengan memberi pemikiran Islamist dan anti Barat.

5. Zentralrat der Muslime in Deutschland (Dewan Pusat Muslim, ZMD). ZMD merupakan organisasi Islam di Jerman yang berdiri pada tahun 1994. ZMD dipimpin oleh Ayyup Axel Kohler yang anggotanya berada di delapan negara bagian di Jerman. Dana organisasi ini didapatkan dari Liga Muslim dari Arab Saudi dan memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Organisasi ini menaungi sekitar 400 tempat ibadah dan 18 organisasi keagamaan. Adapun anggota dari ZMD berjumlah antara 12.000 sampai 20.000 anggota.

Di samping beberapa organisasi tersebut, terdapat juga organisasi payung yang menyatukan organisasi-organisasi Muslim yang lebih besar, antara lain:

1. Islam Council/Islamrat (IR). IR berdiri pada tahun 1986 di Berlin dan menaungi 23 organisasi Islam. Jumlah anggota organisasi ini sekitar 140.000 orang yang didominasi oleh anggota IGMG. Pemimpin IR diberi gelar "Syaikhul Islam", nama pemimpin tertinggi umat Islam pada masa dinasti Turki Usmani. Organisasi ini berpusat di Cologne dan mengontrol 700 tempat ibadah dan 15 organisasi Islam regional yang disebut Federasi Islam, termasuk Islamische Gemeinschaft Deutschland di Munich yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. IR merupakan organisasi Islam yang mendukung suatu varian Islam konservatif. IR terus berupaya untuk mendapatkan pengakuan secara hukum dari negara dan mendapatkan izin memberikan pengajaran agama Islam di sekolah publik.
2. Dewan Koordinasi Muslim/Koordinationsrat der Muslime (KRM). KRM didirikan pada tahun 2007 oleh DITIB, VIKZ, dan ZMD sebagai organisasi yang membicarakan masalah

integrasi Muslim di Jerman. KRM dibentuk bertujuan untuk menjadi organisasi payung bagi semua organisasi Islam di Jerman karena sesuai dengan aturan pemerintah Jerman bahwa pemerintah akan mengakomodir kepentingan seluruh Muslim di Jerman yang tergabung dalam satu wadah organisasi, bukan terpecah dalam berbagai organisasi.

1. Kebebasan Beragama & Diskriminasi Muslim di Jerman

Secara konstitusi, hubungan agama dan negara di Jerman dijamin oleh Grundgesetz, undang-undang dasar yang dibentuk tahun 1949. Dalam hal ini, Grundgesetz memiliki dua fungsi: di satu sisi memberikan jaminan terhadap peran agama dengan menghargai keyakinan bagi pemeluknya sebagai warga negara, yaitu menjamin hak asasi individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama untuk tidak mendapatkan sikap diskriminasi berdasarkan agama. Di sisi yang lain, aturan konstitusi dalam menentukan hubungan negara dengan berbagai komunitas agama yang ada di negara Jerman. Salah satu bagian dari kebebasan beragama ini menyangkut juga dengan kebebasan individu untuk tidak terikat dalam salah satu agama tertentu atau tidak bertuhan. Kebebasan beragama ini tidak hanya berlaku bagi warga Jerman saja, tetapi juga bagi semua orang yang hidup di negara tersebut. Selain itu, masing-masing komunitas agama juga berhak memberikan pendidikan agama sebagai salah satu hak dasar bagi warga negara.

Meskipun Islam adalah agama dengan pengikut terbesar kedua setelah Kristen, Muslim di Jerman masih banyak yang mendapatkan perlakuan diskriminatif di berbagai ranah sosial-budaya, media, hingga politik. Ini membuktikan bahwa Islamofobia masih cukup berkembang di negara di mana kebebasan beragama dilindungi oleh konstitusi dan Piagam Hak-hak Fundamental (Charter of Fundamental Rights). Diskriminasi yang paling umum dan banyak terjadi sebagaimana di negara- negara Uni Eropa lainnya adalah masalah jilbab. Isu jilbab masih menjadi perdebatan di pemerintahan pusat Jerman. Separuh dari 16 negara-negara bagian di Jerman melarang pemakaian simbol-simbol semua agama,

yaitu Baden-Württemberg, Bavaria, Berlin, Bremen, Hesse, Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, and Saarland. Sebagai contoh, negara bagian Berlin, Brandenburg, dan Hesse menerapkan "hukum netral" dengan melarang guru dan pegawai di sekolah publik dan pengadilan memakai simbol-simbol keagamaan. Ide netral dari simbol-simbol keagamaan di ruang publik dan bebas di ruang privat ini terlihat tidak masuk akal bagi muslimah yang menganggap jilbab sebagai kebutuhan di ruang publik (Ozyurek, 2014: 12). Problem jilbab juga dialami oleh banyak Muslimah di Jerman dan Uni Eropa secara umum yang ingin mendapatkan pekerjaan atau menyewa apartemen (Pascoet, 2014).

Selain itu, sejumlah isu yang menjadi tantangan bagi Muslim di Jerman dan sering kali menyulitkan integrasi mereka adalah pembatasan kewarganegaraan, tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kesulitan akses pekerjaan di sektor publik, Kebijakan yang tidak seragam tentang pemakaian simbol agama, jilbab, dan undang- undang perlindungan binatang yang menghalangi Muslim menyembelih hewan dan kurban.

Di ranah politik, Islam belum diperlakukan setara dengan agama lain. Sampai saat ini, semua negara bagian di Jerman masih belum memberi ijin Islam untuk menjadi badan korporasi (*public law corporate body*), meskipun sudah beberapa kali mengajukan diri.39 Beberapa komunitas keagamaan seperti Protestan, Katolik, Kristen Yunani Ortodoks, dan Yahudi telah menikmati status sebagai badan korporasi ini sehingga masing-masing dari mereka berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti pajak gereja (*church tax*), membuka kelas-kelas agama di sekolah publik, dan bantuan dalam pembangunan tempat ibadah (*European Report* No. 181, 2007: 8).

Belum diakuinya Islam sebagai bagian dari badan korporasi menjadi dilema tersendiri bagi negara Jerman. Di satu sisi, Jerman menghendaki adanya integrasi Muslim di negara tersebut, namun di sisi yang lain pemerintah Jerman tidak atau belum mau mengakui Islam sebagai bagian dari badan korporasi. Pengakuan ini

sebenarnya menjadi salah satu hal yang penting bagi Jerman untuk memudahkan proses integrasi tersebut. Dengan tidak diakuinya Islam sebagai bagian dari badan korporasi, umat Islam di Jerman kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini berbeda dengan Katolik, Protestan, dan Yahudi di mana masing-masing komunitas ini mendapatkan pajak keagamaan (*Religious Taxes/ Kirchensteuer and Kultussteuer respectively*) setiap tahunnya. Gereja Katolik, sebagai contoh, mendapatkan bantuan kurang lebih 5,5 Milyar Euro per tahun untuk pajak keagamaan saja. Adapun umat Islam hanya mendapatkan seperlima dari jumlah tersebut atau sekitar 1 milyar Euro per tahun.[7] Artinya, sampai saat ini umat Islam di Jerman masih diperlakukan secara berbeda dan tidak mendapatkan keistimewaan sebagaimana komunitas agama yang telah diakui sebagai bagian dari badan korporasi.

Meskipun secara teritis umat Islam di Jerman hidup di negara sekuler, dalam praktiknya hanya lonceng gereja saja yang diperkenankan untuk didengarkan di ruang publik. Umat Islam dilarang untuk mengumandangkan suara azan baik untuk salat lima waktu, salat Jumat, maupun acara-acara pada hari besar umat Islam.42 Selain itu, umat Islam juga tidak mendapatkan hak untuk tampil di media penyiaran seperti televisi dan radio Jerman meskipun mereka membayar untuk penyiaran layanan publik (*public-service broadcasting*).

Dalam bidang pendidikan, sekitar 700.000 Muslim Jerman belajar di sekolah dan pendidikan tinggi. Akan tetapi, berdasarkan penelitian terbaru, anak-anak imigran Muslim ditempatkan di sekolah yang lebih rendah karena tak sanggup mengikuti divisi sekolah yang paling tinggi. Tingkat pendidikan Muslim di Jerman sendiri berskala tinggi sebanyak 5 %, sedang 25 %, dan rendah 71 %.44 Berdasarkan data dari Badan Pusat Arsip Islam di Jerman sebagaimana dikutip Euro Muslim diketahui bahwa kurang lebih 20% dari seluruh anak-anak di sekolah Islam mengikuti pengajaran Al-Quran. Secara umum, para guru agama Islam di Jerman

[7] Armin Langer, "Blocked Integration" dalam http://en.qantara.de/content/muslims-in-germany- blocked-integration (diakses 17 Agustus 2021)

kurang menguasai bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar dalam memberikan materi keislaman, meskipun sudah berdiri beberapa lembaga pendidikan bagi para guru agama dan imam.

Saat ini, beberapa universitas telah menetapkan program pelatihan guru Islam, meski mendapatkan banyak kritikan. Pada tahun 2005 Universitas Munster mulai menyelenggarakan pendidikan bagi guru-guru agama Islam. Hal serupa juga diselenggarakan oleh Universitas Osnabruck pada tahun 2007 dengan memulai program pendidikan Imam, disusul Universitas Erlangen-Nürnberg pada 2011. Munich dan Frankfurt juga sudah menawarkan pendidikan kewarganegaraan bagi para Imam atau pemimpin agama Islam. Dorongan lebih jauh terkait pendidikan Imam secara profesional terhalang masalah pendanaan dan organisasi penyelenggara. Meski mendapat tantangan yang besar, komunitas Muslim Alawiyah (Alevis) telah sukses menjalankan program pendidikan di Jerman bagi kelompok mereka, disusul keberhasilan komunitas Muslim Turki meski dalam skala lebih kecil (Rohe, 2010: 224).

Dalam bidang politik, partisipasi Muslim di parlemen Jerman cukup tinggi. Pada masa jabatan 2009-2013 tercatat sekitar 20-an Muslim yang duduk di parlemen yang sebagian besar dari mereka berasal dari keturunan Turki, Arab, dan Iran. Partai politik yang menjadi kendaraan mereka untuk duduk di Parlemen di antaranya adalah *Social Democratic Party* (SDP), *Christian Union Party* (CPU) dan *Green Party*.[8] Namun demikian, kehadiran mereka di parlemen tidak merepresentasikan aspirasi Muslim di Jerman. Bahkan, sebagian besar dari mereka, meski berlatarbelakang keluarga Muslim, tidak mencerminkan sebagai seorang Muslim. Mereka sudah terbiasa mengonsumsi alkohol, daging babi, dan kebiasaan masyarakat Barat pada umumnya.

Pada sektor rumah hunian, imigran muslim umumnya tinggal di rumah sewapenuh sesak, miskin fasilitas, dan biaya sewa yang mahal. Segregasi spasial ini menimbulkan konsentrasi-konsentrasi Muslim

[8] http://www.euro-islam.info/country-profiles/germany/, (diakses 17 Agustus 2021)

yang membentuk pusat-pusat etnik di perkotaan. Hal ini menjadi perhatian tersendiri bagi pemerintah Jerman untuk mengurangi konsentrasi imigran Muslim di daerah-daerah tertentu. Akan tetapi, organisasi muslim *Türkische Gemeinde Deutschland* (Komunitas Turki di Jerman, TGD), menyatakan kebijakan tersebut harus diikuti relokasi yang lebih layak di bidang pendidikan, akomodasi, dan aspek sosial lainnya. Perkembangan terakhir berubah lebih positif, bahwa pemerintah Jerman telah menginstruksikan perbaikan peralatan dan renovasi apartemen.

Bentuk diskriminasi lain yang dihadapi Muslim di Jerman di hadapi di tempat kerja, khususnya bagi pekerja buruh Muslim. Di sejumlah tempat kerja mereka kesulitan untuk melaksanakan ibadah harian seperti salat Jumat, salat 5 waktu, danjuga di kantin yang tidak menyediakan makanan berlabel halal bagi mereka. Para Muslimah juga mendapatkan perlakuan diskriminatif karena jilbab yang mereka kenakan.

E. Integrasi dan Tantangan Radikalisme

Sejak tahun 2006, para politisi dan pembuat kebijakan di negara Jerman telah memulai langkah untuk melakukan integrasi sosial antara umat Islam dengan budaya Jerman. Mereka menyadari bahwa tidak hanya Islam ekstremis yang harus dikontrol, tetapi juga gerakan anti-Islam yang berkembang di Jerman harus diawasi. Menteri Dalam Negeri Jerman, Wolfgang Schauble, pada tahun 2006 menyelenggarakan Konferensi Islam Jerman untuk membangun dialog antara Negara Jerman dan Muslim yang berada di negara tersebut. Dalam pembukaan konferensi tersebut dia menyatakan bahwa Islam adalah bagian dari Jerman dan Eropa. Islam adalah bagian dari masa lalu dan masa depan Jerman. Pada saat yang sama Kanselir Angela Merkel berinisiatif menyelenggarakan konferensi tentang Integrasi untuk mengeksplorasi konsep baru bagaimana menyikapi perbedaan sebagai bagian dari proses perubahan di Jerman (Foroutan, 2013: 7).

Pergeseran sudut pandang atau paradigma dalam melihat Islam ini terkait erat dengan kebutuhan Jerman terhadap tenaga kerja imigran. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi Jerman tidak lepas dari SDM yang didatangkan dari negara lain. Dengan kebijakan integrasi ini diharapkan Jerman menjadi tempat yang nyaman bagi para imigran untuk tetap menjaga kestabilan ekonomi negara tersebut (Foroutan, 2013: 7).

Sejak peristiwa Bom WTC 11 September 2001, dan diikuti dengan pernyataan pemerintah Amerika untuk memerangi "terorisme global", persepsi tentang Muslim sebagai teroris juga menjadi wacana di negara-negara Eropa termasuk Jerman. Gejala Islamofobia ini juga menjadi salah satu sebab berbagai tindakan diskriminasi yang dialamatkan kepada penduduk Muslim. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Partai Sosial-Demokratic bekerja sama dengan Friedrich Ebert Fondation yang berjudul *Intolerance, Prejudice, and Discrimination: A European Report* (2011) menyatakan bahwa hampir separuh (46,1%) warga Jerman mengatakan bahwa terlalu banyak orang Islam di Jerman, meski hanya 5% mereka (Muslim) sangat berpengaruh (54,1%) dan agama mereka tidak toleran (52,2%) (Foroutan, 2013: 6).

Sebagian dari warga negara Jerman yang tidak senang terhadap kehadiran Muslim di negara tersebut kemudian membentuk beberapa gerakan menentang Muslim, salah satunya dan yang terkenal yaitu gerakan *Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occident* (PEGIDA). Pada awal tahun 2015, sekitar 18.000 warga Jerman yang bergabung dalam Pegida melakukan aksi demonstrasi di Dresden, ibu kota negara bagian Saxony (Sachsen), memprotes fanatisme agama dan radikalisme Islam di Jerman. Salah satu alasan dari aksi unjuk rasa ini adalah hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh majalah Stern yang menyatakan bahwa 30% dari warga Jerman berpikir bahwa Islam telah berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Jerman. Aksi ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh kelompok Pegida. Sebelumnya, pada bulan Desember 2014, sekitar 10.000 simpatisan Pegida juga melakukan aksi yang sama.

Di samping alasan semakin menguatnya Islam di Jerman, mereka juga menolak kebijakan pemerintah Jerman yang dikenal liberal mengenai masalah imigrasi. Sementara itu, di sejumlah kota lainnya seperti di Berlin, Hamburg, Koln, dan Stutgart sekitar 22.000 orang melakukan aksi menentang kelompok Pegida. Tabloid Bild dalam halaman utamanya juga memuat berita utama yang bertajuk "Tidak untuk Pegida."53

Gerakan demonstrasi dari kelompok Pegida tersebut kembali meramaikan wacana tentang kehadiran Islam di Jerman yang sebagian besar dianut oleh para imigran. Pada tahun 2014, jumlah imigran yang datang ke negara ini melonjak sampai 200.000 orang, empat kali lipat dibandingkan tahun 2012 yang sebagian besar berasal dari Turki dan kawasan Timur Tengah.

Kebijakan integrasi pemerintah Jerman menghendaki adanya asimilasi budaya dari beragam budaya yang terdapat di Jerman untuk melebur menjadi budaya Jerman. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam di Jerman di mana mereka memiliki tradisi budaya yang dalam beberapa hal bertentangan dengan budaya Jerman dan masyarakat Barat pada umumnya. Sebab dalam asimilasi, biasanya yang minoritas itu yang akan hilang identitasnya (Rahman, 2011: 8). Namun demikian, kebijakan asimilasi ini dianggap sebagai solusi setelah program multikulturalisme dianggap tidak lagi mencukupi sebagai solusi perkembangan masyarakat Jerman.

Sebagai konsekuensinya, sejumlah kecil Muslim di Jerman yang ingin tetap dapat mentradisikan budaya Islamnya mengalami sejumlah kendala. Keinginan sebagian umat Islam untuk membangun masyarakat islami atau mencita-citakan kehidupan yang bernafaskan ajaran Islam disebut dengan Islamis. Crisis Group (2007) mencatat bahwa hanya sebagian kecil, yaitu 1% dari Muslim di Jerman berideologi Islamis. Beberapa indikasi yang menjadi ukuran dari pembagian ini di antaranya adalah keterkaitan dengan jaringan Islam al-Qaeda di Timur Tengah, keinginan untuk mendirikan khilafah Islamiyah, serta memiliki hubungan dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dan sejumlah negara Islam lainnya.

IGMG dianggap sebagai salah satu organisasi yang menyerukan ide-ide Islamis di Jerman (*Europe Report* No. 181, 2007: 17-18).

Kondisi di atas diperburuk dengan semakin menyebarnya paham ultra- konservatif seperti ideologi ISIS. Semakin banyaknya migran Muslim dari Timur Tengah (Wahhabi-salafi) dan juga semakin terbukanya informasi global semakin membuka penyebaran ideologi ultra-konservatif dan bahkan radikal di Jerman. Walaupun kondisi sosial-politik di Jerman jauh lebih kondusif dibandingkan dengan Perancis dan Belgia, radikalisme Islam juga terjadi di beberapa tahun terakhir.

F. Kesimpulan

Islam merupakan bagian dari sejarah Jerman. Secara historis Islam telah menorehkan banyak perannya dalam sejarah Jerman sejak masa Turki Usmani dan Kerajaan Prussia. Terlepas dari pro-kontra banyak pihak di Jerman, keberadaan Muslim di Jerman bukan hanya sejak tahun 1960-an. Berbagai etnis Muslim di Jerman seperti Turki dan beberapa etnis Eropa Timur telah memberikan bukti yang jelas kontribusi mereka dalam pembentukan negara-bangsa Jerman. Islam di Jerman mengalami dinamika dan tantangan yang cukup signifikan seiring dengan merebaknya Islamisme dan islamofobia di dunia.

Islam mengalami tantangan yang signifikan di Jerman. Seiring dengan perkembangan Islam secara global, Islam di Jerman juga mengalami perkembangan signifikan baik di segi kuantitatif maupun kualitatif. Fenomena ini ditengarai dengan munculnya berbagai organisasi Islam di Jerman dari berbagai etnis. Fenomena lain adalah jumlah masjid yang secara kuantitatif juga terus bertambah di beberapa kota besar. Terakhir, masuknya beberapa Muslim di ranah politik juga merupakan bentuk integrasi Muslim ke dalam budaya Eropa. Di sisi lain, kehadiran Muslim juga menyebabkan munculnya gerakan anti-pendatang Muslim seperti Pegida (Patriotische Europaer Gegen die Islamisierung des Abenlandes/ Orang Eropa Patriotik Melawan Islamisasi Barat). Walaupun gerakan Pegida tidak besar, beberapa aktivitasnya cukup vokal sehingga

berkembang di beberapa kota besar di Jerman. Namun demikian, gerakan Pegida lebih merupakan reaksi karena banyaknya imigran Muslim dari berbagai negara Muslim di Timur Tengah dan Afrika. Di kalangan Muslim bahkan ada juga beberapa fenomena Islamisme seperti kekerasan terhadap non-Muslim di ruang publik dan juga bergabungnya beberapa orang ke wilayah konflik ke Syria.

Islam dan Muslim di Jerman mempunyai masa depan yang bagus. Respons publik maupun pemerintah Jerman cukup bagus sehingga Islam mempunyai prospek yang bagus. Tantangan Muslim di Jerman yang paling besar bukan dari luar atau bersifat eksternal, tapi justru internal, yaitu sejauh mana Muslim di Jerman mampu untuk berintegrasi dengan budaya di Eropa. Semakin banyak Muslim di Jerman mampu berintegrasi, semakin bagus dan semakin sedikit masalah Muslim secara eksternal. Diantara integrasi Muslim di Jerman adalah penguasaan bahasa Jerman dan budaya Eropa lainnya sejauh tidak bertentangan dengan norma-norma Islam. Proses ini, lambat-laun akan menghasilkan corak Islam Eropa yang bisa jadi berbeda dengan karakter Islam di Timur Tengah yang akan lebih mewarnai Eropa secara lebih luas.

7

ISLAM DI INGGRIS

Tidak jauh berbeda dengan di negara-negara Barat lainnya, Islam berkembang dengan cukup pesat di Inggris. Perkembangan ini tidak hanya karena semakin banyak migran yang datang dari negara-negara bekas koloninya, tapi juga konversi orang Inggris yang semakin banyak. Secara umum, mayoritas Muslim lahir dan dibesarkan di negara berpenduduk Muslim yang jauh berbeda dengan konteks budaya Barat. Di tengah maraknya Islamisme global, Islam di Inggris juga mengalami banyak kasus radikalisme seperti pemboman kereta api di London. Hal ini terjadi seiring dengan banyaknya tantangan diskriminasi dan Islamofobia; kemungkinan lain adalah bahwa radikalisme memunculkan diskriminasi dan islamofobia. Bagaimana populasi Muslim di Inggris dan bagaimana mereka merespons tantangan ini dan sejauh mana mereka berusaha untuk berintegrasi menarik untuk dibahas dalam sub-bab ini.

A. Pendahuluan

Sebagai negara maju, Inggris merupakan negara yang multikultural. Di satu sisi, negara ini Inggris merupakan bagian terbesar dari Britania Raya (United Kingdom UK) yang terdiri dari Inggris, Wales, Skotlandia dan Irlandia Utara. Di sisi lain, di Inggris juga banyak terdapat pendatang dari berbagai wilayah di Asia dan Afrika yang menambah keragamannya. Dikenal sebagai negara monarki konstitusional, negara ini dipimpin oleh Ratu

Elizabeth II (1952- ~). Dalam menjalankan pemerintahan, Inggris dipimpin oleh seorang perdana menteri yang saat ini dijabat oleh Boris Johnson (2019-~) menggantikan Theresa May (2016-2019). Diketahui bahwa Inggris merupakan bagian dari 54 negara-negara persemakmuran (*commonwealth*).

Berdasarkan laporan dari *Office for National Statistics* (ONS) Britania Raya memiliki populasi sebanyak 67,1 juta pada 2020. Dari sisi etnis, 85% adalah berkulit putih, Asia 7,8 % dan hitam 3,5%. Secara agama, berdasarkan sensus 2011 diketahui bahwa mayoritas penduduk Inggris dan Wales berafiliasi dengan agama Kristen (59,3%), tidak beragama (25,1%), Muslim (4,8%), Hindu (1,5%), Sikh (0,8%), Yahudi (0,5%), Buddha (0,4%), dan agama lainnya (0,4%). Berbeda dengan negara-negara Eropa lainnya, umat Islam di Inggris sebagian besar berasal dari Asia Selatan (Pakistan dan Bangladesh) yang datang ke negara ini sejak masa pendudukan Inggris di India dan berlanjut pada periode pasca Perang Dunia Kedua. Umat Islam lainnya berasal dari Yaman dan negara-negara Arab lainnya, Afrika, dan Eropa Timur.

Islam bisa berkembang di negara Barat ini dengan baik. Kajian sub-bab ini menarik karena akan memotret kehidupan umat Islam di Inggris. Beberapa isu utama yang menjadi perhatian utama sub-bab ini antara lain: sejarah masuknya Islam di Inggris dan konversi masyarakat Inggris ke dalam Islam, populasi Muslim di Inggris, masalah Islamofobia dan diskriminasi yang dihadapi Muslim di Inggris dan tantangan dan harapan Muslim di Inggris.

B. Sejarah Masuknya Islam

Catatan sejarah menunjukkan bahwa umat Islam telah tinggal di Inggris sejak abad ke-16. Mereka adalah para pelaut, khususnya pada budak yang bekerja di kapal, yang berasal dari Afrika Utara dan Turki Utsmani yang ditangkap oleh armada laut Spanyol lalu dibebaskan di kota-kota pelabuhan di Inggris. Para pelaut Muslim dari berbagai kawasan dunia memiliki peran penting dalam sejarah terbentuknya komunitas Muslim awal di Inggris sampai abad ke-

20 M, dan menjadi konteks terjadinya konversi agama orang-orang Inggris untuk memeluk agama Islam di kalangan pelaut, pelancong, dan pedagang (Knot: 2018, 1).

Seiring meluasnya jajahan kolonial Inggris, pada abad ke-18 banyak pelaut asal India—termasuk Turki, Arab, Somalia, dan Melayu—yang dipekerjakan untuk perusahaan *East India Company*, perusahaan kongsi dagang milik Inggris. Karena diperlakukan secara tidak layak dan kondisi yang memprihatinkan mereka melompat dari kapal lalu bertempat tinggal di kota-kota pelabuhan seperti London, Cardiff, Glasgow, Liverpool, Manchester, Tyneside dan Hull. Pada pertengahan abad ke-19 setidaknya terdapat 10-12 ribu pelaut yang tinggal di Inggris, dan jumlah ini bertambah dua kali lipat pada akhir abad tersebut. Pada saat yang sama, banyak pelajar Muslim dari India dan Arab yang datang ke Inggris untuk belajar di sejumlah universitas baik di Inggris maupun Skotlandia (Knot: 2018, 1). Pada periode pasca Perang Dunia II (1939-1945), banyak imigran dari Asia Selatan yang datang ke Inggris dan bermukim di kota-kota industri di bagian tengah Inggris, wilayah utara, dan London. Perang sipil dan ketidakstabilan politik di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur sejak 1980-an menghasilkan kedatangan para pencari suaka politik dan pengungsi ke Inggris, termasuk umat Islam dari Algeria, Libya, Somalia, Iran, Iraq, Afghanistan dan Bosnia (Knot: 2018, 1).

Adapun orang Inggris pertama yang tercatat sebagai pemeluk agama Islam yaitu John Nelson pada abad ke-16. sepanjang abad ke-18 dan ke-19 banyak orang Inggris yang memeluk agama Islam di kalangan elite kelas menengah atas di Inggris, salah satunya, adalah Edward Montagu, putra dari duta besar Inggris untuk Turki Utsmani (*BBC*, 7/9/2009). Tokoh mualaf paling terkemuka dalam sejarah Islam di Inggris adalah William Henry Quilliam yang berganti nama menjadi Syekh Abdullah Quilliam (1851-1932). Dia merupakan seorang pengacara sukses dari Liverpool dan menjadi inisiator berdirinya masjid pertama di Inggris yang berdiri pada 1889. Namun demikian, terdapat versi lain terkait pembangunan

masjid pertama di Inggris yang menyatakan bahwa sebuah masjid telah berdiri di Cardiff, ibukota Wales, pada 1860 (*BBC*, 7/9/2009).

Tokoh penting lainnya dalam sejarah Islam di Inggris yaitu William Pickthall yang setelah memeluk Islam namanya berganti menjadi Muhammad Marmaduke Pickthall dan Syekh Abdullah Ali al-Hakimi. Pickthall merupakan orang pertama yang menerjemahkan Al-quran dari bahasa Arab yang berjudul *The Meaning of the Glorious Koran* pada 1930. jauh sebelumnya, penerjemahan Alquran dalam bahasa Inggris dilakukan oleh Alexander Ross, tetapi dari bahasa Prancis pada 1649 (*BBC*, 7/9/2009; *Republika*, 24/2/2020). Adapun Syekh Abdullah Ali al-Hakimi merupakan tokoh sufi terkemuka asal Yaman yang mengajarkan tarekat Alawiyah di kalangan Muslim Yaman dan mendirikan Islamic Center di Cardiff, Shields selatan, Hull dan Liverpool pada dekade 1930-an (Geaves dan Gabriel, 2013: 74- 75).

Gelombang imigran pertama dalam jumlah relatif besar terjadi pada tahun 1940-an yang berasal dari anak benua India. Tidak semua dari imigran ini beragama Islam, tetapi juga Hindu, Sikh, Jain, Kristen, dan Zoroaster yang datang ke Inggris untuk bekerja seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di kota-kota dengan industri yang terus berkembang. Pada 1971, jumlah mereka diperkirakan mencapai 400 ribu jiwa termasuk wanita, anak-anak, dan orang tua. Kehadiran mereka ini seiring dengan disahkannya undang-undang imigrasi pada 1962. Beberapa kota yang menjadi hunian mereka antara lain Tower Hamlets, Bradford, Birmingham dan wilayah utara seperti Blackburn dan Dewsbury. Perang sipil dan ketidakstabilan politik di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur sejak 1980-an menjadi salah satu sebab utama datangnya para pencari suaka politik dan pengungsi dari Algeria, Libya, Somalia, Iran, Iraq, Afghanistan dan Bosnia (Knot, 2018: 2-3).

C. Populasi dan Demografi

Sensus Penduduk Nasional tahun 2001 yang dilakukan oleh *Office for National Statistics* (ONS) merupakan sensus pertama sejak pertengahan 1800-an yang di dalamnya menanyakan tentang afiliasi keagamaan penduduk Inggris dan Wales. Pada sensus tahun 2011 diketahui bahwa jumlah umat Islam di Inggris dan Wales berjumlah 4,8% dari seluruh total populasi. Dibanding tahun 2001, angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 75% populasi Muslim yang ada, dari 1,546,626 pada 2001 (3,3%) menjadi 2,706,066 pada 2011 (MCB, 2015: 22). Pada tahun 2018 dan 2020, jumlah umat Islam di Inggris diperkirakan mencapai 3,4 juta jiwa atau setara dengan 5,9% dari seluruh populasi Inggris dan Wales (BMHC, 2021: 8).

Berdasarkan sensus tahun 2011, sebagaimana ditulis oleh *the Muslim Council of Britain* (2015), jumlah pemeluk agama di Inggris dan Wales secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

AGAMA	JUMLAH	PERSENTASE
Kristen	33,243,175	59.3
Muslim	2,706,066	4.8
Hindu	816,633	1.5
Sikh	423,158	0.8
Yahudi	263,346	0.5
Buddha	247,743	0.4
Agama lainnya	240,530	0.4
Tidak Beragama	14,097,229	25.1
Agama yang tidak disebutkan	4,038,032	7.2
Total	**56,075,912**	**100**

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa umat Islam merupakan agama dengan jumlah terbesar di kalangan minoritas di Inggris. Selain itu, sekitar 47,2% populasi Muslim merupakan

kelahiran Inggris. Adapun sebagian lainnya berasal dari Asia dan Afrika. Dari segi etnis, Muslim di Inggris didominasi oleh etnis Asia (59,6%), Afrika (14,3%), campuran (3,3%), dan kulit putih (2,7%). Kelompok terbesar dari Asia berasal dari Pakistan (32%), Bangladesh (12,3%), India (5,6%), Tionghoa (0,6%), dan etnis Asia lainnya, termasuk Melayu (9%). Adapun Muslim yang berasal dari negara-negara Arab jumlahnya mencapai 15,4%.

Mayoritas umat Islam (76%) tinggal di kota-kota sekitar Greater London, West Midlands, North West dan Yorkshire dan Humberside. Jumlah umat Islam di London mencapai 12,4% dari seluruh populasi London. Beberapa kota metropolitan lainnya dengan jumlah Muslim terbanyak yaitu Birmingham (21,8%), Bradford (24,7%), dan Manchester (15,8%). Terdapat sekitar 35 distrik (*Local Authority Districts*) dengan populasi Muslim mencapai 10% atau lebih. Jumlah persentase tertinggi yaitu London Boroughs of Tower Hamlets (34.5%) dan Newham (32.0%) diikuti oleh Blackburn dengan Darwen (27.0%).

Faktor penting lainnya dalam hal pertumbuhan jumlah Muslim di Inggris adalah konversi. Jumlah warga Inggris yang memutuskan untuk memeluk agama Islam diperkirakan mencapai angka 4% dari populasi Muslim. Mereka tidak lahir atau berhubungan dengan keluarga Muslim, melainkan memilih Islam sebagai identitas keagamaan dan jalan hidup mereka. Hal ini di antaranya dipengaruhi oleh keringnya nilai-nilai spiritual yang dihadapi oleh peradaban Barat secara umum (Knot, 2018: 2-3).

Survei tahun 2015 menunjukkan bahwa masjid dan tempat ibadah untuk umat Islam di Inggris berjumlah 1743 masjid. Masjid-masjid tersebut dikelola oleh beragam organisasi Islam seperti Deobandi, Bareilvi, Salafi, Ikhwani, Jamaah Islamiyah, Syiah (Itsna Asyariyah dan Ismailiyah), dan Ahmadiyah. Adapun sekolah Islam yang dibiayai oleh negara, dari level sekolah dasar, menengah, dan atas, berjumlah 31 buah (Long dan Danechi, 2019: 17).

D. Karakteristik dan Sebab-sebab Minoritas

Umat Islam di Inggris, sebagaimana tercatat dalam tabel demografi di atas, merupakan populasi agama minoritas terbesar setelah Kristen. Mereka berasal dari berbagai negara (lebih dari 50 negara) dengan mayoritas dari Pakistan dan Bangladesh. Dalam beberapa dekade terakhir, Islam sering menjadi isu utama dan perdebatan terkait masalah etnis dan agama minoritas di Inggris, dan hubungannya dengan bagaimana mengelola atau mengatur populasi Muslim, masalah terkait rasisme, identitas nasional dan kewargaan, dan nilai-nilai publik (Sealy dan Modood, 2021).

Islam menjadi sorotan luas masyarakat Inggris dan memantik perdebatan politik yang panas sampai di tingkat internasional ketika Salman Rushdie menerbitkan novel kontroversialnya *The Satanic Verses* pada 1988. Dia merupakan novelis kelahiran India, menempuh pendidikan tinggi di Inggris, dan berpindah kewarganegaraan sebagai penduduk Inggris. Setelah terbitnya novel tersebut, dia mendapatkan kecaman dari umat Islam dari berbagai negara karena dianggap menghina nabi Muhammad atas nama kebebasan berbicara. Ayatullah Khomaeni, pemimpin tertinggi Iran ketika itu, memberikan fatwa mati untuk Salman Rushdie. Pemerintah Inggris lalu memberikan perlindungan khusus kepada Salman Rushdie atas berbagai ancaman yang ditujukan kepadanya. Peristiwa tersebut memberikan citra yang negatif terhadap Islam di tengah kesadaran politik maupun publik di Inggris dimana Islam kemudian diasosiasikan dengan agama intoleran yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Inggris modern (Sealy dan Modood: 2021).

Kondisi umat Islam di Inggris sebelum tragedi 11 September 2001 diidentikkan dengan kemiskinan dan keterasingan, yang dalam beberapa kasus menyebabkan terjadinya isolasi sosial. Muslim laki-laki digambarkan baik dalam publik dan media sebagai orang asing dan diasosiasikan dengan fundamentalisme. Sejak peristiwa 11 September, umat Islam baik di Inggris maupun wilayah lainnya menjadi fokus perhatian publik. Masifnya pemberitaan tentang "Perang melawan Terorisme" dan gerakan Al-

Qaeda menghasilkan perdebatan tentang Islam dan status Muslim di Inggris. Pengeboman di Inggris pada 7 Juli 2005 semakin menguatkan stereotip terhadap Muslim, Islamofobia, dan diskursus terkait Islam dalam hal keamanan (OSI, 2005: 66).

Islam, dalam pandangan masyarakat Inggris, dipandang sebagai entitas tunggal. Dalam perdebatan publik dan media, Muslim sering digambarkan sebagai ancaman dan kelompok sosial yang "barbar" karena keterikatannya dengan hukum Islam. Beberapa kelompok Islam fundamentalis di Inggris seperti Islam4UK dan Al-Muhajiroun menginginkan diterapkannya hukum Islam atau syariah dan negara Islam yang kemudian ditanggapi terutama oleh kelompok ekstrem kanan sebagai agenda Islamisasi di Inggris. Meskipun kedua organisasi Islam ini tidak memiliki pengikut yang banyak di Inggris, tetapi pemberitaan di media dan opini publik mengarah kepada asumsi yang berlebihan dalam menilai Islam dan umat Islam di Inggris (Malik, 2012:18).

E. Corak Beragama

Humayun Ansari, pengamat Islam dari *Centre for Ethnic Minority Studies* di Royal Holloway University di London, menyatakan bahwa Islam di Inggris merupakan miniatur dari keberagaman Islam global. Mazhab Sunni merupakan yang paling dominan di Inggris, tetapi juga terdapat beragam aliran lainnya seperti Syiah (Itsna Asyariah dan Ismailiyah), aliran sufi, dan Ahmadiyah. Bahkan London sebagai tempat pelarian khalifah Ahmadiyah Qodiyan ke-4 ketika diusir dari Pakistan. Selain itu, terdapat juga Nation of Islam, yang anggotanya terdiri dari keturunan Afrika dan Karibia yang mana mereka meneruskan cita-cita Elijah Muhammad, pendakwah Islam asal Amerika pada 1930-1970an (Ansari:2002, 6). Sebuah survei menyatakan bahwa persentase Sunni di Inggris sekitar 75%, sedangkan Syiah di bawah 8%, dan sisanya adalah kelompok lainnya (El-Menouar, 2017: 14).

Beberapa kelompok keagamaan lain yang perlu untuk diulas dalam tulisan ini yaitu Ahmadiyah, Hizbut Tahrir, dan Jamaah Islamiyah di mana ketiganya memiliki kantor resmi di Inggris. Dalam sejarahnya, Ahmadiyah sudah ada di Inggris sejak 1913 dan mendirikan masjid Al-Fazl, masjid pertama di London yang dibangun pada 1926 dan dijadikan sebagai salah satu warisan sejarah dan cagar budaya kerajaan Inggris. Pada 1984, Ahmadiyah menjadikan London sebagai kantor pusat akibat terjadinya kerusuhan dan perlakuan diskriminatif yang dihadapi Ahmadiyah di Pakistan. Saat ini, terdapat 100 kantor cabang Ahmadiyah di Inggris. Sadiq Khan, Muslim keturunan Pakistan dan pengikut Ahmadiyah, merupakan Muslim pertama yang terpilih sebagai wali kota pada 2016 dari Partai Buruh dan kembali terpilih untuk periode keduanya pada tahun 2021.

Adapun Hizbut Tahrir merupakan salah satu organisasi Islam yang dengan leluasa mendapatkan kebebasan di Inggris. Meskipun banyak negara telah melarang eksistensi organisasi ini, termasuk Indonesia, Inggris merupakan negara yang memberikan perlindungan, bahkan memberikan bantuan kepada Hizbut Tahrir. Namun demikian, bantuan pemerintah tersebut akhirnya dihentikan karena diketahui bahwa HT mengajarkan kepada pengikutnya dengan menyatakan bahwa toleransi dan integrasi merupakan bukan bagian ajaran Islam. Selain itu, Muhammad Emwazi, salah satu jihadis ISIS, diketahui terhubung dengan HT selama dia belajar di Inggris (https://www.counterextremism.com/threat/hizb-ut-tahrir).

Kelompok Islam lainnya yang memiliki pengaruh besar di Inggris yaitu Jama'at-i Islami, organisasi Islam asal anak benua India yang didirikan oleh Abu A'la Al-Maududi pada 1941. Organisasi ini mulai berdiri di Inggris pada 1960-an dengan mendirikan organisasi *UK Islamic Mission* dan organisasi afiliasinya Dawatul Islam. Organisasi ini dikenal sebagai organisasi Islam modern yang turut mempromosikan agar umat Islam menyesuaikan diri dengan peradaban Barat. Dua organisasi yang mendapatkan pengaruh dari

Jama'at-i Islami yaitu *Islamic Society of Britain* dan *Young Muslims UK*. Beberapa petinggi dari *Muslim Council of Britain* (MCB) juga berafiliasi dengan gerakan ini (Pewforum 2010; lihat juga Fuad, 2012: 222-224).

Organisasi payung untuk Muslim di Inggris adalah *Muslim Council of Britain* (MCB) yang diresmikan pada tahun 1997. Lembaga ini memayungi lebih dari 500 organisasi Islam di seluruh Inggris baik di level nasional, regional, lokal, termasuk masjid, lembaga filantropi, dan sekolah. Organisasi ini dibentuk dalam rangka sebagai lembaga yang menyuarakan kepentingan umat Islam di Inggris. Hadirnya lembaga ini setidaknya menunjukkan keinginan pemerintah Inggris untuk melindungi kelompok minoritas yang, berdasarkan UU tentang Ras 1976, tidak mengakomodasi umat Islam dalam memberikan perlindungan terkait tindakan diskriminasi. Di samping itu, terbentuknya lembaga ini menjelaskan baik kepada pemerintah maupun masyarakat sipil lainnya bahwa umat Islam di Inggris terdiri dari beragam etnis dan kebangsaan (Sealy dan Modood, 2021).

Lembaga lainnya yang melayani kepentingan umat Islam di Inggris yaitu pengadilan syariah atau *the Islamic Sharia Council* (ISC) dan Pengadilan Arbitrase Muslim atau *Muslim Arbitration Tribunal* (MAT). ISC pertama berdiri pada 1982 di Leyton, London Timur, sedangkan MAT berdiri sejak tahun 2007. Tugas utama kedua pengadilan ini yaitu memutuskan atau menjadi mediator dalam bidang hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Tidak ada data statistik yang pasti mengenai jumlah pengadilan ini. Namun demikian, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Inggris (*Home Office*) pada 2018 jumlah pengadilan syariah berada di antara angka 30 sampai dengan 85 di Inggris dan Wales (Torrance, 2019).

Keberadaan lembaga syariah ini menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik dan menyulut kontroversi, termasuk dukungan dari Archbishop Canterbury (Rowan Williams) pada 2008. Para pemangku kebijakan, atau kubu yang menolak

pengadilan syariah, mempertanyakan bahwa kehadiran lembaga ini menjadi semacam hukum ganda di Inggris. Oleh karenanya, sampai saat ini pengadilan syariah tidak memiliki landasan hukum di dalam hukum sipil di Inggris.

Organisasi lainnya yaitu *Federation of Student Islamic Societies* (FOSIS), organisasi payung bagi mahasiswa Muslim di Inggris dan Irlandia yang sudah berdiri sejak 1963 di Universitas Birmingham. Berdirinya organisasi ini dilatarbelakangi ketika para mahasiswa Muslim di Inggris menyambut kedatangan Malcom X (El-Hajj Malik El-Shabazz) pada 1964. Pada tahun-tahun berikutnya, FOSIS juga menjadi panitia kedatangan pendakwah terkenal Ahmed Deedat, dan lainnya. Terkait kehidupan mahasiswa Muslim di perguruan tinggi di Inggris, Saat ini, terdapat sekitar 230.000 mahasiswa Muslim yang tersebar di kampus-kampus Inggris atau sekitar 8-9% dari seluruh mahasiswa di Inggris (Mathew Guest dkk., 2020). Adapun kajian terhadap Islam dan masyarakat Muslim di ranah akademik memiliki akar yang kuat di Inggris beriringan dengan orientalisme. Lembaga pertama yaitu di Cambrigde pada 1632 dan Oxford pada 1634. Saat ini di antara pusat kajian keislaman terkemuka di Inggris yaitu *Oxford Center for Islamic Studies* dan *School of Oriental and African Studies (SOAS)* di University of London.

Mengenai Islam sebagai sebuah identitas, survei tahun 2006 mendapatkan data bahwa sekitar 81% Muslim menganggap diri mereka sebagai Muslim terlebih dahulu. Hal ini identik dengan Muslim yang tinggal di negara-negara mayoritas Muslim seperti Pakistan yang juga cenderung menganggap diri mereka sebagai Muslim terlebih dahulu dibanding dengan mengidentifikasi diri dengan negara-bangsa (misalnya 87% orang Pakistan mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim terlebih dahulu daripada orang Pakistan). Di sisi lain, sekitar 83% Muslim bangga menjadi warga negara Inggris, dibandingkan dengan 79% masyarakat umum, dan 82% Muslim ingin tinggal di lingkungan yang beragam dan campuran dibandingkan dengan 63% orang Inggris non-Muslim.

Mengenai masalah agama, sebuah jajak pendapat mendapatkan bahwa 59% Muslim lebih suka hidup di bawah hukum Inggris, dibandingkan dengan 28% yang lebih suka hidup di bawah hukum syariah. Namun demikian, komitmen Muslim terhadap agamanya cenderung tinggi. Survei yang sama menunjukkan bahwa 61% responden setuju dengan pernyataan bahwa homoseksualitas itu salah dan ilegal. Jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa Muslim Inggris memiliki pandangan yang cukup konservatif tentang isu-isu yang berkaitan dengan tindakan seksual di luar nikah dan/atau homoseksual dibandingkan dengan rekan-rekan Muslim Eropa mereka – yang jauh lebih liberal (Pew, 2006).

Aspek menarik lain adalah bahwa imigran Muslim dianggap kurang berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat Inggris dibandingkan dengan imigran dari negara lain. Sebuah survei mengungkapkan bahwa 28% Muslim Inggris berharap bahwa Inggris suatu hari nanti akan menjadi negara Islam, sementara 52% tidak setuju, dan 20% tidak berani berpendapat.

Di ranah politik, umat Islam memainkan peran yang semakin menonjol dalam kehidupan politik. Walaupun tidak ada partai politik Islam, mayoritas Muslim Inggris memilih Partai Buruh. Pada pemilihan umum 2017, ada 15 anggota parlemen Muslim (12 Buruh dan 3 Konservatif) terpilih, naik dari 13 anggota parlemen Muslim pada pemilihan umum 2015. Sedangkan pada pemilihan umum 2019, jumlah anggota parlemen Muslim ada 19 (15 Buruh dan 4 Konservatif). Beberapa anggota parlemen diantaranya adalah Salma Yaqoob, mantan pemimpin Partai Penghormatan sayap kiri. Sayeeda Warsi, yang merupakan Muslim pertama yang menjabat di kabinet Inggris, diangkat oleh David Cameron pada 2010 sebagai menteri tanpa portofolio. Dia diangkat menjadi menteri senior negara pada tahun 2012. Pada Agustus 2014 dia mengundurkan diri karena pendekatan pemerintah terhadap konflik Israel-Gaza 2014.

Meskipun syariah bukan bagian dari sistem hukum Inggris, beberapa tokoh Inggris telah mendukung penggunaannya di

bidang penyelesaian sengketa di komunitas Islam. Misalnya, pada Februari 2008 Rowan Williams, Uskup Agung Canterbury memberi kuliah di *Royal Courts of Justice* tentang Islam dan Hukum Inggris. Dalam kuliah ini ia berbicara tentang kemungkinan menggunakan syariah dalam beberapa keadaan. Beberapa bulan kemudian, Lord Phillips, saat itu sebagai Lord Chief Justice of England and Wales mendukung gagasan bahwa syariah dapat digunakan secara wajar sebagai dasar untuk "mediasi atau bentuk lain dari penyelesaian sengketa alternatif", dan menjelaskan bahwa "Tidaklah terlalu radikal untuk menggunakan hukum syariah dalam konteks perselisihan keluarga, misalnya, dan sistem kami sudah berjalan jauh untuk mengakomodasi saran uskup agung."

Pada bulan Maret 2014, The Law Society mengeluarkan panduan tentang bagaimana menyusun surat wasiat syariah untuk jaringan pengadilan syariah yang didirikan untuk menangani perselisihan antara keluarga Muslim. Namun pedoman itu ditarik pada tahun 2014 menyusul kritik oleh pengacara dan oleh Chris Grayling, Sekretaris Kehakiman.

Pada 2016-2018 sebuah lembaga independen ditugaskan oleh pemerintah Inggris menyelidiki praktik dewan syariah yang beroperasi di Inggris dan Wales. Dewan Syariah itu tidak memiliki status hukum dan tidak ada yurisdiksi hukum di Inggris. Perkiraan jumlah mereka berkisar antara 30 dan 85. Penyelidikan menemukan bahwa kebanyakan orang yang berkonsultasi dengan dewan adalah wanita yang mencari perceraian secara Islami. Tinjauan tersebut menyimpulkan bahwa "ada kesepakatan bulat di antara dewan syariah itu sendiri bahwa praktik diskriminatif memang terjadi dalam beberapa kasus di dewan di Inggris dan Wales" dan membuat rekomendasi legislatif dan administratif untuk memperbaiki pelanggaran. Panel tidak mengetahui adanya dewan syariah yang beroperasi di Skotlandia (Open Government License, 2018)

F. Diskriminasi, Islamofobia dan Radikalisme

Pasca tragedi 11 September 2001, Muslim di Inggris mengalami peningkatan perlakuan diskriminatif, obyek kekerasan, dan ujaran kebencian. Dilaporkan bahwa tindakan kriminal atas dasar kebencian rasial London Borough of Tower Hamlet meningkat 72 persen dibandingkan tahun 2000. Dari 100 laporan, 17 di antaranya berkaitan dengan tragedi 11/9. *Islamic Human Rights Commission* (IHRC) melaporkan bahwa dari pasca tragedi 11/9 terdapat 206 kasus, mulai dari tindakan kriminal kekerasan yang serius (43 persen), tindakan pelecehan verbal dan tertulis (36 persen), hingga tekanan dan pelecehan psikologis (8 persen), diskriminasi (4 persen), dan insiden lainnya (9 persen) (Ansari, 2002: 4).

Pada 7 Juli 2005 serangkaian bom terjadi di London yang menewaskan 52 orang dan 700 orang mengalami luka-luka. Aksi ini dilakukan oleh empat orang Muslim berwarganegara Inggris yang diduga berafiliasi dengan kelompok teroris. Tidak berselang lama, pemerintah Inggris membuat kebijakan melawan radikalisme yang lebih dikenal dengan *Prevent Strategy*. Implementasi dari kebijakan ini di antaranya dengan melibatkan otoritas lokal untuk mengawasi kegiatan umat Islam dan para pemuda Muslim di tempat kerja. Namun, dengan banyaknya aparat kepolisian dalam metode ini, mendapatkan kritik yang keras karena dianggap seolah-olah menjadikan umat Islam sebagai tertuduh (Farrell dkk., 2016).

Kedua peristiwa di atas, yakni 9/11 dan 7/7, oleh beberapa kalangan dianggap sebagai penanda bergesernya isu rasisme yang berdasar pada perbedaan rasial menjadi isu keagamaan antara Islam dan non-Islam yang memberikan andil cukup besar masalah Islamofobia di Inggris dan Eropa pada umumnya. Isu-isu seputar Islam dimanfaatkan terutama oleh para politisi sayap kanan dan media dengan menggambarkan Islam sebagai agama yang identik dengan terorisme, dipandang ingin melakukan Islamisasi Inggris, dan penerapan syariah Islam. Islam, yang terdiri dari beragam etnis, latar belakang, dan pelbagai aliran, disederhanakan sebagai

entitas tunggal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat dan British modern.

Pada Februari 2015, di New Castle, sekitar dua ribu orang berkumpul melakukan aksi unjuk rasa menolak apa yang mereka sebut sebagai Islamisasi Eropa. Mereka adalah simpatisan kelompok Pegida (*Patriotic Europeans Against the Islamization of the Occident (or "West"*), sebuah organisasi anti-Islam yang pertama kali muncul di Jerman dan berkembang di berbagai kota di Eropa (*BBC*, 25/2/2015). Dalam hal ini, kita melihat bagaimana Islam oleh sebagian masyarakat Barat dipandang sebagai entitas tunggal yang dekat dengan radikalisme, terorisme, kekerasan, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Barat. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bagaimana Islamophobia telah menyebar luas di negara-negara Eropa.

The All-*Party Parliamentary Group (APPG),* semacam kelompok kerja yang terdiri dari akademisi, politisi, dan petinggi lembaga perwakilan dari berbagai kelompok agama minoritas, pada 2018 merumuskan definisi tentang Islamofobia di Inggris. Hasil dari serangkaian diskusi tersebut menyepakati bahwa Islamofobia berakar dari rasisme dan merupakan jenis rasisme yang ditujukan kepada ekspresi keagamaan Muslim atau yang dianggap sebagai Muslim (*Islamophobia is rooted in racism and is a type of racism that targets expressions of Muslimness or perceived Muslimness*). Enam bulan kemudian, pihak pemerintah Inggris yang dikuasai oleh Partai Konservatif menolak definisi tersebut karena dianggap akan bertentangan dengan prinsip kebebasan berbicara (MCB, 2021).

Islamofobia menjadi salah satu isu yang penting karena hal ini berdampak negatif terhadap umat Islam di Inggris dalam berbagai bidang kehidupan. Pada tahun 2018 sebuah laporan sebagaimana ditulis oleh *Center for Media Monitoring* (2019) menyatakan bahwa sekitar 70% Muslim di Inggris mengalami perlakuan buruk (*prejudice*) atas dasar agama. Hal ini juga terjadi di lapangan pekerjaan di mana para pelamar pekerjaan dengan nama Muslim lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada nama-nama British.

Pelamar pekerjaan dari kelompok minoritas harus mengirimkan lamaran pekerjaannya 80% lebih banyak untuk mendapatkan respons positif dari perusahaan ketimbang orang-orang berkulit putih. Pria Muslim memiliki kemungkinan hingga 76% lebih kecil untuk memiliki pekerjaan dibandingkan dengan orang kulit putih. Sementara perempuan Muslim 65% lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan daripada perempuan Kristen kulit putih (MCB, 2021).

Di dunia pendidikan, sebuah studi dari Kementerian Pendidikan pada 2017 menunjukkan bahwa 18% siswa melihat anak-anak lain diganggu karena menjadi Muslim. Lembaga *Scotland Against Criminalising Communities* (SACC) mengajukan kepada lembaga *Equalities and Human Rights Commission* (EHRC) bahwa Islamofobia di lembaga pendidikan di Edinburgh semakin meningkat, di mana 55% siswa Muslim di sekolah menengah menghadapi perlakukan verbal terkait Islamofobia, dan 35% mengalami secara langsung. Secara lebih rinci perlakuan tersebut di antaranya mereka dipanggil sebagai "teroris", "bomber", "ISIS", "Regu Bunuh Diri", dan "Al-Qaeda" (MCB, 2021).

G. Tantangan dan Harapan

Umat Islam di Inggris memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Banyak kalangan Muslim, terutama generasi kedua dan seterusnya yang lahir di Inggris, yang bekerja di beragam sektor mulai dari pengajar di universitas, politisi, dan lembaga-lembaga pemerintahan. Meski demikian, angka kemiskinan Muslim di Inggris menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan pemeluk agama lainnya. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal ini antara lain: pertama, kurangnya kecakapan dalam berbahasa Inggris yang merefleksikan sejarah para imigran Muslim ke negara ini; kedua, faktor intrinsik dari tradisi umat Islam yang dibawa dari negara asal seperti nilai-nilai dalam keluarga Muslim tradisional yang lebih menempatkan perempuan untuk bekerja di rumah dan

mengasuh anak dan anggota keluarga lainnya; ketiga, Islamofobia dan perlakuan diskriminatif yang mereka hadapi dari masyarakat luas di mana hal ini berpotensi dalam meningkatnya risiko pengangguran atau mendapatkan upah yang rendah. Islamofobia juga merugikan terutama perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dalam keseharian mereka (Heath, 2014: 3).

Bagi banyak kalangan Inggris menjadi salah satu harapan sebagai contoh terbaik tentang multikulturalisme di Barat. Dibandingkan dengan negara Eropa lainnya, kehidupan umat Islam di negara ini relatif lebih baik. Sampai sejauh ini, harapan untuk mendapatkan pendidikan yang merata, kesetaraan dalam mengakses pekerjaan, termasuk ekspresi keagamaan, lebih banyak bergantung kepada organisasi payung umat Islam dalam hal sejauh mana lobi-lobi politik mereka berhasil direalisasikan oleh parlemen.

H. Kesimpulan

Umat Islam merupakan agama minoritas terbesar di Inggris. Kehadiran mereka di negara ini utamanya disebabkan oleh migrasi dari negara-negara Islam terutama India dan Pakistan yang merupakan bekas koloni Inggris. Berbeda dengan para pendahulunya, hampir separuh umat Islam saat ini lahir di Inggris. Meski demikian, perbedaan rasial menjadi salah satu tantangan tersendiri di mana oleh warga kulit putih mereka tetap dianggap sebagai pendatang.

Masalah utama yang dihadapi Muslim di Inggris adalah diskriminasi, islamofobia, dan radikalisme. Pemberitaan di media, khususnya pasca peristiwa 11 September 2001 dan pengeboman pada 7 Juli 2005, menghasilkan stereotip, *prejudice*, dan perlakuan diskriminatif yang dialami Muslim di Inggris dalam berbagai bidang kehidupan. Islamofobia juga menghasilkan prasangka tidak berdasar dari masyarakat Inggris seperti isu islamisasi Inggris dan penegakan syariah yang disuarakan terutama oleh kelompok ekstrem kanan.

Dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, kehidupan umat Islam di Inggris cenderung lebih baik. Inggris diharapkan menjadi salah satu contoh terbaik tentang penerapan multikulturalisme di dunia di mana negara dan masyarakatnya memberikan perlakuan yang setara terhadap pelbagai perbedaan ekspresi keagamaan.

8

ISLAM DI RUSIA

Walaupun Rusia dikenal sebagai negara komunis, negeri beruang merah ini menyimpan banyak sejarah Islam. Berbeda dengan negara-negara Eropa (Barat) lainnya dimana kebanyakan Muslim adalah pendatang setelah Perang Dunia II, Muslim di Rusia sudah ada sejak abad ke-7. Sejak periode-periode awal, Islam sudah tersebar di beberapa wilayah selatan Rusia seperti Chechnya, Dagestan, Tartarstan dll. Tidaklah mengherankan bila ditemukan makam 40 makam sahabat di wilayah Derbent Dagestan. Setelah itu Islam terus berkembang pada periode Turki Usmani hingga jumlah populasi berkisar 25 juta akhir-akhir ini. Saat ini, Islam berkembang juga di kota-kota besar seperti Moskow, Saint Petersburg dll. Namun demikian, karena mayoritas penduduk Rusia adalah Kristen (Ortodoks) maka tidak sedikit kasus-kasus diskriminasi dan islamofobia terjadi. Secara internal, kasus-kasus radikalisme juga terjadi seiring dengan mengglobalnya kasus ekstremisme dan terorisme. Sub-bab ini akan membahas sejak sejarah masuknya Islam, pertumbuhan populasi Muslim hingga perkembangan Islam kontemporer.

A. Pendahuluan

Negara Federasi Rusia merupakan negara paling luas di dunia. Dengan luas wilayah sekitar 17.098.242 km^2 dan penduduk 145 juta jiwa (estimasi 2022), terdapat sekitar 182 kelompok etnis yang tersebar di 22 republik dan sekitar empat puluh di antaranya adalah etnis Muslim seperti Volga Tatar, Siberia Tatar, Chechen,

Ingush, Bashkar, Dargin, Balkar, Avar, Karachay, Kabardin, Lezgin, dan lainnya. Moskow merupakan ibukota Rusia, kota metropolitan paling luas yang dihuni oleh 12 juta penduduk (2015) dan 4 juta di antaranya beragama Islam.

Rusia menjadi salah satu negara multi-etnis dan multi-agama di Eropa. Kebebasan dalam menjalankan agama mulai bergulir setidaknya mulai tahun 1985 ketika Mikhail Gorbachev menggulirkan kebijakan *perestroika* (restrukturisasi) and *glasnost* (keterbukaan) yang memberikan keluasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan kepercayaan mereka. Pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Rusia mengakui empat agama tradisional yaitu Kristen, Islam, Yahudi, dan Budha. Tidak seperti di negara Eropa lainnya di mana umat Islamnya berasal dari para imigran, Islam di Rusia diakui sebagai agama tradisional karena telah eksis di negara ini sejak abad ke-7 M. Islam menjadi agama dengan pemeluk paling banyak di Rusia setelah Kristen Ortodoks. Beberapa pengamat dan hasil survei menyatakan bahwa abad 21 adalah era kebangkitan agama Islam di Rusia di mana pada beberapa dekade mendatang jumlah umat Islam diprediksi akan menjadi penduduk mayoritas di Rusia. Hal ini diantaranya disebabkan oleh presentasi angka kelahiran penduduk Muslim yang lebih tinggi ketimbang warga lainnya, terutama etnis Slavia, mayoritas warga Rusia, yang justru mengalami tren penurunan.

Problem utama yang dihadapi oleh pemerintah Rusia terhadap Islam di antaranya mengenai masalah imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim terutama dari Asia Tengah, merebaknya radikalisme keagamaan, dan terorisme. Di samping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah tentang hubungan antara pemerintah dan umat Islam: apakah akan menjadi warga yang loyal kepada pemerintah atau justru ingin terpisah dengan melakukan gerakan separatisme sebagaimana yang terjadi di beberapa republik negara ini.

B. Masuknya Islam di Rusia

Islam pertama kali masuk ke wilayah Rusia terjadi pada abad ke-7 M pada masa kepemimpinan Umar bin Khaththab (634-644 M). Pasukan Muslim di bawah komando Abdurrahman bin Rabiah al-Bakhili berhasil menguasai beberapa kawasan di Asia Tengah seperti Mosul, Khurasan, Wilayah Utara Mesopotamia, dan Isfahan (Karim, 2006:11). Sekitar tahun 641/642, Islam telah berhasil mencapai wilayah Dagestan kemudian tersebar luas ke daerah bagian Kaukasus Utara (Akhmetova, 2013: 18). Menurut sebuah sumber, terdapat makam 40 sahabat (*Kyrkhlyar*) di wilayah Derbent Dagestan. Makam in berkaitan dengan periode Perang Arab-Khazar (serangkaian konflik yang terjadi antara tentara Kekhanan Khazar dan pasukan Arab di bawah Kekhalifahan Rasyidin, Umayyah, dan Abbasiyah). Penduduk setempat percaya bahwa para pemimpin pasukan Arab yang tewas dalam perjuangan menegakkan Islam dimakamkan di sini.[1]

Pada masa Dinasti Bani Umayyah, di bawah jenderal Marwan bin Muhammad (kemudian menjadi khalifah Marwan II), khalifah terakhir Umayyah (744-750 M), berhasil menundukkan Kerajaan Khazar yang menguasai daerah Rusia seperti Rusia bagian selatan, bagian barat Kazakhstan, bagian timur Ukraina, Azerbaijan, dan sebagian besar Kaukasus (meliputi Circassia, Dagestan, Chechnya, dan sebagian wilayah Georgia). Keberhasilan Marwan II ini juga menjadikan wilayah Kaukasus utara, yang sebelumnya menjadi vassal kerajaan Khazar, termasuk daerah Volga bawah menjadi bagian dari kekuasaan Dinasti Umayyah (Akhmetova, 2013: 18).

Di kawasan yang kini menjadi Republik Tatarstan, Islam disebarkan secara damai melalui jalur perdagangan dan hubungan ekonomi. Pada abad ke-8 M di kawasan ini berdiri Dinasti Bulghar yang menempati lokasi strategis di antara sungai Kama (Chulman) dan sungai Volga. Oleh karenanya, Dinasti Bulghar menjadi salah satu rute penting dalam lalu lintas perdagangan internasional

[1] Kyrkhlyar: Legenda Makam 40 Sahabat Rasulullah - Russia Beyond (rbth.com)

antara Asia dan Eropa. Sejarawan dan filsuf terkenal dari Tatarstan abad ke-19 M, Shihabuddin Marjani, menyatakan bahwa Bulghar merupakan kota paling maju di Eropa setelah Roma dan Konstantinopel di mana Islam masuk ke negeri ini pada waktu yang hampir bersamaan dengan masuknya Islam di kawasan Andalusia (Spanyol). Pada permulaan dekade kedua abad ke-10 M, atas permohonan dari penguasa Bulghar, Bin Salki Belekvar, khalifah Almuqtadir (908-932 M) dari dinasti Abbasiyah mendelegasikan ulama untuk mengajarkan agama dan hukum Islam dan juga mengirim arsitek profesional untuk membangun masjid dan benteng ke dinasti tersebut (Akhmetova, 2013: 18).

Gelombang islamisasi di wilayah Rusia berikutnya dilakukan pada periode Golden Horde di bawah kekuatan Mongol. Penguasa Golden Horde yang memeluk Islam pertama kali adalah Berke Khan (1255-1266 M). Pada masa kekuasaan Uzbeg Khan, salah satu pemimpin Golden Horde, Islam menjadi agama resmi negara. Dia juga memaksa para elite Mongol untuk memeluk Islam dan, pada saat yang sama, memberlakukan kebijakan toleransi keagamaan kepada umat Kristen dan Pagan lokal yang hidup di bawah naungan kerajaannya. Islam tidak hanya menjadi identitas politik, tetapi juga telah menjadi identitas budaya dan spiritual masyarakat Rusia (Akhmetova, 2013: 22-38).

Berdasarkan pada penjelasan tentang proses islamisasi di Rusia di atas, kiranya tepat untuk mengatakan bahwa sebagian besar Muslim di Rusia hari ini adalah *indigenous,* umat Islam yang berakar dari sejarah panjang islamisasi, bukan berasal dari imigran pada abad modern. Beriringan dengan bangkitnya kekuatan kerajaan Kristen Ortodoks dan proses merumuskan negara-bangsa, dinasti-dinasti Islam di Rusia mulai ditaklukkan dan dianeksasi di bawah Imperium Tsar Rusia pada abad ke-16 dan ke-17 M. Hal ini berlanjut pada masa rezim Uni Soviet yang lahir setelah Revolusi Boshevik pada 1917 yang secara perlahan menjadikan Islam sebagai agama minoritas. Pasca runtuhnya Uni Soviet, angin segar keberagamaan di Rusia mulai menguat di mana penguasa Rusia perlahan mengakui dan merangkul umat Islam yang dianggap

sebagai salah satu kekayaan warisan budaya Rusia sekaligus sebagai medium diplomasi Rusia terutama ke negara-negara Muslim di dunia.

Sebuah sumber menyebutkan bahwa Presiden Indonesia Soekarno juga mempunyai peran signifikan dalam perkembangan Islam di Rusia. Sumber tersebut menyebutkan bahwa pada periode 1955-1960 Ir. Soekarno diundang oleh Presiden Uni Soviet dalam upaya untuk mencari dukungan politik. Pada kunjungan ini Soekarno mensyaratkan untuk bisa menemukan makam Imam Bukhorie di daerah Bukhara, Samarkand, Uzbekistan (semula menjadi wilayah Uni Soviet). Syarat tersebut dikabulkan dan kunjungan Soekarno terlaksana. Karena tidak ada bukti dan dokumen yang jelas tentang hal ini, beberapa sejarawan agak meragukan kebenaran hal ini.[2] Namun demikian, sumber lain menyebutkan bahwa Presiden Soekarno cukup dikenal di kalangan Muslim di wilayah selatan Rusia. Sumber lain juga menyebutkan peran Presiden Soekarno dalam pembukaan Kembali sebuah masjid di Saint Petersburg yang ditutup dan dijadikan gudang. Masjid biru itu kemudian dikenal dengan nama Masjid Biru Soekarno.[3]

C. Populasi dan Demografi

Rusia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya berafiliasi dengan Kristen Ortodoks yang jumlahnya mencapai 80 juta jiwa (± 70%). Namun demikian, yang terdaftar sebagai anggota Gereja Ortodoks Rusia hanya sekitar 41%. Adapun umat Islam berkisar antara 15% sehingga menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Agama lainnya yaitu Kristen Evangelis (2,5%), Yahudi, Budha, dan Hindu (1%), Katolik (0,5%), dan 10-15% Atheis atau Agnostik serta 4% agama Kristen yang tidak berafiliasi dengan organisasi gereja. Adapun agama-agama yang terdaftar di Kementerian Kehakiman Pemerintah Federasi Rusia meliputi

[2] https://tirto.id/menguji-kebenaran-kisah-sukarno-menemukan-makam-imam-bukhari-cFjT

[3] https://republika.co.id/berita//qspv7c282/sejarah-panjang-masjid-biru-soekarno-di-rusia

Kristen Ortodoks, Islam, Protestan, Jehovah Witness, Kepercayaan (*Old Believers*), Yahudi, Budha, dan Katolik (Lunkin, 2017: 1-2).

Sensus penduduk yang dilakukan oleh Uni Soviet pada 1989 menyatakan bahwa jumlah Muslim di Rusia berjumlah 12 juta (8%) dari seluruh populasi penduduk Rusia. Selanjutnya, sensus pada 2002 oleh pemerintah Federasi Rusia diketahui bahwa penduduk Muslim berjumlah 14,5 juta jiwa dari total populasi penduduk 144 juta. Beberapa sumber menyebutkan bahwa jumlah populasi Muslim di Rusia saat ini berkisar pada angka 20 juta jiwa dari 146 juta penduduk Rusia (2015). Sementara itu, Ravil Gaynuddin, ketua Mutfi Rusia, menyatakan bahwa umat Islam di Rusia berjumlah 23 juta jiwa (2005) dan 25 juta jiwa pada tahun 2018 (Smith, 2006:1; *Al-Jazeera.com*, 2018). Sebagai perbandingan, Pewforum.org (2011) memperkirakan jumlah Muslim di Rusia pada 2010 berkisar pada angka 16,4 juta pada tahun 2010 dan akan berkembang menjadi 18,6 juta pada 2030. Populasi Muslim di Rusia diperkirakan mengalami peningkatan dari 11,7 % pada 2010 menjadi 14,4% pada 2030.

Jumlah di atas merupakan yang terbesar di seluruh negara-negara di Eropa setelah Turki. Faktor utama meningkatnya populasi Muslim di Rusia adalah angka kelahiran dan masuknya para pekerja imigran dari negara-negara bekas Uni Soviet dan Asia Tengah seperti Tajikistan, Uzbekistan, dan Kirgizstan. Rata-rata perempuan Muslim Rusia memiliki rasio 2,3 anak per perempuan Muslim, dibandingkan dengan rata-rata kelahiran nasional yang hanya 1,5 anak per perempuan. Hasil survei pada 2005, misalnya, rata-rata angka kelahiran perempuan Muslim di Dagestan sebesar 1,8 anak per perempuan Muslim versus 1,3 anak per perempuan Rusia secara keseluruhan. Pada tahun tersebut diperkirakan populasi masyarakat Rusia mengalami penurunan sebesar 400.000 pada pertengahan 2005, sementara di republik-republik Muslim mengalami kenaikan seperti di Chechnya, Dagestan, dan Ingushetia (Smith, 2006: 1). Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan rata-rata penduduk Muslim di Rusia sebesar 0,6 per tahun. Sementara itu, perempuan Rusia menempati peringkat atas negara-negara dengan angka aborsi yang tinggi (45%) dan mengalami penurunan angka kelahiran

sebesar 0,6 per tahun dalam dua puluh tahun terakhir (Pewforum.org, 2011).

Kehadiran imigran dari negara-negara Asia Tengah menjadi faktor penting lainnya yang mempengaruhi meningkatnya jumlah umat Islam di Rusia. Jumlah imigran yang terdaftar di badan imigrasi Rusia kurang lebih mencapai delapan juta orang tenaga kerja. Selain itu, Badan Imigrasi Pusat (*Federal Migration Service*) memperkirakan di sana terdapat lebih dari lima juta tenaga kerja illegal yang hidup di Rusia (Akhmetova, 2013: 46). Sebagai perbandingan, PBB memperkirakan bahwa jumlah imigran di Rusia baik yang resmi maupun ilegal jumlahnya sekitar 11 juta tenaga kerja. Pada 2013 sebuah survei yang dilakukan oleh VTsIOM, lembaga survei yang dibiayai negara, merilis bahwa satu dari tujuh orang Rusia tidak mau menjadi tetangga Muslim, seperempat tidak mau hidup berdampingan dengan warga asli Kaukasus, 28% tidak menginginkan dibukanya pintu imigrasi dari Asia Tengah. Survei tersebut juga menemukan bahwa 45% warga Rusia mendukung slogan kelompok nasionalis "Rusia untuk etnis Rusia" (Antunez, 2016).

Populasi Muslim mendominasi di tujuh negara dari 21 republik di Rusia. Dari seluruh Muslim yang ada di Rusia: 16,3% di republik Dagestan, 14,6% di Bashkortostan, 13,5% di Tatarstan, 7,4% di Chechnya, 4,7% di Kabardino-Balkaria, 3% di Ingushetia 1,9% di Karachaevo-Cherkessia, dan 0,8% di Adygea. Secara keseluruhan, 62,3% Muslim berada di republik-republik tersebut. Adapun umat Islam lainnya menempati kota-kota penting seperti di Moskow (3,7%), Tyumen (3,0%), dan kota lainnya seperti St. Petersburg, Nizniy Novgorod, dan wilayah Siberia (Pewforum.org, 2011).

D. Karakteristik dan Sebab-sebab Minoritas

Bangkitnya Imperium Tsar Rusia pada pertengahan abad ke-14 M menjadi awal mula hilangnya kekuatan-kekuatan dinasti Islam di Rusia. Satu demi satu dinasti-dinasti Muslim ditaklukkan pada abad ke-16 M dan berada di bawah kekuasaan Tsar Rusia, meliputi Kazan (1552 M), Astrakhan (1556 M), dan wilayah

bagian barat Siberia (1598). Periode ini tidak berselang lama dari pengusiran umat Islam di Andalusia/Spanyol yang dikenal dengan istilah *reconquista* pada penghujung abad ke-15 M. Secara perlahan, beriringan dengan proses aneksasi tersebut, Kota-kota penting umat Islam dikuasai oleh imperium Tsar Rusia dan mendirikan jaringan benteng yang dihuni secara eksklusif oleh orang-orang etnis Slavia.

Pada 1593, Fyodor Ivanovic (1584-1598 M), penguasa Tsar Rusia terakhir, anak dari Ivan sang Bengis, memerintahkan untuk menghancurkan masjid dan lembaga pendidikan Islam di seluruh wilayah jajahannya. Kebijakan ini berlangsung sampai beberapa abad kemudian. Pada 19 November 1742, misalnya, Empress Elizabeth (1741-1762) menggulirkan keputusan untuk menghancurkan masjid. Di Kazan setidaknya 418 masjid dihancurkan dari 536 masjid yang ada. Di Siberia sekurangnya 98 bangunan masjid dari total 133 masjid, dan di Astrakhan berjumlah 25 dari 40 masjid. Pada saat yang sama, atas dasar paham negara-bangsa Rusia yang didefinisikan sebagai gabungan antara etnis Slav dan Kristen Ortodoks, Empress Elizabeth mendirikan lembaga baptis (*Office for Newly Baptised*) yang bertujuan untuk mengonversi umat Islam ke dalam agama Kristen.

Shireen T. Hunter, direktur *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) di Washington DC, menyebut kebijakan Tsar Rusia sebagai represi dan asimilasi. Kebijakan tersebut merefleksikan ideologi negara Rusia kala itu yang menyatakan bahwa akar dari negara Rusia berasal dari warisan Byzantium dengan berpegangan pada prinsip penyatuan agama dan negara. Dalam hal ini, Rusia menyatukan antara agama, etnis, dan kebangsaan. Sebagai konsekuensinya, menjadi seorang Rusia berarti menjadi pengikut Kristen Ortodoks dan beretnis Slavia.

Puncak penindasan dengan berbagai kebijakan negara yang menjadi Muslim di Rusia menjadi minoritas terjadi pada pemerintahan Uni Soviet (1917-1991) khususnya pada masa kepemimpinan Joseph Stalin (1923-1953). Beberapa kebijakannya dalam merepresi umat Islam di antaranya yaitu menangkap,

memenjarakan, dan membunuh para ulama, mengubur dan membakar literatur-literatur keislaman, menutup madrasah dan mengajarkan Ateisme kepada siswa Muslim, dan memecah belah wilayah-wilayah Muslim menjadi beberapa negara republik. Pada tahun 1930-an, misalnya, hampir semua masjid, madrasah, dan pesantren (maktab) dihancurkan atau dialih-fungsikan menjadi klub sosial, sekolah, kantor pos, gudang, dan kandang. Sebelum Revolusi Oktober 1917, di seluruh wilayah Rusia masih terdapat kurang lebih 26.000 masjid yang berfungsi dengan baik beserta 45.000 ulama. Pada 1942, jumlah tersebut berkurang secara drastis menjadi 1.312 masjid dan 2.000-an ulama. Selain itu, hampir 14.500 lembaga pendidikan Islam di seluruh Rusia telah dihancurkan (Akhmetova, 2013: 38-41).

Relasi Soviet dan umat Islam mengalami perubahan pasca Perang Dunia II (1941-1945). Hal ini dilatarbelakangi antara lain tawaran dari Adolf Hitler kepada pemimpin Muslim untuk menjadi negara yang merdeka dengan syarat umat Islam bekerja sama dengan pihak Nazi. Menanggapi hal tersebut, pihak Soviet menjanjikan untuk menghentikan kampanye anti-Islam dengan catatan mereka tetap loyal kepada negara. Atas kesepakatan tersebut, Soviet mendirikan lembaga Mufti untuk umat Islam, membuka kembali sejumlah masjid, termasuk madrasah. Namun demikian, pada era yang disebut dengan "Great Patriotic War" ini banyak tentara Muslim yang terbunuh. Sebagian lainnya dideportasi ke kawasan Asia Tengah dan dibunuh dengan alasan mereka menjalin kerja sama dengan pihak Nazi Jerman (Akhmetova, 2013: 43-44).

Selama masa Perang Dingin (1945-1991), Islam tetap tidak mendapatkan tempat yang layak di level negara. Di dalam buku-buku ajar, Islam dipersepsikan sebagai agama pedang dan agama yang mengeksploitasi masyarakat. Muslim di Soviet pada bulan Ramadhan, misalnya, tidak jarang yang dipaksa untuk mengonsumsi daging babi atau meminum minuman beralkohol. Mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk disingkirkan dari anggota kepartaian. Keadaan mereka baru membaik setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991 (Akhmetova, 2013: 43-44).

E. Corak Kehidupan Keagamaan Muslim di Rusia

Sebagian besar Muslim di Rusia adalah penganut Islam Sunni (Islam tradisional) dengan mengikuti mazhab Hanafi dan Syafii. Mazhab Hanafi adalah mazhab yang diikuti oleh sebagian besar penduduk Muslim di Rusia meliputi Tatar, Bashkir, sebagian besar dari suku di Kaukasus Utara dan para imigran dari Asia Tengah. Adapun Mazhab Syafii dianut sebagian besar penduduk di Dagestan (kecuali Nagoya), Chechnya, Ingush, dan Kabardino-Balkaria. Adapun kelompok Syiah merupakan sebagian kecil dari Muslim Rusia. Mereka secara umum berada di Kaukasus Utara yang dipeluk oleh orang-orang Azeri dan etnis Lezgin di Dagestan.

Sebagaimana Islam tradisional di kawasan lain, di Rusia juga terdapat gerakan tarekat yaitu Naqsabandiyah, Qadiriyah, dan Sadzliliyah. Kelompok-kelompok aliran sufisme ini mengalami penurunan di kawasan Volga dan tetap kuat dan tersebar luas di Kaukasus Utara dan beberapa republik seperti Dagestan, Chechnya, dan Ingushetia.

Jumlah masjid yang dibangun di Rusia kini mengalami perkembangan jumlah yang signifikan. Pada 1980-an, ketika masih di bawah pemerintahan Uni Soviet, hanya terdapat 179 masjid yang beroperasi. Pada tahun 1998 sudah berdiri sekitar 5.500 masjid di seluruh wilayah Rusia. Di Republik Chechnya setidaknya terdapat 2.000 masjid, 1.670 di Dagestan, sekitar 1.000 masjid di Tatarstan, dan 400 masjid di Ingushetia. Sejumlah masjid juga didirikan di kota-kota lama di Rusia seperti di Tver, Kostroma, Yaroslavl, Ryazan, Nizhny Novgorod dan lainnya. beberapa pengamat menyatakan bahwa pada tahun 2015 setidaknya terdapat 11.000 masjid yang terdaftar, 12.000 tempat ibadah (semacam mushola), dan jumlahnya bisa mencapai 25.000 masjid di seluruh wilayah Rusia (Akhmetova, 2013: 43-44).

Pada 2005, dibangun salah satu masjid terbesar di Eropa di Kazan Kremlin. Masjid ini bernama Qul-Syarif Mosque dan diakui sebagai salah satu Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada 2000. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini dilengkapi dengan museum

Islam, sebuah perpustakaan dan penerbitan, dan menjadi salah satu pemandangan arsitektur yang penting di Kazan. Pada 2008 masjid megah lainnya dibangun di Grozny, ibukota Chechnya, bernama Ahmad Kadyrov Grozny Central Dome Mosque yang diperkirakan mampu menampung sepuluh ribu jamaah (Akhmetova, 2013: 58)

Pada Juli 2015, di kota Moskow sudah berdiri setidaknya enam masjid. Beberapa sumber mengatakan bahwa Muslim yang tinggal di kota ini mencapai kurang lebih empat juta jiwa. Oleh karena itu, ketika menyelenggarakan perayaan hari raya seperti Idul Fitri dan Idul Adha jamaah yang sholat di masjid-masjid tersebut sampai mengular ke ruas-ruas jalan. Sementara itu, ketika hendak meminta izin pemerintah untuk mendirikan bangunan masjid baru sering kali mendapatkan protes dan unjuk rasa dari penduduk Rusia yang beragama lain (Antunez, 2016).

Perkembangan menarik lainnya juga terjadi dalam bidang pendidikan. Mulai dari *Madrasah Ibtidaiyah* sampai perguruan tinggi sudah ada di Rusia. Berdasarkan data dari *AsiaNews*, pada tahun 2011 terdapat 96 lembaga pendidikan Islam dan 7 universitas. Sebagai contohnya adalah Russian Islamic University di Kazan, Dagestan Islamic University, Islam Institute Moscow, dan Instite of Theology and International Relations di Dagestan. Jumlah lembaga pendidikan di seluruh wilayah Rusia diperkirakan mencapai 3.000 lembaga pendidikan. Murid yang belajar pun juga digratiskan. Siswa-siswa yang belajar di pesantren (*full-time student*) mendapatkan jatah makan sehari tiga kali. Pemerintah Rusia sendiri mengucurkan dana sekitar sepuluh sampai dengan dua belas juta dolar AS yang dialokasikan untuk pendidikan Islam.

Terdapat ratusan organisasi Islam di seluruh Rusia. Namun, setidaknya terdapat tiga organisasi payung sebagai representasi umat Islam di Rusia, yaitu:

a. Russian Council of Mufti (RCM), berpusat di Moskow dan berdiri pada 1996 dan dipimpin oleh Ravil Gainutdin.

b. Central Spiritual Board of Muslim of Russia and European Countries of the Commonwealth of Independent States (CSBM). Lembaga ini berdiri pada 1992 dan berlokasi di Ufa, Bashkortostan dan dipimpin oleh mufti Talgat Tadzhuddin.
c. Muslim Coordination Centre di Kaukasus Utara yang dipimpin oleh mufti Ismail Berdiyev.

Setiap organisasi massa Islam, pembangunan masjid baru, termasuk sertifikasi halal harus didaftarkan kepada salah satu dari ketiga organisasi tersebut agar terdaftar dan mendapatkan pengakuan secara resmi sebagai organisasi legal. Sejumlah pengamat menilai bahwa CMSB dan RMC saling berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh dari umat Islam di Rusia, terutama di kawasan Kaukasus Utara dan sebagai representasi mufti utama di Rusia. Perebutan kekuasaan ini hampir terjadi di seluruh wilayah Rusia, dengan para imam masjid saling berebut supremasi, menuduh sebagai ekstremis dan murtad, dan mengambil simpati sensor dari pemerintah dan polisi untuk ikut campur di dalamnya (Antunez, 2016).

F. Diskriminasi, Islamofobia, dan Radikalisme

Islam di Rusia bukan agama yang dibawa oleh para imigran seperti halnya yang terjadi di belahan Eropa lainnya, melainkan agama yang telah mengakar kuat di sebagian wilayah Eropa. Sehingga, "ancaman Islam" atau wacana "islamisasi" yang menjadi salah satu sebab Islamofobia di negara ini lebih merupakan hal baru seiring maraknya radikalisme Islam dan kedatangan para buruh migran terutama dari negara-negara Islam dari Asia Tengah.

Secara kenegaraan, Islam diakui sebagai agama tradisional bersama tiga agama lainnya yaitu Kristen, Yahudi, dan Budha. Negara Rusia dalam konstitusinya menjamin kebebasan beragama termasuk ekspresi baik individual maupun komunal. Presiden Rusia Dmitry Medvedev (2008-2012) pada kunjungannya ke Masjid Besar Moskow pada 2009 menyatakan bahwa 57 dari 182 beragam etnis yang ada di Rusia adalah Muslim. Oleh karena itu, Islam memiliki

kontribusi yang penting dalam mendukung kehidupan masyarakat sipil terutama dalam hal memberikan petunjuk spiritual dan moral serta melawan ekstremisme dan Xenopobia.

Diskriminasi terhadap umat Islam di Rusia sebagian besar berasal dari kelompok Kristen Ortodoks Fundamentalis dan kelompok ultra-nasionalis. Kelompok pertama, seperti yang tersebar dalam pemberitaan di media, menganggap keberadaan Muslim sebagai ancaman terhadap Kristen Ortodoks. Islam dianggap akan menggantikan Kristen Ortodoks yang menjadi agama mayoritas penduduk Rusia (63%). Selain itu, kelompok ini juga berpandangan bahwa Islam adalah penghambat bagi kemajuan masyarakat Islam sendiri (Malakhov dan Letnyakhov, 2018: 11-12). Adapun kelompok ultra-nasionalis menggulirkan isu seperti anti imigran Muslim, Islam tidak sesuai dengan nilai-nilai Rusia modern, dan teror peradaban.

Meningkatnya sentimen anti-imigran dan anti-Muslim pada dasarnya dilatarbelakangi oleh perubahan demografi tersebut. Sebuah survei pada Juli 2014 menyatakan bahwa 65% warga Rusia meyakini bahwa kehadiran imigran yang berkaitan dengan kasus terorisme dan pengaruh dari Barat merupakan ancaman terbesar keamanan negara Rusia. Adapun survei pada 2011 menyatakan bahwa 55% warga Rusia merasa tidak suka kepada etnis non-Rusia dan 63% meyakini bahwa etnis Rusia harus diperlakukan lebih baik dari pada etnis lainnya. Pada level akar rumput, meluasnya Xenopobia ditujukan kepada buruh migran yang sebagian besar berasal dari negara-negara Muslim (Antunez, 2016).

Terorisme dan Islam radikal menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Rusia dalam dua dekade belakangan terutama setelah peristiwa 9 September 2001. Selain membentuk UU anti radikalisme, Rusia juga melarang organisasi-organisasi Islamist Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Jamaah Islamiyah, Jamiah at-Turath al-Islami, dan Laskar e-Taiba, dan Taliban (Antunes, 2016). Berdasarkan *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama 2018* dari Departemen Dalam Negeri Amerika dikatakan bahwa buku-buku

karya Badiuzzaman Said Nursi dilarang beredar di Rusia karena ditengarai mengandung muatan ekstremisme. Sejumlah pengikut Nurdzular, para pengikut Nursi, ditangkap dan dipenjara. Salah satu contohnya yaitu hukuman satu tahun penjara bagi dua imam dari Novosibirsk, Imam Ilkhom Merzhov and Kamil Odilov, pada 2013 karena diketahui mengadakan kajian diskusi membahas salah satu karya Said Nursi (SOVA, 2014).

Berdasarkan laporan dari Soufan Group, pemerintah Rusia memperkirakan sebanyak 2.400 warga Rusia bergabung menjadi pasukan jihadis ISIS. Lembaga ini juga memberikan informasi bahwa 12 dari 15 republik bekas Uni Soviet mengirimkan sebanyak 4.900 jihadis ke Syria. Pada akhir 2015, pemerintah Rusia memperkirakan sejumlah 2.900 warganya bergabung ke dalam kelompok ISIS (Antunes, 2016). Mayoritas Jihadis tersebut berasal dari Kaukasus Utara—Chechnya dan Dagestan— dan sebagian kecil lainnya berasal dari Azerbaijan dan Georgia (Antunes, 2016). Kaukasus Utara sendiri sudah sejak lama menjadi salah satu wilayah penting tumbuhnya gerakan ekstremisme yang berjejaring dengan gerakan terorisme global baik di Eropa Barat, Asia Tengah, maupun Afganistan (Cohen, 2012).

Sejumlah sumber menyebutkan bahwa mata rantai yang menghubungkan Kaukasus dengan terorisme global adalah Yusuf Muhammad al-Emirati yang datang ke Chechnya tahun 1999 dan Abdullah Kurd sebagai pemimpin berbagai peristiwa terorisme di republik Chechnya. Keduanya mati di tangan polisi Rusia pada April 2011. *Antara News* mengabarkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 di pinggiran ibukota Dagestan terjadi bom bunuh diri yang menewaskan 12 orang dan mencederai 110 orang. Pada bulan Januari 2011 juga terjadi bom bunuh diri di bandara Domodedovo Moskow yang menewaskan 37 orang dan dua ledakan bom di stasiun kereta api bawah tanah Moskow pada tahun 2010 yang menewaskan setidaknya 40 orang.

G. Tantangan dan Harapan Muslim di Rusia

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh para ahli dan sejumlah lembaga survei bahwa dari segi kuantitas Muslim di Rusia mengalami tren peningkatan yang diperkirakan pada tahun 2050 agama Islam akan menjadi agama dengan jumlah pemeluk paling banyak di Rusia. Permasalahan demografi ini menjadi tantangan dan harapan baik bagi pemerintah Rusia maupun internal umat Islam di Rusia. Juan Carlos Antunes (2016), misalnya, menyatakan bahwa hubungan antara pemerintah Rusia dan warga Muslimnya akan ditentukan oleh sejauh mana integrasi nasional dan sikap dari agama-agama minoritas; apakah mereka akan loyal kepada pemerintah atau justru semakin menguatkan kehendak untuk memisahkan diri dari Pemerintah Federasi Rusia? Harus diakui bahwa Islam pasca runtuhnya Uni Soviet menjadi salah satu kekayaan warisan kebudayaan Rusia sebagai representasi negara Rusia yang menyatakan diri sebagai multi-etnis dan multi-agama. Selain itu, Islam juga menjadi salah satu medium yang digunakan pemerintah Rusia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga, termasuk di Timur Tengah dan Afrika Utara, untuk kepentingan kebijakan luar negeri Rusia.

Sementara itu, sejumlah pengamat menyatakan bahwa pasca runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menjadi salah satu titik penting berkembangnya paham Islam yang berasal dari luar Rusia khususnya Salafi dari Timur Tengah. Gerakan Salafi berkembang dengan pesat terutama di wilayah Volga setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, lembaga-lembaga yang menjadi payung organisasi umat Islam di Rusia cenderung tidak kompak antara satu dengan lainnya. Baik CSBM maupun RCM saling bersaing untuk memperebutkan akses kepada pemerintahan sehingga tidak jarang menimbulkan konflik di akar rumput. Hal ini dimanfaatkan oleh kelompok Salafi untuk mendapatkan tempat di masyarakat. Kedua, dengan mendapatkan pendanaan yang besar dari Arab Saudi mereka mampu membangun dan merenovasi masjid serta mendirikan beragam lembaga pendidikan Islam. Sebaliknya, lembaga-lembaga perwakilan umat Islam seperti telah disebutkan

tidak melakukan hal yang sama dan pada saat yang sama tidak memiliki ahli agama dengan kualifikasi tertentu untuk diangkat sebagai imam (Markedonov: 2013, 15-16).

H. Kesimpulan

Populasi Muslim di Rusia merupakan yang terbesar di Eropa. Berbeda dengan populasi umat Islam di negara Eropa lainnya di mana mayoritas merupakan warga pendatang, Islam di negeri beruang merah ini merupakan warga asli yang telah mengakar sejak abad ke-7 Masehi. Kebangkitan pemerintahan Tsar Rusia pada abad ke-14 Masehi menjadi awal mula umat Islam menjadi minoritas. Dinasti-dinasti Islam di Rusia perlahan dianeksasi dan kehidupan ekonomi mereka diambil alih oleh Tsar Rusia. Hal ini berlanjut pada masa berikutnya di bawah pemerintahan Lenin dan Stalin dengan kebijakan anti-agama. Beberapa kebijakannya dalam merepresi umat Islam di antaranya yaitu menangkap, memenjarakan, dan membunuh para ulama, mengubur dan membakar literatur-literatur keislaman, menutup madrasah dan mengajarkan Ateisme kepada siswa Muslim, dan memecah belah wilayah-wilayah Muslim menjadi beberapa negara republik.

Kehidupan umat Islam mulai mendapatkan angin segar setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Islam bahkan diakui sebagai salah satu "agama tradisional" di Rusia dan memiliki lembaga payung yang memperjuangkan umat Islam di level pemerintahan. Bersamaan dengan itu, runtuhnya Uni Soviet juga menjadi babak baru masuknya pengaruh Islam dari luar terutama Timur Tengah dalam kehidupan Muslim di Rusia. Islamisme dan terorisme kini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi baik umat Islam maupun otoritas negara Rusia.

9

ISLAM DI SPANYOL

Islam di Spanyol menarik untuk dikaji karena mempunyai sejarah yang panjang dan pernah menjadi bagian kejayaan Islam pada abad pertengahan. Sejarah ini menjadi fenomena yang menarik karena di wilayah Eropa yang dikenal sebagai Andalusia ini pernah ditorehkan peradaban Islam yang panjang, yaitu sejak abad ke-9 hingga ke-15. Beberapa kota yang agak akrab dengan peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia adalah Cordoba, Granada, dan Sevilla. Di tiga wilayah ini kita mengetahui berbagai peninggalan peradaban Islam seperti Madinatuz Zahra, istana Alhambra, Mesquita de Cordoba dll. Pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah masih ada Muslim di wilayah ini? Sejauh mana budaya Islam masih tersisa dan berpengaruh di bekas wilayah kejayaan Islam ini dls.? Sub-bab ini akan membahas Islam di Spanyol dari sejarahnya, peninggalannya, hingga kondisi Muslim di era kontemporer.

A. Pendahuluan

Spanyol merupakan salah satu negara yang terletak di bagian barat daya Eropa dengan menempati 85% semenanjung Iberia dan 15% sisanya menjadi bagian dari negara Portugal. Berdasarkan data dari Word Bank populasi Spanyol pada 2020 berjumlah 47.351.57 jiwa yang menempati wilayah seluas 505.370 km^2. Setelah perang saudara tahun 1936-1939 Spanyol menjadi negara republik di bawah pemerintahan diktator Francisco Franco (1939-

1975) dengan menjadikan agama Katolik sebagai agama resmi negara. Sejak 1978, beriringan dengan proses demokratisasi, status Katolik sebagai agama negara ini dicabut dan mulai mengakui agama lainnya dalam rangka mempromosikan multikulturalisme. Secara administratif Spanyol terdiri dari 17 provinsi dan dua kota otonom di Afrika Utara yaitu Ceuta dan Melilla, di mana komposisi penduduk Muslimnya memiliki persentase terbesar di Spanyol, serta 50 daerah setingkat kabupaten.

Berdasarkan catatan sejarah, Islam pertama kali memasuki kawasan ini pada dekade pertama abad ke-8 Masehi oleh pasukan Muslim yang datang dari Afrika Utara. Sebagian besar dari pasukan Muslim tersebut berasal dari suku Berber yang kemudian oleh masyarakat Spanyol lebih dikenal sebagai bangsa *Moor* atau *Moro* yang artinya orang-orang berkulit hitam. Istilah Moro ini pula yang digunakan di kemudian hari ketika bangsa Spanyol melakukan pelayaran dan penaklukan di Asia Tenggara, untuk menyebut umat Islam di beberapa kawasan di Filipina.

Islam menguasai kawasan semenanjung Iberia hampir selama kurang lebih 800 tahun (711-1492). Beberapa kota penting yang menjadi pusat perkembangan peradaban Islam di antaranya adalah Cordoba, Granada, Toledo, dan Sevilla. Para sejarawan mencatat bahwa kota Cordoba menjadi salah satu kota terpenting di dunia yang mengukir beragam kemajuan peradaban seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ekonomi. Kota ini dapat disejajarkan dengan pusat kemajuan dunia di tempat lain seperti Baghdad dan Konstantinopel. Namun, setelah runtuhnya Granada, kerajaan Islam terakhir di Andalusia pada 1492 M, umat Islam perlahan meninggalkan Spanyol atas kebijakan kerajaan Castilia dan Aragon yang melakukan pengusiran kepada seluruh umat Islam di negeri tersebut.

Saat ini setidaknya terdapat kurang lebih dua juta Muslim di Spanyol atau sekitar 4% dari seluruh populasi. Dinamika kehidupan umat Islam di Spanyol dalam tulisan ini diulas dengan memberikan penekanan pada relasi negara dan

kelompok agama minoritas yang setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu: pertama, transisi dari pemerintahan diktator Fransisco Franco (1939-1975 M) menuju pemerintahan demokratis pada 1978; kedua, pengakuan negara terhadap tiga agama minoritas yakni Yahudi, Protestan, dan Islam pada 1992; ketiga, kasus terorisme di Madrid pada 2004 dan di Barcelona pada 2017; dan Islamofobia yang mengakar dalam sejarah Spanyol dan berkembang pada periode kontemporer di berbagai belahan Eropa.

B. Sejarah Islam di Spanyol

Sejarawan Reinhard Dozy dalam karya monumentalnya *Spain Islam: A History of the Muslems in Spain* (1913) menyatakan bahwa Islam masuk ke wilayah Spanyol terjadi pada masa Dinasti Bani Umayyah pada masa kepemimpinan Walid bin Abdul Malik (705-715 M). Sebelum memasuki kawasan Andalusia, Islam terlebih dahulu telah menguasai hampir seluruh kawasan Afrika Utara. Pada saat itu, kawasan Andalusia dikuasai oleh kerajaan Gothia Barat (Gothik) yang dipimpin Raja Roderick. Musa bin Nushair, gubernur Bani Umayyah di Afrika Utara, berencana untuk menguasai Andalusia dengan terlebih dahulu mengirimkan pasukan telik sandi yang dipimpin oleh Tharif bin Malik. Setahun kemudian, pada 711 M, pasukan Muslim di bawah komando Thariq bin Ziyad berhasil menyeberangi Selat Gibraltar untuk menguasai wilayah Spanyol. Tidak berselang lama, pasukan Muslim berhasil memukul mundur pasukan bangsa Gothik lalu menguasai kota-kota penting seperti Cordoba, Granada, dan Toledo.

Berselang sekitar lima tahun setelah runtuhnya Dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661-750), salah satu keturunan Muawiyah yakni Abdurrahman Al-Dakhil berhasil memasuki Andalusia dan diangkat sebagai amir Dinasti Bani Umayyah II di Spanyol. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III (912-961 M), umat Islam mencapai puncak kejayaannya. Pada 929 M dia memproklamirkan diri sebagai khalifah dengan gelar *al-Nashir li Dinillah* yang

bersaing dengan dua kekhalifahan Islam lainnya yakni Dinasti Abbasiyah di Baghdad (750-1258) dan Dinasti Fatimiyah di Mesir (909-1172). Setelah wafatnya Abdurrahman III kekhalifahan Islam di Andalusia secara perlahan mengalami kemunduran. Singkatnya, beberapa kekhalifahan atau keamiran yang pernah ada di Andalusia adalah Kekhalifahan Umayyah di Cordoba (929-1031), Almurabithun (1091– 1145), Almuwahhidun (1151-1212), dan Bani Ahmad Granada (1238–1492).

Islam di Andalusia mengalami kejayaan yang luar biasa. Granada, Cordoba, Toledo, dan Sevilla menjadi pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Beberapa tokoh Muslim pada masa itu diantaranya adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi (936-1013), Ibnu Hazm (994-1064), Ibnu Rusyd (1126-1198), Ibnu Arabi (1165-1240), Abu Ishaq Al-Zarqali (1029-1087) dll.

Pada periode Muluk al-Tawaif (1013-1085 M), dinasti-dinasti kecil umat Islam di Andalusia saling bertikai. Kebangkitan Kerajaan Kristen di bagian utara Andalusia menjadi awal mula kehancuran peradaban Islam di Andalusia. Satu persatu wilayah kekuasaan umat Islam diambil alih oleh Kerajaan Kristen atau populer disebut sebagai reconquesta (penaklukan kembali). Pada 1085 M Toledo dikuasai oleh Alvonso VI dan sampai sebelum tahun 1250 M hanya tinggal dinasti Islam di Granada yang masih bertahan (Berger, 2014: 75). Dalam rentang waktu tersebut, umat Islam yang hidup di bawah kerajaan-kerajaan Kristen lebih dikenal dengan istilah Mudejar yang mengingatkan kepada kelompok Mozareb, yakni minoritas Kristen ketika Islam masih berkuasa. Dua setengah abad kemudian, tepatnya pada 1492 M, Granada berhasil diambil alih oleh gabungan dua kekuatan kerajaan Kristen di bawah pimpinan Ratu Isabella I dari Castilia dan Raja Ferdinand II dari Aragon (Chejne, 1983: 1-3).

Reconquista bukan sekadar perang dan penaklukan kembali, melainkan juga re-populasi. Raja-raja Kristen memindahkan rakyat mereka ke daerah-daerah yang ditinggalkan umat Muslim dengan maksud membentuk populasi yang dapat diberdayakan

untuk mempertahankan daerah-daerah perbatasan. Daerah-daerah utama yang dire-populasi adalah daerah Lembah Sungai Douro, Lembah Ebro (La Rioja), dan kawasan tengah Catalonia. Dalam re-populasi, raja-raja Kristen menerapkan sistem *presura* ("serobot") lahan dan *fuero*, yaitu penerbitan "piagam-piagam" penguasaan lahan bagi orang yang merepopulasi sebuah wilayah. Reconquista telah mengusir semua Muslim (Moor atau Morisco) dari wilayah Eropa ini.

Banyak orang Morisco yang dipaksa untuk pindah agama dan menjadi "Kristen Baru". Tidak sedikit yang mempraktikkan agama Islam secara diam-diam meskipun secara lahiriah Katolik sebagai Kripto-Muslim. Akhirnya, tidak jarang banyak Muslim Morisco yang mempraktikkan agama Kristen secara lahiriah seperti minum anggur, makan babi dan hal-hal terlarang lainnya karena ancaman penganiayaan. Di sisi lain, praktik Islam secara diam-diam berlanjut hingga abad ke-16. Pada 1567, Raja Philip II akhirnya membuat peraturan bahwa penggunaan bahasa Arab adalah ilegal, dan melarang pakaian dan adat istiadat Islam dls. Terakhir, pada 1609 Raja Philip III mengeluarkan 'Edicts of Expulsion' untuk mengusir Muslim yang tersisa di Spanyol. Penganiayaan terhadap Moriscos karena praktik kripto-Islam terjadi di Granada pada tahun 1727, yaitu dengan hukuman ringan. Pada tahap ini, Islam asli dianggap telah efektif hilang di Spanyol (Mesa, 2012).

Saat ini, diperkirakan tidak ada komunitas Muslim yang tertinggal sejak abad 17 di Spanyol, kecuali sekitar 100 orang di daerah Orgiva, Alpujarras, Granada. Hampir semua penduduk Spanyol yang dulunya Muslim diusir dari negara itu. Penduduk Muslim saat ini adalah pendatang baru di abad ke-20.

C. Populasi & Demografi Muslim di Spanyol

Umat Islam di Spanyol saat ini yang mudah dijumpai di kota-kota besar seperti Madrid, Barcelona, dan Andalusia merupakan fenomena baru beriringan dengan kebijakan imigrasi negara tersebut. Gelombang pertama kedatangan umat Islam di Spanyol

dimulai pada dekade 1950-an dan berlanjut pada 1960-an sebagai hasil kesepakatan antara pemerintahan rezim Franco dan dunia Arab. Ratusan mahasiswa dari berbagai negara seperti Suriah, Mesir, Palestina, Yordania, Lebanon, dan Maroko datang untuk belajar ilmu kedokteran dan jurusan lainnya di kampus-kampus yang ada di Spanyol. Ketika penandatanganan kerja sama negara dan Islam pada 1992, jumlah Muslim di negara tersebut relatif kecil yakni sekitar 200.000, termasuk di Ceuta dan Melilla. Dua dekade berikutnya, jumlah imigran di Spanyol bertambah banyak seiring kemajuan ekonomi dan permintaan tenaga kerja di industri-industri yang ada di Spanyol. Jumlah imigran ini meningkat dari angka ratusan ribu pada akhir 1980-an menjadi 5,2 juta pada 2004 dan 5,8 juta pada 2011. (Soage, 2018).

Kelompok imigran terbesar berasal dari daerah Afrika Utara terutama Maroko. Pada awalnya mereka adalah para pekerja gelap atau pekerja tidak tetap dari Maroko di industri-industri pariwisata di sekitar area pesisir pantai Mediterania yang tujuan awalnya adalah ingin menuju ke Prancis. Mereka kemudian mengalihkan tujuan menuju Spanyol terutama di daerah protektorat Spanyol di bagian utara Maroko yakni Ceuta dan Melilla. Pada 1990-an diperkirakan jumlah mereka imigran dari Maroko mencapai 90.000 jiwa lalu berkembang signifikan menjadi 420.000 pada 2004 dan lebih dari 700.000 pada 2011 (Astor, 2014: 1725; lihat juga Soage, 2018). Sebagai tambahan, pada 1977 pengungsi dari Palestina berdatangan ke Spanyol kemudian disusul pengungsi dari Iran pada 1979. Meski demikian, jumlah pendatang dari kawasan Timur Tengah ini tidak begitu berpengaruh dari segi demografis.

Faktor lainnya yang mempengaruhi populasi dan demografi Muslim di Spanyol adalah meningkatnya orang-orang Spanyol yang melakukan konversi ke agama Islam. Mereka mulai tampak di kawasan bagian selatan Spanyol pada pertengahan 1970-an. Sebagian besar mereka adalah orang Spanyol dan sebagian lainnya berasal negara-negara Barat. Mereka masuk Islam melalui sufisme yang diajarkan oleh Ian Dallas, atau dikenal dengan Abdalqadir

al-Sufi, pendiri Murabitun World Movement (Soage, 2018; lihat juga Arigita, 2010: 73-74). Syekh Abdul Qadir sendiri merupakan seorang mualaf berkebangsaan Skotlandia yang memeluk Islam pada tahun 1967. Dia belajar sufisme kepada Syekh Muhammad bin Habib, mursyid tarekat Darqawiyah di Maroko. Selama tinggal di Spanyol pada 1980-an, selain mengajarkan tentang sufisme dan Islam mazhab Maliki, dia membangun dan membina komunitas-komunitas Muslim di sejumlah kota seperti Granada, Galicia, Basque, dan Barcelona (*alif.id*, 11 Oktober 2020). Adapun dari segi jumlah, orang-orang Spanyol yang memeluk agama Islam berkisar di angka 5.000 dan 20.000. Ada juga yang memperkirakan jumlah mereka mencapai 50.000 (Soage, 2018).

Pada 2007, studi tentang demografi Muslim di Spanyol dilakukan oleh UCIDE (*Union of Islamic Communities in Spain*) memperkirakan jumlah umat Islam di Spanyol berada di angka kurang lebih satu juta jiwa. Kebanyakan dari mereka menempati Madrid (196.689) dan bagian tenggara wilayah Catalonia (279.037), Andalusia (184.430) dan Valencia (130.471). Sensus resmi juga menunjukkan (www.ine.es) bahwa sebagian besar Muslim berasal dari Maroko (621.295), diikuti Algeria (50.383), Pakistan (42.929) and Senegal (35.875). Berdasarkan studi tersebut dinyatakan bahwa Muslim asli Spanyol menjadi kelompok kedua terbesar setelah para imigran, yang terdiri dari keturunan para imigran dan konversi masyarakat Spanyol lalu diikuti Muslim di Ceuta (30.537) dan Melilla (34.397) (Arigita, 2010: 86-87).

Jumlah populasi Muslim tersebut semakin meningkat sebagaimana dilaporkan dalam survei dari UCIDE berikutnya pada 2012 yang menunjukkan bahwa populasi Muslim di Spanyol berjumlah 1.595.221 jiwa. Sebagian besar dari mereka adalah imigran yang angkanya mencapai 1,1 juta jiwa dan sisanya sekitar 464.978 jiwa merupakan warga asli Spanyol. Survei berikutnya pada 2017 menyatakan bahwa jumlah Muslim di Spanyol berada di angka 1.946.30 jiwa atau 4% dari seluruh populasi penduduk Spanyol. Pada tahun-tahun berikutnya jumlah Muslim

mengalami penambahan walaupun tidak signifikan, yaitu pada 2018 sejumlah 1,993,675 dan pada 2019 berjumlah 2,091,656. Kantung-kantung terbesar warga Muslim berada di Catalonia, diikuti Andalusia, Madrid, dan kota-kota lain dengan jumlah relatif sedikit seperti di Cantabria, Asturias, dan Galicia. Secara keseluruhan, sekitar 70% Muslim di Spanyol adalah imigran yang mana 50% berasal dari Maroko dan 20% dari negara-negara lain (*International Religious Freedom Report*, 2019).

Data di atas menunjukkan kepada kita bahwa terjadi peningkatan yang signifikan jumlah Muslim di Spanyol dalam dua dekade terakhir. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini yaitu meningkatnya jumlah imigran ke Spanyol terutama dari kawasan Afrika Utara. Beberapa sumber mengatakan bahwa Spanyol merupakan salah satu negara yang menempati peringkat atas dalam hal tujuan imigran dari berbagai negara seperti Amerika Latin termasuk Inggris. Faktor lainnya yaitu terjadinya konversi masyarakat Spanyol ke dalam agama Islam. Dalam catatan perjalanannya ke Spanyol, Purwani Diyah Prabandari, seorang jurnalis dari *Tempo* pada 2018, melakukan wawancara kepada Presiden Yayasan Masjid Sevilla Ibrahim Hernandes yang menyatakan bahwa hampir setiap satu atau dua pekan terdapat orang yang mengucapkan syahadat di musala yang dikelola oleh organisasinya (Prabandari, 2019: 71-72).

D. Karakteristik Muslim & sebab-sebab menjadi Minoritas

Populasi umat Islam di Andalusia mengalami penurunan yang drastis setelah periode reconquesta yang berakhir pada abad 15 M. Pada abad ke-11 M jumlah Muslim diperkirakan mencapai 5.6 juta jiwa dan turun menjadi sekitar satu juta jiwa pada akhir abad ke-15 M (Berger, 2014: 75; Chejne, 1983: 5). Pada 1478 M kelompok Yahudi Separdi diberikan opsi untuk melakukan konversi ke agama Kristen atau meninggalkan Spanyol. Kebijakan ini selanjutnya diterapkan kepada umat Islam di Granada pada 1499 M. Umat Islam yang melakukan konversi tersebut kemudian

dikenal dengan istilah Morisco, yakni kelompok Kristen baru yang berbeda dengan Kristen lama yang mana mereka memiliki gaya hidup, adat istiadat, bahasa, dan budaya yang masih kuat dipengaruhi oleh tradisi Islam. Sebagian dari mereka juga tetap melaksanakan ajaran Islam secara rahasia. Kebijakan serupa, yakni memilih untuk konversi atau keluar dari Spanyol, kemudian diberlakukan kepada umat Islam di daerah lainnya seperti di Castile pada 1502 M, Navarre pada 1512 M, dan Aragon antara tahun 1520 M dan 1526 M. Pada permulaan abad ke17 M, yakni tahun 1609 M, kerajaan Kristen di Spanyol mengeluarkan kebijakan untuk mengusir seluruh Morisco dan dianggap telah bersih pada 1614 M. Dalam rangka mewujudkan kerajaan Kristen yang seluruhnya dihuni oleh ras asli Spanyol, kebijakan serupa juga diterapkan kepada kelompok Hippies, yakni orang-orang Roma yang tinggal di semenanjung Iberia tersebut.

Meskipun tidak ada data yang pasti mengenai berapa jumlah Morisco di Andalusia ketika itu, beberapa sejarawan sebagaimana ditulis oleh Chejne (1983) memperkirakan bahwa dari total setengah juta penduduk di daerah Valensia dan sekitarnya, tiga perempatnya adalah Morisco atau sekitar 160.000 jiwa. Dari jumlah ini sekitar 125.000 dikirim ke Afrika Utara menggunakan kapal yang telah disiapkan untuk mereka, dan sebagian kecil lainnya dikirim ke Prancis. Adapun sebagian lainnya diperkirakan berjumlah 35.000 tetap tinggal di Andalusia secara rahasia. Kondisi serupa juga berlaku di tempat lain. Sekitar 110.000 kelompok Morisco meninggalkan Andalusia, Murcia, dan Hornachos, 50.000 meninggalkan Catalunia, Aragon sekitar 120.000, Castile, Mancha dan Estremadura sekitar 250.000. Para eksil tersebut tersebar di berbagai kawasan Mediterania seperti Kepulauan Balearic, Prancis, Sisilia, Italia, Konstantinopel, dan kota-kota lainnya. Namun, jumlah terbanyak terdapat di kawasan Afrika Utara seperti Maroko, Algeria, dan Tunisia. Di beberapa kawasan, tidak jarang mereka disebut sebagai “Kristen Spanyol” dan mereka ingin

kembali ke tempat asal mereka di Spanyol dan sebagian lainnya mampu beradaptasi dengan lingkungan baru (Chejne,1983: 13).

Pembersihan Spanyol dari umat Islam, Yahudi, dan Hippies tidak terlepas dari periode pencarian identitas nasional Spanyol yang setidaknya ditandai dengan dua ciri utama yakni Katolik dan berkulit putih. Oleh karenanya, status sebagai negara Katolik di Spanyol baru dicabut setelah lengsernya Presiden Fransisco Franco dan dimulainya era demokrasi pada 1978. Kehadiran umat Islam di negeri matador pada periode kontemporer berkaitan erat dengan kebijakan imigrasi negara tersebut terutama setelah tahun 1985 dimana negara Spanyol membuka pintu imigrasinya termasuk untuk membawa keluarga para imigran (reunifikasi). Pada dekade berikutnya negara juga membuka peluang naturalisasi bagi warga imigran dari berbagai negara yang ada di negara tersebut.

Sejak periode Reconquesta tersebut, hari-hari besar umat Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha tidak lagi dirayakan sebagai hari libur nasional. Sebaliknya, tragedi runtuhnya Granada pada 1492 dirayakan sampai hari ini setiap tanggal 2 Januari. Perayaan tersebut bernama *Dia de la Toma* yang diselenggarakan di komplek istana Al-Hambra Granada. Jika dilihat dari perspektif umat Islam perayaan tersebut sangat bersifat paradoksal di mana tragedi kekalahan umat Islam justru dianggap sebagai hari cikal bakal terbentuknya negara Spanyol yang secara eksklusif dimiliki oleh Katolik dan berkulit putih (Ouassini, 2019: 1-10; *Republika*, 1 April 2015).

Bagi sebagian warga imigran atau keturunan Maroko, Spanyol dianggap sebagai tempat asal-usul mereka. Bahkan, di dalam konstitusi negara Maroko dinyatakan bahwa "gagasan tentang budaya Maroko modern berasal dari Andalusia" atau Spanyol bagian selatan. Beberapa situs peninggalan peradaban Islam yang tersisa di Spanyol seperti istana Al-Hambra, Masjid Katedral di Cordoba, dan situs-situs peninggalan peradaban umat Islam lainnya menjadi penghubung bagi mereka dalam membangun kesadaran masa lalu. Situs-situs tersebut meskipun

sudah dialihfungsikan sebagai gereja dan museum tetap dianggap sebagai situs suci yang membentuk kesadaran kolektif bukan hanya bagi umat Islam dari Afrika Utara, tetapi juga seluruh dunia (Ouassini 2019: 1-10).

E. Corak Muslim

Undang-undang tentang Perserikatan (*Law of Association*) pada 1964 memungkinkan bagi umat Islam untuk mendaftarkan organisasi mereka agar diakui oleh pemerintah. Organisasi umat Islam pertama yang terdaftar yaitu Masjid Islamic Center Granada dan Mahasiswa Muslim Granada yang dibentuk pada 1963 dan terdaftar pada 1966. Pada 1967, beriringan disahkannya UU tentang kebebasan beragama, menjadi kesempatan bagi umat Islam di Melilla untuk mendaftarkan diri pada 1968 lalu disusul komunitas Muslim Ceuta pada 1971 (Soage, 2018).

Salah satu tokoh penting umat Islam di Spanyol yaitu Riay Tatary, seorang mahasiswa kedokteran asal Suriah yang dekat dengan Ikhwanul Muslimin yang mendirikan Perkumpulan Umat Islam Spanyol (AME) pada 1971 dan UCIDE pada 1990. Tokoh lainnya yaitu Mansur Escudero, seorang Muslim asli Spanyol pendiri *Spanish Federation of Islamic Religious Entities* (FEERI) pada 1989. Kedua tokoh ini beserta organisasi Islam di belakangnya saling bersaing untuk memperebutkan otoritas sebagai perwakilan umat Islam di Spanyol. Pada 1992, ketika pemerintah meminta adanya lembaga perwakilan umat Islam, maka dibentuklah Komisi Umat Islam Spanyol (CIE) dan Escudero and Tatary menjadi sekretaris jenderalnya (Soage, 2018).

Selain mereka, figur berpengaruh yang lain yaitu Nizar Ahmad al-Sabbagh, anggota terkemuka Ikhwanul Muslimin yang melarikan diri dari rezim Baats di Suriah dan tinggal di Granada sejak 1966. Pada masa itu, dia dikenal sebagai pemimpin Muslim setempat dan memiliki dukungan pendanaan yang kuat dari Arab Saudi. Dia mendirikan penerbitan buku-buku Islam bernama La Casa Islámica yang menerjemahkan ke dalam bahasa Spanyol

karya-karya pemikir Islam seperti Hassan al-Banna, Sayyid Qutb and Abul A'la Maududi (Soage, 2018).

Tahun 1992 merupakan awal mula negara Spanyol mengakui Islam sebagai agama minoritas bersama dua agama minoritas lainnya yaitu Yahudi dan Protestan. Pengakuan ini dianggap sebagai kebijakan progresif pemerintah Spanyol sebagai kerangka hukum bagi kebebasan praktik beragama yang terus berlangsung hingga kini (Arigita, 2010: 73-74). CIE selaku badan perwakilan umat Islam secara reguler mengikuti acara pertemuan dengan Kementerian Keagamaan Spanyol dan turut berpartisipasi dalam pertemuan lintas pemimpin agama untuk keperluan administrasi. Pengakuan juga memberikan sejumlah fasilitas dari pemerintah meliputi pendidikan Islam di sekolah, pendampingan keagamaan di penjara dan rumah sakit, akomodasi untuk sholat Jumat dan hari-hari besar umat Islam, dan hak untuk berpartisipasi dalam merawat warisan budaya dan sejarah Islam di Spanyol

Adapun mazhab keagamaan yang paling banyak diikuti oleh Muslim di Spanyol adalah Mazhab Maliki. Hal ini disebabkan karena banyaknya Muslim yang datang dari wilayah Afrika Utara di mana mazhab Maliki sebagai mazhab yang populer di daerah tersebut. Adapun Syiah dipraktikkan oleh Muslim yang berasal dari Iran. Sebagian lainnya, terutama yang berasal dari Timur Tengah, mempraktikkan mazhab Wahhabi. Purwani Diyah Prabandari (2019) sebagaimana dalam catatan perjalanannya juga menyaksikan kumpulan pengikut sufi dari kawasan Eropa Barat yang kemungkinan besar adalah pengikut gerakan Abdul Qadir As-Sufi. Sampai tulisan dibukukan penulis belum menemukan data yang memadai mengenai jumlah yang pasti dari ragam praktik keagamaan Muslim di Spanyol.

Dalam *International Religious Freedom Report* Departemen Dalam Negeri Amerika (2019) disebutkan bahwa pada 2016 Kementerian Pendidikan telah menyetujui diselenggarakannya pengajaran agama Islam di sekolah publik terutama di kota-kota yang menjadi konsentrasi umat Islam di Spanyol. Pengajaran

pelajaran agama Islam ini pertama kali diselenggarakan pada tahun 2000 di Ceuta dan Melilla yang jumlah Muslimnya lebih dari 40% di Ceuta dan sekitar 53% di Melilla. Kebijakan berikutnya terjadi pada tahun 2005 dengan hadirnya peraturan tentang pengajaran agama Islam di sekolah tingkat dasar di kota-kota yang banyak penduduk Muslimnya seperti Barcelona, Madrid dan Andalusia. Dalam juknis terbaru tahun 2016 dinyatakan bahwa penekanan pengajaran agama Islam lebih diarahkan kepada beragama dalam praktik ibadah, dengan menekankan pada keragaman, saling memahami, toleransi beragama, resolusi konflik, dan hidup saling berdampingan. Adapun guru agama yang terdaftar di Kementerian Pendidikan sebanyak 50 guru agama Islam, jumlah yang dibilang terlalu kecil mengingat kebutuhan mereka yang banyak.

Dalam bidang politik, para politisi Muslim termasuk tinggi di Ceuta, Melilla, dan Catalonia, tetapi hanya di skala lokal saja. Tidak pernah ada perwakilan dari politisi Muslim baik laki-laki maupun perempuan di tingkat nasional. Hal ini diperburuk dengan sulitnya bagi anak-anak yang lahir di Spanyol sebagai keturunan imigran untuk mendapatkan hak suara. Salah satu syarat untuk mendapatkan hak suara tersebut yaitu harus memiliki orang tua yang salah satunya berwarganegara Spanyol. Sering kali ketika mengurus melalui jalur administrasi pemerintahan mereka menghadapi sejumlah kendala dan bisa menghabiskan waktu lima, sepuluh, bahkan dua puluh tahun untuk mendapatkannya (Ali, 2020: 10).

F. Diskriminasi, Islamofobia & Radikalisme

Meskipun jumlah umat Islam mencapai 4% dari seluruh populasi di Spanyol, separuh dari mereka tidak memiliki kewarganegaraan Spanyol. Hal ini menjadi salah satu faktor penting yang menjadikan umat Islam sebagai kelompok rentan sebagai sasaran tindakan diskriminatif dan pelanggaran HAM lainnya. Narasi anti-Muslim telah mengakar kuat di Spanyol yang terejawantahkan dalam sejarah reconquesta di mana

kekalahan bangsa Moro dijadikan sebagai "penemuan kembali" negara Spanyol. Dalam hal ini, semua Muslim baik dari Spanyol, Maroko, Pakistan, dan lainnya tetap dianggap sebagai bangsa Moro dalam imajinasi kolektif mereka sebagaimana peristiwa perayaan penaklukan Granada setiap tanggal 2 Januari. Dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar imigran berasal dari negara-negara mayoritas Muslim, perlakuan diskriminatif terhadap umat Islam dapat juga dibaca sebagai kekerasan berbasis Xenofobia di negara tersebut (Ali, 2020: 1).

Sejumlah faktor lain yang menyulut tindakan diskriminasi dan Islamofobia di Spanyol di antaranya yaitu pembangunan masjid yang sering kali mendapatkan protes dari masyarakat, Muslimah yang berjilbab di sekolah dan tempat kerja, dan aksi terorisme baik di dalam negeri maupun di kawasan Eropa. Pada saat pembukaan masjid di Granada pada Juli 2003, misalnya, menjadi isu yang ramai diperdebatkan. Proyek pembangunan masjid ini telah berjalan lebih dari 20 tahun dan menghadapi sejumlah kendala terkait masalah hukum. Terjadi vandalisme beberapa kali yang ditulis di atas situs masjid tersebut dengan seruan "pulanglah bangsa Moro".

Pada 2020 tercatat setidaknya terdapat 17 kasus penolakan sekolah terhadap murid yang mengenakan jilbab. Sebenarnya tidak ada aturan pemerintah tentang pelarangan jilbab ini, tetapi peraturan tersebut datang dari pihak internal sekolah. Satu-satunya aturan pemerintah di tingkat lokal yang memberlakukan aturan tidak boleh melarang siswi berjilbab atau "kippah" terdapat di Valencia pada 2017. Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan dari siswa yang dilarang berjilbab sehingga dikabulkan permohonannya. Sebaliknya, pada Juli 2019, pemerintah lokal Madrid membolehkan kebijakan bagi sekolah untuk melarang siswanya tidak menutupi kepala mereka, termasuk jilbab bagi siswa perempuan (Ali, 2020: 1).

LSM *The Citizens' Platform against Islamophobia* melaporkan bahwa pada 2017 terjadi 546 insiden anti-Muslim di Spanyol. Dari

angka tersebut, 386 kasus terjadi di media dan internet, sementara 48% lainnya berupa ujaran kebencian terhadap Islam dan Muslim. Sebagian besar kasus anti-Muslim ini terjadi di kota Catalonia (51), Andalusia (22), Valensia (20) dan Madrid (17). Dari jumlah tersebut target yang paling sering menjadi sasaran yaitu Islam dan umat Islam, perempuan (21%), dan masjid (7%). Adapun ujaran kebencian berbasis online lebih banyak ditujukan kepada muslimah yang berhijab (21%). Laporan terbaru tahun 2019 berjudul "*Islamophobia in the Media*" menyebutkan bahwa pandangan bias terhadap Muslim dikaitkan dengan perempuan yang mengenakan jilbab dan juga radikalisme dan terorisme. Tingginya angka anti-Muslim di Catalonia ditengarai oleh terjadinya serangan terorisme di Barcelona pada Agustus 2017. Aksi tersebut dilakukan oleh seorang pemuda 22 tahun bernama Younes Abouyaaqoub yang masih menjadi bagian dari jaringan ISIS. Setidaknya terdapat 13 korban yang meninggal dunia dan 130-an lainnya mengalami luka. Pemerintah menyebut peristiwa ini sebagai "Jihad Terorisme" dan merupakan tragedi paling memilukan setelah pengeboman di Madrid pada 2004.

Setahun sebelumnya, aksi terorisme juga terjadi di Brussels, Belgia pada 22 Maret 2016. Merespons hal tersebut, terjadi sejumlah aksi vandalisme pesan anti-Muslim di sejumlah masjid di berbagai kota di Spanyol (Denia, Catalonia, Granada, Madrid, Salamanca, Soria, dan Zamora) dan kota madya seperti Pusat Kebudayaan Madrid, salah satu masjid terbesar di Eropa. Meski begitu, tidak ada laporan tentang penangkapan dari pihak kepolisian atas peristiwa ini. Di samping itu, sekelompok orang bernama Hogar Social Madrid menyalakan lilin dan membentangkan spanduk menghadap masjid bertuliskan "Hari ini Brussels, besok Madrid?" kelompok ini menggunakan hastag di Twitter #Terroristwelcome dan status "keluarkan masjid dari Eropa". Meski demikian, aksi ini mendapatkan celaan baik dari imam masjid maupun sebagian besar warga sipil di kota tersebut.

G. Tantangan dan Harapan Muslim ke Depan

Umat Islam di Spanyol, pada masa lampau, pernah mencapai puncak kejayaan yang kini masih bisa disaksikan dalam berbagai warisan kebudayaan dan arsitektur seperti budaya, bahasa, dan masjid maupun istana yang kini menjadi warisan kebudayaan dunia yang diakui UNESCO. Beragam warisan kebudayaan tersebut sering kali menjadi ingatan kolektif umat Islam terutama dari Afrika Utara tentang asal-usul kebudayaan mereka. Dalam hal ini, Spanyol sebenarnya memiliki peluang yang besar sebagai jembatan dua peradaban besar antara Barat dan Timur terutama Islam dalam mempromosikan dan sebagai salah satu kiblat multikulturalisme.

Salah satu tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini adalah mereka masih terpecah-pecah ke dalam berbagai kepentingan organisasi dan kelompok seperti yang terdapat dalam Komisi Umat Islam Spanyol (CIE) di mana para pemimpin FEERI dan UCIDE saling berebut pengaruh untuk mendapatkan legitimasi sebagai perwakilan umat Islam di Spanyol. Hal ini tentu saja dinilai negatif terutama dari mereka yang berada di luar struktur organisasi. Beberapa organisasi Islam seperti *Islamic Council of Catalonia* dan Asosiasi Pekerja Maroko di Spanyol (ATIME) menuntut dilakukannya pembaharuan di tubuh CIE dengan mengadakan pemilihan secara demokratis untuk memilih pemimpin yang mewakili umat Islam di Spanyol (Arigita, 2010: 76). Diharapkan dengan adanya badan perwakilan yang baik menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam di akar rumput di hadapan pemerintah.

H. Kesimpulan

Islam memiliki sejarah yang panjang di Spanyol. Mereka pernah menguasai Semenanjung Iberia ini hampir selama delapan abad yang dimulai dari kedatangan pasukan Tariq bin Ziyad pada 711 M sampai dengan runtuhnya Granada pada 1492 M. Kejayaan masa lalu umat Islam di Spanyol tersebut masih dapat disaksikan

dengan berbagai peninggalan mereka seperti arsitektur masjid, bahasa, dan budaya di Spanyol.

Jumlah populasi umat Islam di Spanyol saat ini kurang lebih dua juta jiwa yang sebagian besar merupakan imigran dan masyarakat Spanyol yang melakukan konversi ke dalam agama Islam. Tahun 1992 merupakan babak baru kehidupan umat Islam Spanyol di mana mereka mulai memiliki badan perwakilan yang bertugas untuk menjembatani kepentingan umat Islam di hadapan negara. Tragedi pengeboman di Madrid 2004 dan Barcelona 2017 oleh kelompok terorisme menjadi penyebab menguatnya diskriminasi dan Islamofobia di negara tersebut.

Seiring dengan kemajuan ekonomi Spanyol yang juga merupakan anggota Uni Eropa, perkembangan sosial akan terus terjadi secara signifikan. Mobilitas sosial dari secara internal Eropa maupun dari Asia akan terus terjadi. Oleh karena itu, Muslim di Spanyol juga akan mengalami perkembangan secara signifikan seiring dengan fenomena multikulturalisme dan semakin diterimanya keragaman budaya dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

Agusta, Antok. 2020. "*Ian Dallas, Seniman-Sufi yang Membangun Komunitas*" dalam *alif.id,* 11 Oktober 2020.

Ahmad, Fauzia, dan Siddique Seddon (ed.). 1998. *Muslim Youth: Challenges, Oppotunuties, and Expectacions*. London: Continuum.

Ahmed, Asif. 2012. "Burma: Planned Religious And Racial Riots Against Muslims: A Historical Overview – OpEd." *Eurasia Review*. https://www.eurasiareview. com/24072012-burma-planned-religious-and-racial-riots-against-muslims-a-historical-overview-oped/ (April 26, 2021).

Akbarzadeh, Shahram dan Mansouri, Fethi. 2007. *Islam and Political Violence: Muslim Diaspora and Radicalism in the West.* London: Tauris Acedemic Studies.

Akhmetova, Elmira. 2013. Islam in Russia: Historical Facts and Modern Development. Kuala Lumpur: *International* Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia.

Aljazeera. 2019. "Asean Must Not Turn a Blind Eye to Rohingya Crisis: Rights Groups." *ASEAN News*. https://www.aljazeera. com/news/2019/6/19/asean- must-not-turn-a-blind-eye-to-rohingya-crisis-rights-groups (April 26, 2021).

Ambiah, Siti & Hamidah, Dedeh Nur. 2019. "Peran Komunitas Muslim Australia Dalam Perkembangan Islam di Australia Abad 20 M", *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam,* Vol. 07, No. 01.

Ansari, Humayun. "London Terrorist Attacks: the Impact of 7/7 on British Muslims" dalam https://www.realinstitutoelcano.org/

en/analyses/london-terrorist-attacks-the-impact-of-7-7-on-british-muslims/

Ansari, Mahsheed. 2018. "The Muslim Student Associations (MSAS) and the Formation of the Australian *Ummah*". *Australian Journal of Islamic Studies,* Vol. 03, No, 03.

Antunez, Juan Carlos. 2016. Islam in Russian: Challenge or Opportunity? Global Strategy 2016. https://global-strategy.org/islam-in-russia-challenge-or-opportunity/.

Aphornsuvan, Thanet. 2003. dalam *History and Politics of The Muslims Thailand.* Bangkok: Thammasat University.

Asmanidar. 2015. "Potret Tamaddun Islam di Negeri Tirai Bambu: Mulai Dari Masa Dinasti Tang Hingga Republik Cina", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14 (2).

Astor, Avi. 2014. "Religious Governance and the Accommodation of Islam in Contemporary Spain" *Journal of Ethnic and Migration Studies*, Vol. 40, No. 11 (1716–1735).

Barnett, A. Doak. 1963. China on the Eve of Communist Takeover, Praeger publications in Russian history and world communism, vol. 130, New York: Praeger.

Besheer Muhamed, "Muslims are a growing presence in U.S., but still face negative views from the public", https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/01/muslims-are-a-growing-presence-in-u-s-but-still-face-negative-views-from-the-public/, diakses 25 April 2022.

Bolelli, Senhan. 2021. "Islam not only religion of migrants: Spanish Muslims say there is misinformation about Islam" https://www.aa.com.tr/en/culture/islam-not-only-religion-of-migrants-spanish-muslims/2225918.

Briksman, Linda, dkk. 2018. *Islamophobia in Australia*. ed. Derya Iner. Islamophobia Register Australia.

Chia, Jasmine. 2016. "The Truth About Myanmar's Rohingya Issue." https:// thediplomat.com/2016/03/the-truth-about-myanmars-rohingya-issue/ (July 11, 2017).

Cochrane, Liam. 2017. "Myanmar May Have Killed 'thousands' of Rohingya Muslims." https://www.abc.net.au/news/2017-02-09/myanmar-may-have- killed-thousands-of-rohingya-muslims/8256344 (July 9, 2017).

Cohen, Ariel. 2012. *A Threat to The West: The Rise of Islamist Insurgency In The Northern Caucasus and Russia's Inadequete Response*, https://www.heritage.org/global-politics/report/threat-the-west-the-rise-islamist-insurgency-the-northern-caucasus-and

Croissant, Aurel. 2007. "Muslim Insurgency, Political Violence, and Democracy in Thailand", *Journal Terrorism and Political Violence* Volume 19 Issue 1.

Davidson, Emma, Rosalind Edwards, Lynn Jamieson, and Susie Weller. 2019. "Big data, qualitative style: a breadth-and-depth method for working with large amounts of secondary qualitative data." *Quality & Quantity* Vol. 53, no. 1 (2019).

Dee, Hanifa. 2012. "Excavating the Past: Australian Muslim", *The La Trobe Journal,* No. 89.

Demographic Study of the Muslim Population in Spain dalam https://more.bham.ac.uk/euro-islam/tag/muslims-in-spain/

Dibalik Pelarangan Beribadah etnis Muslim Uighur di Cina, diakses dari http://luarnegeri kompasiana.com

Dozy, Reinhart, 2013. Spanish Islam: A History of The Muslems in Spain. London: Chatto & Windus.

El-Menouar. 2017. *Muslims in Europe Integrated but not accepted?* Bertelsmann Foundation, Gütersloh, Germany.

Feigenblatt, Otto von. 2010. The Muslim Malay Community in Southern Thailand: A "Small People" Facing Existential Uncertainty. *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies* 27.

Fetzer, Joel S & Soper, J. Christopher. 2005. *Muslims and the State in Britain, France and Germany*. Cambridge University Press: Cambridge.

Fink, Arlene. 2019. *Conducting research literature reviews: from the Internet to paper*. Sage Publications.

Foroutan, Nayka. 2013. *Identity and Muslim Integration in Germany.* Washington DC: Migration Policy Institute.

Frydenlund and M. Jerryson (eds.). 2020. *Buddhist-Muslim Relations in a Theravada World.* Singapura: Springer.

Fuad, Ai Fatimah Nur. 2012. "Muslims in Britain: questioning Islamic and national identity", *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Volume 2, Number 2, December: 215-240.

Gabriel González Núñez, The Story of a Shipwrecked Slave: The Role of Esteban de Dorantes as An Interpreter in the Early Exploration and Conquest of the Americas, Revista de Historia de la Traduccion: a Journal of Translation History vol. 14, issue http://www.traduccionliteraria.org/1611/art/gonzaleznunez.htm

Grims, Brian J. & Mehtab S. Karim. 2011. *The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010-2030*. Washington: Pew Research Center, 2011.

Guest, M., dkk. 2020. *Islam and Muslims on UK University Campuses: Perceptions and Challenges*. Durham: Durham University, London: SOAS, Coventry: Coventry University and Lancaster: Lancaster University.

Hasbi Aswar, The Strategy Of Muslim Communities In Encountering Islamophobia In The United States, Afkaruna Vol. 17 No. 1 Juni 2021.

Heath, Anthony. 2014. "Muslim in Britain Today: Economic Disadvantage, Civil and Political Engagement" (Muslim Professionals Forum).

Historical Events and Spaces of Hate: Hate Crimes against Arabs and Muslims in Post-9/11 America Author(s): Ilir Disha, James C. Cavendish and Ryan D. King Source: Social Problems , Vol. 58, No. 1 (February 2011), pp. 21-46

Hooker, M. B. 1983. *Islam in South-East Asia*. Leiden: Brill.

Huda MF, Moh. Shofiyul. 2017., "Bikulturalisme Islam-Australia: Pengalaman Akulturasi Nahid Afrose Kabir". *Religio: Jurnal Studi Agama-Agama,* Vol. 07, No. 01.

Human Rights Resource Center. 2015. *Keeping the Faith: A Study of Freedom of Thought Conscience and Religion in ASEAN*. Depok Universitas Indonesia.

Human Rights Watch. 2002. *Crackdown on Burmese Muslims*. Human Rights Watch. www.hrw.org.

_____. 2016. "Burma: Military Burned Villages in Rakhine State." *Human Rights Watch*. https://www.hrw.org/news/2016/12/14/burma-military- burned-villages-rakhine-state (April 26, 2021).

Humayun Ansari. 2002, Muslims in Britain: Laporan Minority Rights Group International (London).

Husein, Serena dkk. 2021. *Engaging British Muslims with the Census.* British Muslim Heritage Centre.

Ihsan Bagby, the American Mosque 2020: Growing and Evolving Report 1 of the us mosque survey 2020: basic characteristics of the american mosque, https://www.ispu.org/report-1-mosque-survey-2020/, diakses 25 April 2022.

International Crisis Group /Europe Report No. 181. 2007. *Islam and Identity in Germany.* 14 Maret.

_____. 2003. *Myanmar Backgrounder: Ethnic Minority Politics*.

_____. 2013. *the Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar*.

International Religious Freedom Report: Germany 2012. US State Department: Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 2012.

Jamil, Ahmad Islamy & Indah Wulandari. 2015. "Reconquista, Simbol Marjinalisasi Islam di Spanyol" *Republika*, 1 April.

Jane I. Smith, "Islam in America" *The Journal of Religion*, Vol. 93, No. 1 (Januari 2013), hlm. 77-87.

Jerryson, Michael K., and Mark Juergensmeyer. 2010. *Buddhist Warfare*. New York: Oxford University Press.

Jilani, Ahmad FK. 1999. *Ġe Rohingyas of Arakan: Ġeir Quest for Justice*. Dhaka: Ahmed Jilani.

John, Anthony H. dan Saeed, Abdullah. 2002. *Muslim in Australia,* dalam Yvonne Yazbeck Haddad & Jane I. Smith (ed). *Muslim Minorities in the West: Visible and Invisible.* New York: Altamira Press.

Juliane Hammer dan Omid Safi, The Cambridge Companion to American Islam. Cambridge University Press, 2013.he Cambridge

Kadoe, Naw Lily, and Fatimah Husein. 2015. "Ulama, State, and Politics in Myanmar." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 53(1): 131–58.

Kambiz GhaneaBassiri , "Writing Histories of Western Muslims" *Review of Middle East Studies*, Winter 2012, Vol. 46, No. 2, pp. 170-179.

Karen Human Rights Group. 2014. "Easy Target: The Persecution of Muslims inBurma." *Karen Human Rights Group*. https://khrg.org/my/node/1019 (April 26, 2021).

Karim, M. Abdul. 2006. *Islam di Asia Tengah: Sejarah Dinasti Mongol-Islam*.Yogyakarta: Bagaskara.

Kartini, Indriana. 2018. *Minoritas Muslim di Australia dan Inggris.* Jakarta: LIPI.

Katz, Nathan, and Ellen S. Goldberg. 1988. "The Last Jews in India and Burma." https://www.jcpa.org/jl/jl101.htm (April 26, 2021).

Kebijakan One Cina policy, dan penerapannya pada etnis muslim Uighur, diakses dari http://saveUighur.org

Kelly, Liam. 2016. "Myanmar: Who Are the Rohingya?" *Newsweek*. https://www. newsweek.com/explainer-who-are-rohingya-541575 (April 16, 2020).

Kettani, Houssain. 2010. "Muslim Population in Europe: 1950 – 2020" dalam *International Journal of Environmental Science and Development*, Vol. 1, No. 2, June.

Koug, Erich & Voyce, Malcolm (ed). 2016. *Muslim Integration: Pluralism and Multiculturalism in New Zealand and Australia.* London: Lexington Books.

Kreienbrink, Axel and Mark Bodenstein (eds.). 2010. *Muslim Organisations and the State: European Perspectives*. Nurnberg: Bundesamt fur Migration und Fluchtlinge.

Leider, Jacques. 2017. "Transmutations of the Rohingya Movement in the Post- 2012 Rakhine State Crisis." In *Ethnic and Religious Identities and Integration in Southeast Asia*, eds. Ooi Keat Gin and Volker Grabowsky. Silkworm Books, 191–239. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03037743 (April 26, 2021).

London: Mansell.

Long, Robert and Shadi Danechi. 2019. *Faith Schools in England: FAQs. House of Commons Library* Number 06972, 20 December.

M. H. M. Dahlan. 2019. "Islam di Australia (Tinjauan Historis dan Perkembangannya)", *Jurnal al-Hikmah,* Vol. XXI, No. 01, 2019.

Ma, Haiyun. 2006. ***Journal of Minority Affairs.*** The Mythology of Prophet's Ambassadors in China: Histories of Sa'd Waqqas and Gess in Chinese Sources1. Vol. 26 no. 3.

MacGregor, Fiona. 2013. "Burma's 'bin Laden of Buddhism.'" *Ġe Telegraph*. https:// www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/burmamyanmar/10177815/ Burmas-bin-Laden-of-Buddhism.html (April 18, 2020).

Malashenko, Alexei. 2016. "Preserving the Calm in Russia's Muslim Community." *Carnegie Moscow Center*. https://carnegie.ru/commentary/64520

Malik, Maleiha. 2012. Minority Legal Orders in the UK Minorities, Pluralism and the Law London: British Academy.

Markedonov, Sergey. 2013. "The Rise of Radical and Nonofficial Islamic Groups in Russia's Volga Region". CSIS.

Maryam, Siti, dkk. 2009. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, Yogyakarta: LESFI.

Mauna, Boer. 2005. "Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Fungsi dan Era Dinamika Global Edisi Kedua", Bandung: Alumni.

Mesa, Enrique Soria. 2012. "Los moriscos que se quedaron. La permanencia de la población de origen islámico en la España Moderna (Reino de Granada, siglos XVII-XVIII). The moriscos who remained. The permanence of Islamic origin population in Early Modern Spain (Kingdom of Granada, XVII-XVIII centuries) in *Vínculos de Historia*, No. 1.

Ministry of Immigration and Population. 2014. *ġe 2014 Myanmar Population and Housing Census*. Nay Pyi Taw: Department of Population. The Union Report: Religion.

Minority at Risk. 2017. *Chronology for Rohingya (Arakanese) in Burma*. www. mar.umd.edu. https://www.burmalibrary.org/docs5/Myanmar_Constitution- 2008-en.pdf (April 26, 2021).

Muslim Uighur di Xinjiang Cina, Stranger in their own land, di http://opinians.blogspot.com/2013/12/muslim-uighur-di-xinjiang-cina-stranger.html

Mutalib, Hussin & Hashmi, Taj ul-Islam (ed). 1996. *Islam, Muslims and the Modern State: Case-Studies of Muslim in Thirteen Countries.* London: Macmillan Press LTD.

Nurdin, M. Amin. 2000. "Religious Plurality and Diversity in Australia and Its Common Issues", *Jurnal Refleksi*, Vol. II, No. 02.

Nurdin, M. Amin. 2009. *Pergulatan Kaum Muslim Minoritas Australia: Islam Versus Multikulturalisme dan Sekularisme.* Jakarta: Ushul Press.

OIC, 14th Annual Report on Islamophobia December 2020-January 2022.

Open Government License. 2018. The independent review into the application of sharia law in England and Wales. Presented to Parliament by the Secretary of State for the Home Department by Command of Her Majesty

Open Society Institute, *Muslims in the UK: Policies for Engaged Citizens* (New York dan Budapest: OSI, 2005).

Ouassini, Anwar. 2019. "We Have Come Back Home: The Spanish-Moroccan Community, Collective Memory, and Sacred Spaces in Contemporary Spain" *Journal Religions* 10 No. 128 (1-10).

Ozyurek, Esra. 2014. *Being German Becoming Muslim: Race, Religion, and Conversyion in the New Europe*. New Jersey: Princton University, 2014.

Perry, Michael J. 2009. "Liberal Democracy and the Right to Religious Freedom."

Pew Forum center. 2011. "Expected Growth of Russia's Muslim Population", http://www.pewforum.org/future-of-the-global-Muslim-population-russia.aspx

_____. 2006. Muslims in Europe: Economic Worries Top Concerns about Religious and Cultural Identity. Washington DC: The Pew Global Attitude Project.

_____. 2009. *Mapping The Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Pupulation.*

_____. 2011. "The Future of the Global Muslim Population: Projections for 2010–2030." In *the Pew Forum on Religion and Public Life*,Washington DC: Pew-Templeton.

_____. 2011. *The Future Global Muslim Population: Projections for 2010-2030*, hlm. 121.

_____. 2015. *Latest Trends in Religious Restrictions and Hostilities*. Washington DC: Pew Research Center. https://www.pewforum.org/2015/02/26/religious- hostilities/.

_____. 2015. *The Future of World Religions: Population Growth Projection, 2010-2050.*

_____. 2021. *Globally, Social Hostilities Related to Religions Declined in 2019, while Government Restrictions Remains at Highest Level.* US: Pew Forum.

Prabandari, Purwani Diyah. 2019. "Sepotong Jejak Muslim Al-Andalus" dalam *Jejak Islam di Uni Soviet dan Spanyol*. Jakarta: Tempo Publishing.

Putthongchai, Songsiri. 2013. "What is it like to be Muslim in Thailand? A case study of Thailand through Muslim professionals' perspectives". Disertasi pada Doctor of Philosophy in Arab and Islamic Studies, University of Exeter Inggris.

Rohe, Mathias. 2010. "Germany" dalam Jorgen Nielse (ed), *Yearbook of Muslims in Europe*, Vol.2. Leiden: Brill.

Saeed, Abdullah. 2003. *Islam in Australia.* Sydney: Allen & Unwin.

Safdar, Anealla. 2015. "Myanmar's 2015 Election: Who Are the Rohingya?" https://www.aljazeera.com/features/2015/10/28/myanmars-2015-election- who-are-the-rohingya (April 26, 2021).

Safei, Agus Ahmad, dkk. 2017. *Islam Indonesia di Australia: Kontribusi Dakwah Komunitas Muslim Indonesia.* Bandung: CV. Sentra Publikasi Indonesia.

Salganik, Matthew J. 2019. *Bit by bit: social research in the digital age*. Princeton University Press, 2019.

Scupin, Raymond. 1980. "The Politics of Islamic Reformism in Thailand", *Asian Survey* , Vol. 20, No. 12, Dec., 1980.

Smith, Mark A. 2006. Islam in the Russian Federation. UK: Conflict Studies Research Centre Russian Series 06/*53*.

Soage, Ana Belen. 2018. *Islam in Spain A Story of Many Strands Part I* (European Eye on Radicalization).

Stevens, Christine. 1993. "Afghan Camel Drivers: Founder of Islam in Asutralia", dalam Mary L. Jones (ed). *An Australian Pilgrimage: Muslim Australian in Seventeety Century.* Melbourne: Law Printer.

Szep, Jason. 2013. "Special Report: Buddhist Monks Incite Muslim Killings in Myanmar." *Reuters*. https://www.reuters.com/article/us-myanmar-violence- specialreport-idUSBRE9370AP%20 20130408 (April 18, 2020).

Thawnghmung, Ardeth Maung. 2003. "Preconditions and Prospects for Democratic Transition in Burma/Myanmar." *Asian Survey* 43(3): 443–60.

The Ministry of Information of Myanmar. 2008. *Constitution of the Republic of Union of Myanmar.*

The Muslim Council of Britain (MCB). 2021. *Defining Islamophobia: A Contemporary Understanding of How Expressions of Muslimness are Targeted* (London: MCB).

Tonkin, D. 2014. "The 'Rohingya' Identity: British Experience in Arakan 1826– 1948." *Rangoon: Network Myanmar*. www.theirrawaddy.org (April 9, 2020).

Torrance, David. 2019. Sharia law courts in the UK, House of Common Library number CDP-2019-0102, 1 May 2019.

UN General Assembly, UN General Assembly. 1948. "Universal Declaration of Human Rights.Pdf." http://www.verklaringwarenatuur.org/Downloads_files/ Universal%20 Declaration%20of%20Human%20Rights.pdf.

United States Department of State, 2016. Report on International Religious Freedom – Spain.

US Department of State. 2006. "International Religious Freedom Report 2006."

Veen, Rianne ten. 2005. *Myanmar's Muslims: ġe Oppressed of the Oppressed*. UK:Islamic Human Rights Commission.

Wee, Sui-Lee, Cina's 'Long-Term Time Bomb': Falling Births Stunt Population Growth, https://www-nytimes-com.translate.goog/2021/05/10/Cina-census-births-fall.html?, The New York Times Company, 10 Mei 2021.

Wekke, Ismail Suwardi. 2017. Minoritas Muslim di Cina: Perkembangan, Sejarah, dan Pendidikan, *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1).

Yahya, Harun. Chinese Torture in East Turkestan, diakses dari http://eastturkestan.net/Cina05.html

Yegar, Moshe. 1972. *the Muslims of Burma*. Wiesbaden: O. Harrassowitz.

_____. 1981. "The Crescent in Arakan." In *Israeli ġe Crescent in the East: Islam in Asia Major*, London: Cruzon.

Yuniarto, Paulus Rudolf. 2004. "*Integration of Pattani Malays: a Geopolitical Change Perspective", dalam* Multiculturalism, *Separatism, and Nation State Building in Thailand* (Pusat Penelitian Sumberdaya Regional Indonesia 2004.

Yusuf, Imtiyaz. 2007. "The Southern Thailand Conflict and the Muslim World," *Journal of Muslim Minority Affairs*, Vol. 27, No. 2.

Website:

http://en.qantara.de/content/muslims-in-germany-blocked-integration

http://www.euro-islam.info/country-profiles/germany/

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/07/19/5-facts-about-the-muslim-population-in-europe/

https://www.dw.com/en/merkel-islam-is-a-part-of-germany/av-43067794

https://www.gatestoneinstitute.org/6793/germany-20-million-muslims

https://www.bbc.co.uk/religion/religions/islam/history/uk_1.shtml

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/culturalidentity/religion/articles/exploringreligioninenglandandwales/february2020

https://www.pewforum.org/2010/09/15/muslim-networks-and-movements-in-western-europe-muslim-brotherhood-and-jamaat-i-islami/

http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/29721/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y
http://wanfauzi.com/penindasan-muslim-Uighur-di-negara-Cina/
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Demografi_Republik_Rakyat_Tiongkok#
https://www.republika.co.id/berita/qwjpio366/mayoritas-muslim-australia-pernah-alami-diskriminasi-part1
https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/muslim_di_australia.html
https://www.afic.com.au/#
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2021/09/01/muslims-are-a-growing-presence-in-u-s-but-still-face-negative-views-from-the-public/

DAFTAR INDEKS

A

Abbasiyah 37, 38, 127, 128, 144
Afrika 49, 53, 55, 72, 73, 75, 76, 77, 90, 91, 93, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 114, 139, 156, 152, 151, 149, 148, 146, 143, 142
Afro-Amerika 71
Ahmadiyah 75, 90, 94, 95, 112, 114, 115
Aliran 75, 94, 114, 120, 134
Al-Qaeda 71, 82, 113, 122
Amerika 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 103, 114, 137, 152, 148
Andalusia 128, 132, 155, 153, 150, 149, 148, 147, 145, 144, 143, 142, 141
Arab 127, 139, 151, 146, 145
Asia 19, 29, 30, 34, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 157, 142
Australia 70

B

Bali 49, 63, 70
Bangladesh 55, 56, 78, 108, 112, 113
Biksu 1, 2
Bom 120, 138
Bom Bali 63, 70
Buddha 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 108, 111

C

Cina 2, 24, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 72
Corak 3, 50, 56, 57, 79, 106

D

Demografi 5, 40, 54, 76, 91, 111, 129, 145
Demokrasi 28, 31
Demokratisasi 21, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 142
Dinasti 1, 35, 37, 38, 39, 97, 128, 131, 140, 144
Diskriminasi 20, 24, 26, 27, 32, 35, 36, 45, 48, 50, 59, 65, 68, 69, 83, 84, 86, 88, 98, 102, 103, 107, 108, 116, 120, 123, 125, 157, 154
Diskriminatif 43, 48, 69, 84, 88, 98, 102, 115, 119, 120, 123, 154, 153

E

Ekstremisme 15, 33, 44, 47, 125, 137, 138
Eropa 21, 31, 49, 51, 52, 53, 55, 67, 72, 76, 77, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 130, 134, 136, 138, 140, 157, 155, 154, 152, 145, 143, 141
Etnis 1, 2, 3, 8, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 56, 57, 62, 66, 67, 72, 76, 82, 85, 87, 89, 90, 93, 95, 105, 108, 112, 113, 116, 120, 125, 126, 131, 132, 134, 136, 137, 139
Etnisitas 20, 23

G

Gangsu 35, 36
Gelombang 3, 89, 90, 91
Geografis 41, 72
Gibraltar 143

H

Hanafi 9, 41, 134
Hindu 2, 5, 24, 27, 32, 33, 52, 108, 110, 111, 129

I

Imigran 23, 27, 33, 49, 53, 55, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 109, 110, 118, 122, 126, 128, 130, 131, 134, 136, 137, 157, 154, 153, 150, 148, 147, 146

India 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 38, 47, 52, 55, 59, 72, 78, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 123
Indonesia 21, 29, 35, 49, 51, 54, 55, 56, 63, 72, 77, 53, 93, 115, 129
Inggris 19, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 49, 50, 51, 55, 62, 68, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 148
Islam 3, 35, 19, 21, 22, 39, 22, 23, 24, 41, 24, 70, 26, 27, 28, 30, 50, 31, 32, 33, 55, 56, 35, 36, 58, 36, 58, 37, 38, 39, 59, 40, 60, 41, 42, 63, 42, 63, 64, 47, 48, 68, 49, 74, 75, 51, 75, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 78, 57, 81, 82, 57, 58, 84, 58, 84, 58, 85, 86, 59, 86, 60, 61, 62, 63, 64, 47, 64, 65, 69, 65, 68, 69, 70, , 57, 70, 71, 41, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 38, 85, 87, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 97, 140, 98, 99, 100, 128, 101, 102, 131, 102, 103, 132, 103, 104, 133, 104, 105, 135, 106, 136, 107, 108, 137, 108, 139, 109, 110, 140, 111, 112, 113, 116, 113, 114, 119, 114, 115, 121, 115, 116, 123, 124, 118, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, , 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 109, 145, 110, 144, 111, 144, 112, 143, 142, 113, 114, 141, 114
Islami 115, 116, 119, 137
Islamis 104, 105
Islamisme 33, 105, 107, 140
Islamofobia 1, 12, 86, 107, 108, 113, 119, 114, 120, 121, 122, 123, 137, 136, 157, 154, 153, 143

K

Kampanye 25, 83, 133
Karakteristik 71, 79
Katolik 24, 65, 76, 89, 99, 100, 129, 130, 150, 145, 142
Kerajaan 21, 22, 25, 33, 89, 115, 127, 128, 149, 144, 143, 142
Kesultanan 22
Konflik 20, 21, 23, 24, 31, 43, 68, 73, 75, 87, 91, 93, 95, 106, 118, 127, 139, 153
Konstitusi 26, 32, 50, 63, 98, 150
Kristen 24, 27, 32, 33, 40, 54, 59, 63, 64, 67, 74, 76, 88, 89, 94, 98, 99, 108, 110, 111, 113, 122, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 136, 137, 149, 148, 145, 144

L

London 51, 107, 109, 112, 114, 115, 116, 117, 120

M

Makam 36, 125, 127, 129
Makassar 8, 49, 51
Masjid 36, 37, 38, 39, 42, 70, 56, 59, 65, 58, 64, 65, 70, , 75, 78, 79, 80, 84, 89, 90, 94, 95, 96, 105, 109, 110, 112, 115, 116, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 157, 156, 155, 154
Mazhab 41, 56, 57, 60, 70, 94, 95, 134, 152, 147
Melayu 109, 112
Migrasi 37, 43, 46, 72, 87, 91, 123
Multi-etnis 126, 139
Multikultural 49, 50, 65, 70, 107
Muslim 2, 76, 49, 51, 53, 77, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 60, 61, 62, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 140, 126, 127, 128, 129, 125, 130, 131, 130, 133, 131, 132, 134, 135, 136, 133, 137, 136, 139, 140, 137, , 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 141

N

Narathiwat 1, 2, 7, 11, 12, 13
Ningxia 36, 41, 42, 48
Non-Muslim 43, 45, 85, 106, 117

P

Patani 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 15, 17, 18
Pattani 1, 2, 7, 11, 12, 13, 14
Populasi 5, 6, 8, 17, 21, 23, 35, 36, 37, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 69, 72, 76, 77, 88, 91, 92, 93, 94, 107, 108, 111, 112, 113, 125, 130, 140, 157, 153, 147, 146, 145, 144, 142, 141
Prasangka 81, 123
Protestan 76, 89, 99, 100, 130, 152, 143

Q

Qadian 57

R

Rabbi 24
Radikal 11, 19, 33, 105, 119, 137
Rakhine 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29
Reconquista 132
Revolusi 17, 137
Rusia 140, 125, 126, 127, 128, 129, 128, 130, 129, 130, 131, 130, 131, 132, 131, 133, 132, 134, 135, 134, 135, 136, 135, 136, 137, 136, 137, 138, 137, 138, 137, 139, 138, 139, 140, 139

S

Sahabat 125, 127
Salafi 139
Sejarah 4, 11, 15, 37, 42, 58, 60, 93, 96, 47, 97, 99, 69, 74, 78, 100, 112, 115, 121, 125, 128, 129, 156, 153, 152, 143, 142, 141
Sekolah 133, 154, 153, 152
Sensus 130
Spanyol 128, 132, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 143, 142, 141
Sultan 40, 48

T

Tenggara 1, 2, 16, 17, 21, 49, 54, 55, 57, 93, 142
Terorisme 63, 70, 83, 103, 120, 121, 140, 126, 138, 137, 138, 157, 155, 154, 143
Turki 50, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 87, 89, 90, 93, 94, 96, 97, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 125, 130

U

Uighur 36, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 45, 46, 47, 48
Ulama 44, 85, 128, 133, 140
Umayyah 37, 127, 144, 143
Universitas 83, 101, 117

W

Wahhab 9
Wahhabi 105, 152

X

Xenofobia 154
Xinjiang 35

Y

Yala 2, 7, 9, 11, 12, 13

BIODATA PENULIS

Muhammad Wildan adalah dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Ia meniti karier sebagai dosen sejak tahun 1996 hingga saat ini. Setelah menyelesaikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995) dan S2 di Leiden University Belanda (1999), dia menyelesaikan Ph.D. di *National University of Malaysia*, UKM (2009). Ia memiliki beberapa pengalaman sebagai peneliti (*fellow*) di beberapa institusi, yaitu *International Institute for the Study of Islam in the Modern World* (ISIM) di Belanda (2007), *Asian Research Institute* (ARI) di *National University of Singapore* (2007), dan *Centre for Near Middle-Easter Studies* (CNMS) Universitas Marburg, Jerman (2015). Minat penelitiannya adalah tentang Islam dan politik di Indonesia kontemporer terutama pada konservatisme dan ekstremisme, budaya populer Islam, dan juga masalah minoritas Muslim. Minatnya untuk studi isu ekstremisme-radikalisme dan Muslim minoritas khususnya di negara-negara Barat telah membawanya untuk berkunjung ke Jerman, Belgia, Austria, Yunani, Amerika, Australia dll. Selain itu, ia juga mempunyai pengalaman sebagai Direktur Pusat Kajian Islam dan Transformasi Sosial (CISForm) UIN Sunan Kalijaga (2012-2019), sebagai Associate Director pada Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) di Yogyakarta (2019-2020), dan Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga (2020-~). Pengalaman sebagai direktur CISForm telah membawanya untuk bisa bekerja sama riset dengan berbagai lembaga donor internasional seperti Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ), United Nations Development Programme (UNDP), dll. Di antara publikasi

terbarunya adalah artikel jurnal "Popular Piety in Indonesia: "Aestheticization" and Reproduction of Islam" (*Ilahiyat Studies*, Bursa Uludağ University, 2021), "The Persecution of Rohingya Muslims and the Path to Democratization in Myanmar" (*Studia Islamika*, PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), "Mainstreaming Moderation in Preventing-Countering Violent Extremism (P/CVE) Pesantrens In Central Java" (QIJIS, IAIN Kudus, 2022) and juga bookchapter "Countering Violent Extremism in Indonesia: The Role of Former Terrorists and Civil Society Organizations" (Singapore: Palgrave McMillan, 2022). Terakhir, ia mempublikasi buku yang berada di tangan pembaca ini, yaitu "Muslim Minoritas Kontemporer: Sejarah Islam, Tantangan Ekstremisme, Diskriminasi, dan Islamofobia (Yogyakarta: IDEA Press, 2022). Ia bisa dihubungi di muhammad.wildan@uin-suka.ac.id

IDEA press yogyakarta
Diro RT 58 Jl. Amarta, Pendowoharjo
Sewon, Bantul, Yogyakarta 55185
telp/fax. (0274)6466541
Email: ideapres.now@gmail.com

ISBN 978-623-484-012-4
9 786234 840124